

Prof. Dr. Muslimin Kara, S.Ag, M.Ag
Dr. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag



EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

(Materi Ujian Komprehensif)

Prof. Dr. Muslimin Kara, S.Ag, M.Ag
Dr. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag

EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

(BUKU BAHAN UJIAN KOMPREHENSIF)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
Seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit

All Rights Reserved

**EKONOMI SYARIAH DAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
(Buku Bahan Ujian Komprehensif)**

Penulis :

**Prof. Dr. Muslimin Kara, S.Ag, M.Ag
Dr. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag**

Editor :

Syatir Sofyan, SEi,ME

Layout:

Mutmainnah

Cetakan : I 2020

vi + 212 halaman, 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-226-172-3

Penerbit:



Pusaka AlMaida

Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahir-Rahmani-Rahim

Alhamdulillah Rabil alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku bahan ujian komprehensif untuk jurusan Ekonomi Islam ini bisa diselesaikan. Salawat dan salam juga penulis juga kirimkan kepada junjungan nabi Besar Muhammad saw beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, semoga keteladanannya dalam mengembangkan dakwahnya, termasuk dalam hal ini masalah perekonomian syariah dapat teraktualisasi di kalangan umat Islam dewasa ini.

Buku dengan judul ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah ini kami susun dalam rangka sebagai bahan ujian komprehensif, bagi mahasiswa, khususnya jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Buku ini membahas secara mendalam tentang pengertian, hakekat ekonomi syariah, prinsip-prinsip dan metodologinya. Selain juga mengetahui sumber-sumber hukum ekonomi syariah, perkembangan pemikiran ekonomi syariah, dan juga terkait masalah riba, gharar dan maysir.

Buku ini juga membahas tentang lembaga keuangan syariah, yang di dalamnya terdapat konsep dasar uang dalam Islam, Bank Syariah, BPRS, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Zakat dan juga Lembaga wakaf.

Akhirnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini. Kami harapkan dengan adanya buku ini bisa jadi pengantar untuk memahami lebih jauh mengenai Ekonomi Syariah yang sekarang ini kita melihat perkembangannya luar biasa.

Sebagai penulis, tentunya akan terdapat banyak kekurangan dalam penulisan buku ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan maaf atas segala kekurangan tersebut.

Demikianlah dan hanya kepada Allah kita berserah diri dan Dialah yang maha Benar.

Wassalam

Penulis



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii	
Daftar Isi	vii	
BAB I	PENGERTIAN, HAKEKAT, PRINSIP-PRINSIP DAN METODOLOGI EKONOMI ISLAM	1
	A. Definisi Ekonomi Islam	1
	B. Hakekat Ekonomi Syariah	4
	C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	4
	D. Metodologi Ekonomi Islam	11
BAB II	SUMBER-SUMBER HUKUM EKONOMI ISLAM	15
BAB III	PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH	29
	A. Pemikiran Ekonomi Syariah	29
	B. Perbandingan Ekonomi Islam dan Konvensional	38
BAB IV	MASALAH RIBAH, MAISYIR DAN GHARAR DALAM PRAKTEK KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	43
	A. Kontroversi Bunga Bank	43
BAB V	KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN	65
	A. Konsep Dasar Uang	65
	B. Ciri-ciri dan Jenis Uang	66
	C. Konsep Uang dalam Islam	68
	D. Peran Lembaga Keuangan	76
BAB VI	BANK SYARIAH	79
	A. Pengertian Bank Syariah	79
	B. Tujuan Bank Syariah	82
	C. Bebas Bungan sebagai Prinsip Dasar Bank Syariah	84
	D. Sejarah Pendirian Bank Syariah di Indonesia ..	86
	E. Bank Muamalat Indonesia: Momentum Perkembangan Praktek Perbankan Syariah	98

F.	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	105
G.	Kegiatan Usaha Bank Syariah	108
H.	Produk-produk Bank Syariah	112
I.	Sistem dan Perhitungan Bangi Hasil	118
BAB VII	ASURANSI SYARIAH	123
A.	Defenisi Asuransi	123
B.	Konsep Dasar Asuransi Syariah	125
C.	Pertumbuhan dan Perkembangan	126
D.	Prinsip Asuransi Syari'ah	134
E.	Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional	136
F.	Jenis-jenis Asuransi	139
G.	Kendala Pengembangan Asuransi Syariah	141
BAB VIII	PEGADAIAN SYARIAH	145
BAB IX	BAITUL WAL MAT TAMWIL (BMT)	165
A.	Kegiatan dan Permodalan BMT	166
B.	Kesehatan BMT	172
C.	Kendala Pengembangan BMT	173
D.	Strategi Pengembangan BMT	175
BAB X	PASAR MODAL SYARIAH	177
A.	Perkembangan Pasar Modal di Indonesia	179
B.	Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia	183
C.	Risiko Berinvestasi di Pasar Modal	185
D.	Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah	187
BAB XI	LEMBAGA WAKAF	189
A.	Definisi Wakaf	189
B.	Sejarah dan Perkembangan Wakaf	191
C.	Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dan Perkembangannya di Indonesia	198
DAFTAR PUSTAKA		203
BIODATA PENULIS		212

BAB I

PENGERTIAN, HAKEKAT, PRINSIP- PRINSIP DAN METODOLOGI EKONOMI ISLAM

A. Definisi Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-'iqtsad* (الإِقْتِسَادُ), yang secara bahasa berarti: kesederhanaan, dan kehematan.¹ Dari makna ini, kata *al-'iqtsad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna '*ilm al-'iqtsad* (الْعِلْمُ بِالإِقْتِسَادِ), ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi.

Sedangkan secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi Islam:

1. M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *maqasid al-syari'ah* atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.”²

¹ Elias Anton dan Edward E. Elias, *Qamus Elias al-Ajri*, (Beirut: Dar al-Jil), 1982, h. 544

² M.Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amin dkk, “Landscape Baru Perekonomian Masa Depan”, (Jakarta: SEBI, 2001 h. 131. Selanjutnya disebut “The Future”

Ekonomi dalam pandangannya harus mengaitkan antara persoalan ekonomi dengan persoalan sosial kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana yang dikemukakan para ekonom kapitalis.

2. S.M. Hasanuzzaman: ilmu Ekonomi Islam adalah “pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian, serta pengeluaran sumber-sumber daya guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat”.³

Ia lebih melihat bahwa persoalan ekonomi sebagai implementasi dari norma-norma ajaran agama Islam yang berkaitan dengan ekonomi untuk kepuasan pribadi dan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba Allah. Kesejahteraan ekonomi merupakan sarana untuk berbakti kepada Allah swt, bukan untuk tujuan yang tidak diridhai-Nya.

3. M. Najetullah Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah “respons para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Alquran dan sunnah maupun akal dan pengalaman”.⁴

Tampaknya definisi yang dikemukakan Siddiqi, menilai ekonomi syariah sebagai sebuah reaksi dari tantangan kehidupan.

4. M.A. Mannan, ilmu Ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan

³ S.M. Hasanuzzaman, “Definition of Islamic Economic” dalam *Journal of Research in Islamic Economic*, Winter 1984, h. 52

⁴ Siddiqi, “History of Islamic Economic Thought” dalam Ahmad dan Awan 1992, h. 69; M. Umer Chapra, “The Future”, *op. cit.*, h. 146

ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam.⁵

5. Kurshid Ahmad, seorang intelektual asal Pakistan mendefinisikan ilmu Ekonomi Islam sebagai “upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam”.⁶
6. Syed Nawab Haider Naqvi, menilai ilmu ekonomi Islam merupakan “representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim”.⁷
7. Pandangan yang berbeda juga dikemukakan Louis Cantori. Ilmu Ekonomi Islam menurutnya tidak lain merupakan “upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak eksistensi individualisme dalam ilmu ekonomi klasik”.⁸

Tampaknya para pemikir ekonomi syariah melihat bahwa persoalan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan faktor produksi, konsumsi, dan distribusi berupa pengelolaan sumber daya yang ada untuk kepentingan yang bernilai ekonomis. Akan tetapi, lebih dari itu mereka melihat persoalan ekonomi sangat terkait dengan persoalan moral, ketidakadilan, ketauhidan dan sebagainya.

⁵ M.A. Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), Edisi Revisi, h. 18

⁶ Khurshid Ahmad, “Nature and Significance of Islamic Economic” dalam Ahmad dan Awan, 1992, h. 19; M. Umer Chapra, “The Future”, *op. cit.*, h. 146

⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economic, and Society's* (London: Kegan Paul, 1994), h. 13

⁸ Ibrahim M. Abu Rabi, *Islamic Resurgence: Challenges, Directions and Future Perspectives (A Round Table with Khurshid Ahmad)*, (Florida: World and Islamic Studies Enterprise), 1994, h. 82

B. Hakekat Ekonomi Syariah

Dalam berbagai pengertian ekonomi, baik yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi Barat maupun oleh para pakar ekonomi syariah sendiri menempatkan individu (manusia) sebagai obyek kajian ekonomi. Namun demikian, konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi Barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius.⁹ Oleh sebab itu, dalam pemenuhan kebutuhannya, atau aktifitas ekonomi lainnya, ekonomi syariah menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya.

Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi.

C. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Para pemikir ekonomi syariah berbeda pendapat dalam memberikan kategorisasi terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah. Khurshid Ahmad mengkategorisasi prinsip-prinsip ekonomi syariah pada: Prinsip *tauhid*, *rububiyyah*, *khilafah*, dan *tazkiyah*.¹⁰ Mahmud Muhammad Babali menetapkan lima prinsip yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam Islam, yaitu: *al-ukhuwwah* (persaudaraan), *al-Ihsan* (berbuat baik), *al-nasihah* (memberi nasihat), *al-istiqamah* (teguh pendirian), dan *al-taqwa*

⁹ M. A. Mannan, *op. cit.*, h. 20

¹⁰ Khurshid Ahmad, "Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam", dalam Ainur R. Sophian (Editor), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 13

(bersikap takwa).¹¹ Sedangkan menurut M. Raihan Sharif dalam *Islamic Social Framework*, struktur sistem ekonomi syariah didasarkan pada empat kaidah struktural, yaitu: (1) *trusteeship of man* (perwalian manusia); (2) *co-operation* (kerja sama); (3) *limited private property* (pemilikan pribadi yang terbatas); dan (4) *state enterprise* (perusahaan negara).¹² Prinsip ekonomi syariah juga dikemukakan Masudul Alam Choudhury, dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory*. Ekonomi syariah menurutnya didasarkan pada tiga prinsip, yaitu: (1) *the principle of tawheed and brotherhood* (prinsip tauhid dan persaudaraan), (2) *the principle of work and productivity* (prinsip kerja dan produktifitas), dan (3) *the principle of distributional equity* (prinsip pemerataan dalam distribusi).¹³

Namun dari berbagai kategorisasi di atas, pada dasarnya bahwa prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah, sebagai berikut:

a. Prinsip Tauhid.

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama para rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka penyampaian (*tablig*) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan tuhan serta berserah diri kepada-Nya,¹⁴ sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia untuk bersikap mengesakan Allah swt. Nabi Muhammad saw. dalam rangka mendakwakan Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan.

¹¹ Mahmud Muhammad Babli, *al-Iqtisad fi Zau'i al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Riyadh: Matba'ah al-Madinah, 1976), cet. II, h. 140

¹² M.Raihan Sharif, *Islamic Social Framework*, (Lahore: Sh. Muhammad Asraf, 1976), h. 125

¹³ Masudul Alam Choudhury, *op. cit.*, h. 8-12

¹⁴ Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, (Lahore: Islamic Publications Ltd., 1977), edisi ke-6, h. 120

Prinsip tauhid dalam ekonomi syariah sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaannya, (hubungan horisontal), sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah (hubungan vertikal).¹⁵ Dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepada Alquran.

Prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek pemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Setiap kepemilikan dari hasil pendapatan yang tidak selaras dengan prinsip tauhid merupakan hubungan yang tidak islami. Oleh sebab itu, kepemilikan mutlak tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah, karena konsep kepemilikan mutlak bertentangan dengan prinsip tauhid.¹⁶ Kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah swt., sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif. Berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, AM. Saefuddin menjelaskan cara manusia mendapatkan hak kepemilikan tersebut:

- 1) Kepemilikan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ekonomi, bukan menguasai sumber daya tersebut. Seorang muslim yang tidak memanfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya itu. Kepemilikan dalam konteks ini, berlaku terhadap pemilikan lahan atas tanah.¹⁷
- 2) Kepemilikan terbatas sepanjang orang itu hidup di dunia,

¹⁵ Masudul Alam Choudhury, *op. cit.*, h. 8

¹⁶ Abul Hasan Bani Sadr, "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid", dalam Ainur R. Sophian (Editor), *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Jakarta: Risalah Gusti, 1997), h. 13

¹⁷ AM. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 65

dan apabila orang itu meninggal maka hak kepemilikannya harus didistribusikan kepada ahli warisnya. Hal ini didasarkan pada Surat al-Baqarah (2): 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنِ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

- 3) Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber-sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara, tidak boleh dimiliki secara perseorangan atau kelompok tertentu.

b. Prinsip Keseimbangan.

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksudkan bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

Pencapaian kesejahteraan dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut. Islam menolak secara tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran

keberhasilan ekonomi,¹⁸ sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Melupakan salahsatu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati.

Keseimbangan dalam ekonomi syariah juga mengandung makna keseimbangan dalam mendistribusikan kekayaan yang dimiliki negara dari hasil pendapatan negara, seperti: zakat, sedekah, *ghanimah* (harta rampasan perang), *fai* (harta rampasan perang tidak melalui peperangan), *kharaj* (pajak atas daerah yang ditaklukkan dalam perang), *'ushr* (zakat tanaman), dan sebagainya. Keseimbangan dalam pendistribusian tersebut tidak secara terperinci dalam Alquran dan dipraktekkan pada masa awal Islam. Alquran hanya menjelaskan secara umum prinsip-prinsip dalam pendistribusian, dan selanjutnya dijelaskan oleh hadis dan ijtihad para ulama. Umpamanya kasus harta *ghanimah*, pada masa awal Islam, tentara yang terlibat dalam peperangan mendapat 4/5 sedangkan negara mendapat 1/5. Akan tetapi, sekarang di mana tentara mendapat gaji dari pemerintah maka harta *ghanimah* harus didistribusikan secara seimbang dengan memperhatikan kondisi sosial sekarang. Penafsiran kembali terhadap sistem pembagian di atas harus dilakukan dalam pendistribusian tersebut.

c. Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah (wakil) tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhalifahan, Allah swt. Posisi manusia sebagai khalifah dapat dilihat dalam berbagai ayat Alquran, seperti dalam surat al-Baqarah (2): 30, surat al-An'am (6): 165, surat Fatir (35): 39, surat Sad (38): 28, dan surat al-Hadid (57): 7.

¹⁸ M.Umer Chapra, “Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi”, dalam Ainur R. Sophian, *Etika Ekonomi Politik: Elemen-Elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1997), h. 28.

Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi spritual. Di samping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif.

Prinsip khilafah, menurut M. Umer Chapra berimplikasi pada terjadinya¹⁹:

1) Persaudaraan universal.

Prinsip khilafah dapat mewujudkan sikap persatuan dan persaudaraan yang mendasar dari umat manusia. Sebab setiap manusia merupakan khalifah dan kehormatan itu tidak dipegang atau dimonopoli oleh golongan atau orang tertentu. Juga tidak ditentukan oleh faktor kekayaan atau keturunan, semuanya memiliki hak yang sama.

Dengan terjalannya rasa persaudaraan itu, maka arah pengembangan ekonomi yang dilakukan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan pribadi, tapi lebih dari itu, secara bersama-sama dan saling mendukung dalam pengembangan ekonomi yang memperkaya kehidupan manusia secara umum.

2) Sumber-sumber daya adalah amanat.

Karena keberadaan manusia sebagai khalifah, maka sumber-sumber daya yang diberikan Allah swt. kepada manusia dalam rangka tugasnya sebagai khalifah, merupakan amanat. Sumber-sumber daya itu bukan milik mutlak manusia yang harus digunakan secara “sewenang-wenang”

3) Gaya hidup sederhana

Implikasi dari posisinya sebagai wakil, maka manusia harus bersikap dan bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah swt. Konsekwensinya adalah manusia harus selalu bersikap sederhana, gaya hidupnya tidak mencerminkan kesombongan,

¹⁹ .Umer Chapra, *Islam and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, “Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer”, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. 224-227. Selanjutnya disebut “Islam and Economic”.

keangkuhan, dan kemegahan. Manusia tidak menggunakan sumber-sumber daya alam secara berlebih-lebihan dan tidak digunakan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah

d. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian syariah. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Alquran atau sunnah Rasul tapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam, dimana alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, perlakuan terhadap para pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

Penegakan keadilan dan pembasmian bentuk diskriminasi telah ditekankan oleh Alquran, bahkan salah satu tujuan utama risalah kenabian adalah untuk penegakan keadilan.²⁰ Bahkan menurut Umer Capra, dilihat dari aspek aqidah Islam, Alquran menempatkan keadilan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan.²¹ Hal itu didasarkan pada surat Al-Ma'idah (5): 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...

²⁰ Lihat Alquran surat al-Had³d (57):25

²¹ M. Umer Chapra, "The Future", *op. cit.*, h. 69

Keadilan dalam pembangunan ekonomi masyarakat penting untuk diwujudkan. Ibnu Taimiyah sampai mengatakan bahwa “tuhan akan mendukung pemerintahan yang adil walaupun kafir, dan tuhan tidak mendukung pemerintahan yang zalim walaupun Islam”.²² Pemerintahan yang tidak menegakkan keadilan dalam prinsip pembangunan dan tatanan sosial kemasyarakatannya, mustahil dapat berkembang. Sebaliknya menurut Ibnu Khaldun, apabila dalam masyarakat prinsip keadilan tidak diterapkan, yang berlaku adalah penindasan dan eksploitasi antara sesama manusia, maka pembangunan dalam suatu masyarakat akan terhambat.²³ Kalau ini terjadi maka akan berakibat pada kemunduran dan kehancuran negara. Jadi keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam pembangunan bangsa.

D. Metodologi Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya, di satu pihak dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsipnya, dilain pihak. Proses yang diikuti dengan seperangkat aksioma dan prinsip dimaksudkan untuk lebih mendekatkan tujuan sistem tersebut merupakan landasan dari sistem tersebut yang bisa diuji. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka dimana suatu komunitas sosioekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber alam dan manusiawi untuk kepentingan produksi dan mendistribusikan hasil-hasil produksi ini untuk kepentingan konsumsi.²⁴

Ekonomi Islam itu terdiri dari 3 kerangka metodologi. *Pertama, presumptions and ideas* atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar dari ekonomi Islam. Ide ini bersumber dari al-Qur'an,

²² *Ibid.* h. 70

²³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (t.tp: Dar al-Fikr, t.th), h. 287

²⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 32.

Sunnah, dan Fiqh al-Maqhasid. Ide ini harus dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir dari ekonomi Islam itu sendiri. *Kedua*, adalah *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep utilitis dalam Islam. Terakhir, yang disebut dengan *positive part of economics science*. Bagian ini menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi nyata dan riil. Melalui tiga pendekatan metodologi tersebut, maka ekonomi Islam dibangun.

Ahli ekonomi Islam lainnya, Masudul Alam Choudhury, menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi Islam itu perlu menggunakan *shuratic process*, atau pendekatan *syura*. Syura itu bukan demokrasi. Shuratic process adalah metodologi individual digantikan oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan. Individualisme yang merupakan ide pasar ekonomi konvensional tidak dapat lagi bertahan, karena tidak mengindahkan adanya distribusi yang tepat, sehingga terciptalah sebuah jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Menurut Choudhury sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan adalah al-Qur'an, sebab ia merupakan Kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak, telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah.²⁵

Menurut Agustianto Mingka dalam perspektif Islam, eksistensi suatu metodologi merupakan sebuah keniscayaan, sebab prinsip dasar ajaran Islam adalah kebenaran. Manusia diperintahkan untuk mengikuti kebenaran dan dilarang mengikuti persangkaan. Untuk memperoleh kebenaran itu manusia harus memiliki pengetahuan. Ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang bersumber dari syari'ah memiliki metodologi tertentu

²⁵ Masudul Alam Choudhury, op. cit., h. 8-12.

sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian epistemologi ilmu ekonomi konvensional jelas berbeda dengan ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi konvensional disusun berdasarkan metodologi dengan pendekatan rasionalisme dan empirisme, dengan demikian sumbernya adalah rasio dan pengalaman belaka. Sedangkan ilmu ekonomi Islam bersumber dari syariat (al-Qur'an dan Sunnah). Oleh karena itu dalam beberapa hal metodologi ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, namun dalam beberapa hal keduanya dapat menggunakan metodologi yang sama, khususnya pada tataran penggunaan ijtihad.

Dalam sejarah, bahkan para ilmuwan muslim klasik telah banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap metodologi ilmiah modern. Ibnu Taymiyah (w. 11110) dikenal dengan ilmuwan yang banyak menggunakan metode induktif. Demikian pula Ibnu Khaldun (1332-1406) sering menggunakan metode induktif dalam menganalisis ekonomi sosial.

Secara garis besar metodologi ekonomi Islam tersusun secara sistematis sebagai berikut: *pertama*, al-Qur'an adalah sumber kebenaran yang paling utama, sehingga ia merupakan sumber primer ilmu ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah tidak saja memuat dalil-dalil normatif tetapi juga fakta empiris yang bersifat empiris, faktual dan objektif. Al-Qur'an tersebut selanjutnya dijelaskan oleh Sunnah Nabi Saw yang juga dipandang sebagai wahyu ghairu matlu sesuai dengan Firman Allah, "Muhammad itu tidak bertutur menurut hawa nafsunya."²⁶ Dengan demikian al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam. Segala metodologi harus bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Dari perspektif ini, epistemologi ekonomi konvensional dan ekonomi Islam memiliki perbedaan dan sangat mendasar. *Kedua*, setelah al-Qur'an dan Sunnah ekonomi Islam digali dan dikembangkan dengan menggunakan ijtihad, yaitu

²⁶ Q.S. an-Najm ayat 4

penggunaan rasio untuk menemukan kebenaran. Para tataran ijtihad inilah epistemologi ekonomi konvensional memiliki kesamaan dengan ekonomi Islam. Dalam ilmu ushul, metodologi ijtihad antara lain menggunakan qiyas, mashlahah, sadduz zari'ah, istihsan, 'urf, dsb. Dengan ijtihad para ulama menggunakan metode induktif.

Ekonomi Islam dapat menerima metode ilmiah ekonomi konvensional sepanjang metodologi itu tidak bertentangan ajaran Islam. Metode ilmiah melalui istiqlah akan menghasilkan suatu kebenaran yang didasarkan atas realitas objektif dan empiris. Kebenaran ilmiah versi Barat hanya mengakomodir kebenaran yang bisa ditangkap pancaindra, sementara rasio dan pancaindra banyak memiliki keterbatasan. Ilmu ekonomi Islam kontemporer disusun dengan mengikuti aturan main (*rule of game*) syari'ah dan juga kaedah-kaedah ilmiah keilmuan modern.

BAB II

SUMBER-SUMBER HUKUM

EKONOMI ISLAM

Sumber-sumber hukum ekonomi syariah dalam pandangan para pakar ekonomi syariah, misalnya A. Mannan, menempatkan sumber-sumber *tasyi'* sebagai sumber-sumber hukum ekonomi syariah. Menurutnya, sumber-sumber hukum ekonomi syariah adalah Alquran, sunnah Rasul, ijmak, kias, dan prinsip-prinsip hukum lainnya²⁷, seperti: *istihsan*²⁸, *isithsab*²⁹, dan

²⁷ *Ibid.*, h. 28

²⁸ *Istihsan*, sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab:

هُوَ عُدُولُ الْمُجْتَهِدِ عَنْ مُقْتَضَى قِيَاسٍ جَلِيٍّ إِلَى مُقْتَضَى قِيَاسٍ خَفِيِّ، أَوْ عَنْ حُكْمٍ كَلِّيٍّ إِلَى حُكْمٍ اسْتِثْنَائِيٍّ لِلدَّلِيلِ الْقَدَحِ فِي عَقْلِهِ رَجَحَ لَدَيْهِ هَذَا الْعُدُولُ

“*Istihsan* ialah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan kias yang jelas kepada ketentuan kias samar (tersembunyi), atau dari ketentuan yang umum (*kulliy*) kepada ketentuan yang sifatnya khusus, karena menurut pandangan mujtahid itu ada dalil yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut”. Lihat, Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilm Uḡ-I al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah, 1990), h. 69. Definisi lain, lihat; Abu Bakar Muhammad Ibnu Abi Sahal al-Sarkhisi, *Usul al-Sarkhisi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), juz II, cet. ke-1, h. 200

²⁹ *Istithsab* menurut ulama usul fikih, seperti definisinya Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah:

اسْتِدْلَامَةُ أَثْبَاتٍ مَا كَانَ ثَابِتًا وَنَفْيٍ مَا كَانَ مَنفِيًّا

“Mengukuhkan tetap berlakunya apa yang pernah ditetapkan dan meniadakan apa yang sebelumnya tidak ada”. Lihat Syams al-Din Muhammad bin Abi Bakr Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muwaqqi’an ‘an Rab al-‘alam’an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), jilid I, cet ke- 2, h. 339

*istislah*³⁰. Namun yang akan diulas dalam uraian di bawah ini adalah sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama.³¹ Uraian tentang Alquran dan sunnah akan mendapat porsi yang lebih luas dibandingkan dengan ijmak dan kiyas, sebab Alquran dan sunnah merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang sangat penting.

1. Alquran

Alquran merupakan sumber hukum ekonomi syariah yang pertama, sumber hukum yang abadi yang merupakan firman Allah yang disampaikan kepada manusia melalui mulut Nabi Muhammad saw. Sebagai salah satu sumber, sekaligus sumber utama ekonomi syariah, Alquran adalah:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ.

(Kalam Allah swt. yang diturunkan kepada Muhammad saw. dan membacanya merupakan ibadah).³²

Pengertian lain, di antaranya dikemukakan Mahmud Syaltut, menurutnya Alquran adalah,

³⁰ Istilah ini juga kadang-kadang disebut pula dengan *Maslahah*. Istilah kedua ini yang sering digunakan para pakar ekonomi Islam dalam merumuskan konsep ekonominya, seperti yang dilakukan Umer Chapra. *Maslahah*, sebagaimana definisi Imam al-Ghazali adalah;

الْمَصْلَحَةُ هِيَ عِبَارَةٌ فِي الْأَصْلِ عَنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مُضَرَّةٍ

“Maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”. Lihat; Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid I, h. 251

³¹ Jumhur ulama sepakat bahwa Alquran, sunnah Rasul, ijmak, kias sebagai sumber hukum Islam. Namun mereka berbeda pendapat dalam *istihsan*, *istihsab*, dan *istislah*, apakah ia merupakan sumber hukum atau tidak.

³² Manna al-Qattan, *Mabahas fi Ulum al-Qur’an*, (t.t: Mansurat al-Asri al-Hadis, t.th.), cet ke-3, h. 21

الْفَظُّ الْعَرَبِيُّ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا بِالتَّوَاتُرِ.

"Lafad Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. yang disampaikan kepada kita secara mutawatir".³³

Kalau dalam pengertian pertama ada tiga aspek penting yang menjadi titik tolak dalam pengertian tersebut: *pertama*, Alquran merupakan kalam Allah swt. bukan kalam selain-Nya; *kedua*, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.; dan *ketiga*, membaca Alquran merupakan suatu ibadah. Sedangkan pada pengertian kedua ada tiga hal pokok yang berkaitan dengan definisi Alquran: *pertama*, Alquran merupakan lafad Arab; *kedua*, sama dengan pengertian pertama, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.; dan *ketiga*, disampaikan umat manusia secara *mutawatir*. Namun dari dua pengertian di atas, pengertian pertama yang umum dipergunakan para ulama.

Alquran menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan manusia dengan tuhan-Nya atau hubungan manusia dengan sesama manusia atau dengan makhluk Tuhan yang lain. Oleh sebab itu, menurut Mahmud Syaltut Alquran mengandung: *Pertama*, aqidah yang wajib dipercayai yaitu percaya kepada Allah swt., para malaikat, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan percaya kepada Hari Akhirat. *Kedua*, akhlak yang baik yang dapat mendidik jiwa, memperbaiki kondisi perseorangan dan masyarakat, meniadakan akhlak yang buruk yang dapat merusak arti kemanusiaan yang mulia dan menimbulkan bencana dalam kehidupan manusia. *Ketiga*, memberi petunjuk kepada penelitian terhadap alam semesta serta segala yang diciptakan Allah di alam ini, untuk dapat mengetahui hikmah-hikmah dan keindahan ciptaan-Nya, sehingga hati dipenuhi oleh rasa keimanan terhadap kebesaran-Nya yang didasarkan dari hasil penelitian bukan hanya sekedar taklid. *Keempat*, kisah-kisah terdahulu, baik secara

³³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1966), cct. ke-3, h. 477

perseorangan maupun bagi suatu kaum. *Kelima*, peringatan dan ancaman atau janji baik dan buruk. *Keenam*, hukum-hukum amali yang secara tegas atau hanya ditetapkan pokok-pokoknya oleh Alquran, yang harus diikuti dalam mengatur hubungan manusia dengan Allah swt., atau hubungan antara manusia dengan manusia.³⁴ Dalam hukum-hukum amali ini, ekonomi menempatkan dirinya di dalam Alquran.

Apabila ditelusuri kata *iqtisad* (ekonomi) dalam Alquran maka kata tersebut hanya tiga kali di sebutkan di dalam Alquran, yaitu dalam bentuk *isim fa'il: muqtasid* (مُقْتَصِدٌ) dan *muqta'idah* (مُقْتَصِدَةٌ). Kata *muqta'idah* terdapat dalam surat al-Ma'idah (5): 66, Allah swt. berfirman:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ
وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Alquran) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada golongan yang pertengahan. Dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. (surat al-Ma'idah [5]: 66).

Sedangkan kata *muqtasid* terdapat dalam surat Luqman (31): 32 dan surat Fatir (35): 32. Dalam surat Fatir (35): 32, Allah swt. berfirman:

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ يُؤْذِنُ اللَّهُ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

³⁴ *Ibid.*, h. 488-490

Artinya: Kemudian Kitab itu Kami wariskan kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri dan di antara mereka ada yang pertengahan dan di antara mereka ada (pula) yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. (Surat Fatir [35]: 32).

Kata *muqtasid* dalam ayat tersebut mengandung makna sifat yang terdapat di antara sifat terpuji dan sifat tercela.³⁵ Sedangkan menurut Ibnu Katsir *muqtasid* adalah golongan yang berada di antara *al-alim linafsihi* dan *al-sabiq al-khairat*. Dan golongan ini, lanjut Ibnu Katsir, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, nantinya akan masuk surga dengan rahmat Allah swt.³⁶

Makna *iqtisad* dalam ayat Alquran tersebut di atas lebih membicarakan persoalan sifat manusia dari pada persoalan ekonomi dalam makna kesederhanaan atau kehematan. Namun keduanya mempunyai keterkaitan yang erat, sebab ekonomi terkait dengan moral atau sifat manusia.

Berbagai ayat Alquran membicarakan persoalan ekonomi walaupun tidak dalam konteks term *iqtisad*, misalnya Surat al-Baqarah (2): 50;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقَها فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

³⁵ Al-Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat al-Alfad al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 419

³⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu al-Kasir*, CD

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Surat al-Baqarah [2]: 275).

Ayat ini berkaitan dengan kehalalan jual-beli dan keharaman riba³⁷. Dalam ayat ini pula konsep riba yang menjadi salah satu parameter perekonomian syariah dibahas.

Ayat-ayat lain misalnya berkaitan dengan hak kepemilikan harta, seperti surat al-Sy-ra (26): 4, menjelaskan bahwa hakekat kepemilikan atas harta kekayaan di atas bumi ini adalah kepunyaan Allah swt. Sesungguhnya apa yang terdapat di langit dan di bumi dalam kekuasaanNya, Dia yang mengadakan dan meniadakan.³⁸ Demikian juga surat al-Hadid (57): 7; al-Jumu'ah (62): 10; al-Mulk (67): 15 juga menjelaskan kepemilikan dalam Alquran. Ayat yang berkaitan dengan cara mendapatkan harta dijelaskan dalam dalam surat al-Mulk (67): 15.

2. Sunnah Nabi Muhammad saw.

Sumber hukum ekonomi yang kedua adalah Sunnah Nabi saw. Sunnah dalam pengertian bahasa adalah jalan, baik itu terpuji

³⁷ Penjelasan mendetail tentang keharaman riba, lihat bab berikutnya.

³⁸ Ahmad Mustafa al-Maragi, *Tafsir al-Maragi*, (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-'Arabi, 1985), vol. IX, h. 15

atau tercela.³⁹ Sedangkan dalam pengertian istilahnya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli ushul, ulama fikih, dan ulama hadis. Menurut ulama ushul, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah saw. selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takrir Nabi yang dapat dijadikan dalil untuk penetapan hukum *syara'*. Menurut ulama fikih, sunnah adalah segala yang menjadi ketetapan dari Nabi saw. yang belum mencapai *fard* atau wajib. Sedangkan menurut ulama hadis, sunnah adalah segala yang dinukilkan dari Rasulullah saw., baik dari segi perkataan, perbuatan, atau takrir, sifat, keadaan, maupun perjalanan hidup Nabi; baik yang demikian itu terjadi sebelum diutus menjadi rasul, seperti menyendiri di Gua Hira, maupun setelah diutus menjadi rasul.⁴⁰

Perbedaan dalam mendefinisikan itu didasarkan pada perbedaan mereka dalam meninjau Nabi. Para ulama ushul melihat Nabi sebagai pembuat undang-undang yang menjelaskan peraturan-peraturan kehidupan kepada manusia, meletakkan dasar-dasar bagi para imam mujtahid setelah kenabiannya. Oleh karena itu, para ulama ini membatasi sunnah dalam pengertian perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi yang berkaitan dengan penetapan hukum saja.⁴¹ Ulama fikih melihat Nabi dari segi bahwa Nabi saw. dalam seluruh aspek kehidupannya (baik perkataan, perbuatan, dan takrirnya) mempunyai nilai hukum *syar'i*. Oleh sebab itu, mereka membahas dari segi hukum *syara'* dalam perbuatan seorang hamba masuk dalam kategori wajib, haram, ibahah atau hukum lainnya. Sedangkan ulama hadis menilai Nabi sebagai pribadi tauladan bagi umatnya, ia merupakan *uswah al-hasanah*. Oleh sebab itu, mereka meriwayatkan segala yang berkaitan dengan pribadi Nabi, baik

³⁹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis: Ul-muhu wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 17

⁴⁰ *Ibid*, h. 19

⁴¹ *Ibid.*, h. 18

perjalanan hidup, perilaku, seluruh keadaan, berita dan perkataan, perbuatan, baik yang berkaitan dengan hukum *syari'* atau tidak.⁴²

Sunnah dijadikan landasan sumber hukum ekonomi kedua didasarkan pada kesepakatan para ulama, kecuali kelompok yang tidak mengakui sunnah (ingkar sunnah), bahwa sunnah yang berupa sabda, perbuatan, dan pengakuan Rasul merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran.⁴³ Pengingkaran terhadap sunnah sebagai sumber hukum telah muncul pada akhir abad II H., khususnya bagi mereka yang mengingkari kehujjahan hadis yang tidak mutawatir. Bahkan pada masa ini sudah terjadi berdebatan seputar kehujjahan sunnah. Imam Syafi'i adalah salah seorang yang gigih membela sunnah dari para pengingkarnya.⁴⁴

Golongan Syi'ah dan Khawarij adalah dua golongan yang tidak menerima keseluruhan hadis sebagai sumber hukum. Khawarij menolak hadis-hadis terutama hadis yang berkaitan dengan *tahkim*. Mereka memandang bahwa sebagian sahabat setelah terjadi peristiwa *tahkim* tidak jujur dan harus ditolak periwayatannya. Sedangkan golongan Syi'ah menerima hadis yang hanya diriwayatkan oleh *ahl al-bait* (keluarga Nabi saw.) atau para pengikut Ali bin Abi Thalib saja.⁴⁵

Pada masa modern sekarang muncul lagi penolakan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Di antara mereka ada yang menolak keseluruhan hadis, baik yang mutawatir maupun tidak mutawatir, seperti yang dilakukan oleh Ghulam Ahmad Parwez. Para pengingkar sunnah tersebut mendasarkan pemikiran mereka kepada ayat-ayat Alquran, seperti al-Baqarah (2): 1-2; Fatir (35): 31; Yunus (10): 36; al-An'am (6): 83, 114 dan 148; al-Nahl (16):

⁴² *Ibid.*, h. 18

⁴³ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islamiy* (Mesir: Dar al-Qaumiyyah, t.th), h. 343

⁴⁴ *Ibid.*, h. 128

⁴⁵ *Ibid.* h. 124

89; dan lainnya. Bahkan penolakan itu sendiri berdasarkan hadis Nabi saw.⁴⁶

Dalam kaitan sunnah sebagai salah satu sumber hukum, Mahmud Syaltut menegaskan bahwa sunnah yang menjadi sumber hukum adalah sunnah: *Pertama*, apa yang berasal dari Nabi dalam rangka penyampaian (*tablig*) dalam kedudukan beliau sebagai Rasul, seperti menjelaskan *kemujmalan* dalam Alquran, atau mengkhususkan yang umum, menjelaskan ibadat, atau perihal halal dan haram. Hal-hal seperti itu adalah syariat umum sampai Hari Kiamat. Bila ada sesuatu yang dilarang, maka manusia harus menghindarinya. *Kedua*, sesuatu yang berasal dari Rasul dalam kedudukannya sebagai imam dan kepala pemerintahan bagi umat Islam seperti: pengiriman tentara untuk berperang, mengeluarkan uang dari *bait al-mal* untuk berbagai keperluan, pengangkatan hakim dan wali-wali. Hal-hal seperti itu bukanlah syariat umum, tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin dari kepala pemerintahan (imam), dan tidak boleh seseorang melakukan sekehendak hatinya dengan alasan Nabi saw. melakukannya atau menuntut supaya dilakukan. *Ketiga*, segala sesuatu yang berasal dari Nabi dalam kedudukan beliau sebagai hakim, maka beliau, seperti halnya tugas Rasul, adalah menyampaikan hukum-hukum dari Allah, dan beliau adalah kepala pemerintahan masyarakat Islam yang mengatur urusan mereka dan menggariskan politik kaum Muslimin. Begitu pula, tugas Nabi sebagai hakim yang memutuskan perkara dengan memperhatikan bukti-bukti, sumpah atau keengganan bersumpah. Hukum-hukum tersebut bukanlah syariat umum yang dapat dipraktekkan oleh seseorang didasarkan bahwa hal itu datang dari Rasul, tetapi setiap orang terikat pada ketentuan-ketentuan hukum pemerintah oleh karena Rasul dalam

⁴⁶ Penjelasan mendetail mengenai dasar penolakan dan bantahan ahl sunnah terhadap argumen-argumen para pengingkar sunnah; lihat, *ibid.*, h. 128-149

permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, bertindak sebagai hakim.⁴⁷

Adapun ucapan, perbuatan dan penetapan Rasul sebagai *basyar* (manusia) bukan merupakan syariat. Termasuk dalam kategori ini, yaitu: *Pertama*, mengenai apa yang dibutuhkan oleh manusia, seperti: makan, tidur, berjalan, tawar menawar dalam jual-beli dan sebagainya. *Kedua*, berkaitan dengan pengalaman dan adat kebiasaan perseorangan atau masyarakat, seperti yang terjadi dalam persoalan pertanian. *Ketiga*, berkaitan dengan urusan manusia yang ada hubungannya dengan kondisi-kondisi tertentu, seperti pembagian penempatan tentara dalam front pertempuran, pemusatan tentara pada suatu front tertentu, bersembunyi, menyerang dan lainnya.⁴⁸

3. Ijmak

Ijmak adalah sumber hukum ekonomi yang ketiga, setelah Alquran dan sunnah. Menurut ulama, seperti definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahrah, ijmak yaitu:

اتِّفَاقُ الْمُجْتَهِدِينَ مِنَ الْأُمَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي عَصْرِ مِنَ الْعُصُورِ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الْعَمَلِيَّةِ

“Kesepakatan para ulama mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah (wafatnya) Nabi *saw.* atas hukum syara’ mengenai suatu perkara amaliah”.⁴⁹

Definisi lain dikemukakan oleh al-Ghazali:

عِبَارَةٌ عَنْ اتِّفَاقِ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً عَلَى أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ

“Kesepakatan umat Muhammad *saw.* secara khusus atas suatu urusan agama”⁵⁰

⁴⁷ Mahmud Syaltut, *op. cit.*, h. 507-508

⁴⁸ *Ibid.*, h. 507

⁴⁹ Muhammad Abu Zahrah, *‘Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy, 1958), h. 156

Ulama berbeda pendapat dalam hal realisasi dari ijmak dalam masyarakat Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ijmak seperti dalam definisi ijmak di atas, tidak mungkin diwujudkan sekarang. Di antaranya, pendapat Mahmud Syaltut bahwa hanya pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab merupakan masa yang memungkinkan menggambarkan terjadinya ijmak. Oleh karena itu, ijmak yang dilakukan setelah kedua masa itu yang menggambarkan sebagai kesepakatan seluruh mujtahid dan dipandang sebagai sumber hukum yang mengikat hanya merupakan teoritis belaka dan tidak akan dapat terwujud dalam kenyataan. Sebab menurut Syaltut, untuk mewujudkannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain dikatakan:

- a. Pelaku ijtihad harus menguasai alat-alat kelengkapan pembahasan dan penelitian, baik penguasaan terhadap bahasa Arab, maupun pengetahuan tentang roh (jiwa) syariat serta kaidah-kaidah yang umum.
- b. Harus diketahui jumlah mujtahid dan tempat tinggal mereka.
- c. Diketahui pendapat masing-masing tentang masalah yang menjadi topik pembahasan dan penelitian.
- d. Tercapai kesepakatan mereka atas satu pendapat.⁵¹

Namun demikian, jumhur ulama berpendapat bahwa ijmak pada masa sekarang mungkin saja diterapkan dalam masyarakat Islam. Hal itu bisa dilakukan bila pelaksanaan ijmak itu ditangani oleh suatu negara dengan bekerja sama dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap negara menetapkan standar tertentu mengenai seseorang dapat dinyatakan mencapai derajat mujtahid. Dengan kemajuan teknologi informasi memungkinkan para ulama mujtahid di berbagai negara Islam tersebut berkumpul untuk membicarakan suatu masalah hukum atau setidaknya menghimpun pendapat

⁵⁰ Al-Ghazali, *op.cit.*, jilid II, h. 211

⁵¹ Mamud Syaltut., *op. cit.*, h. 554. Mengenai alasan lain yang menolak keberadaan ijmak pada masa sekarang, lihat; Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 1997), jilid I, h. 116-117

mereka.⁵² Perhimpunan semacam OKI (Organisasi Konferensi Islam) juga dapat menjadi mediator dalam pelaksanaan tersebut.

Ijmak menjadi sumber ketiga hukum didasarkan pada ayat-ayat Alquran seperti: Surat al-Nisa' (4): 59, 115; al-Baqarah (2): 143; 'Ali 'Imran (3): 103, 110. Sedangkan dari sunnah didasarkan pada hadis Rasulullah *saw*:

سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ (رواه ابن ماجه)

Saya mendengar Anas bin Malik berkata: “saya mendengar Rasulullah *saw*. bersabda”: “Sesungguhnya umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesesatan, apabila kamu sekalian menemukan perbedaan pendapat maka hendaklah kamu berada dalam kelompok mayoritas.”.⁵³

4. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum ekonomi Islam yang keempat. Sebagaimana definisi sumber hukum lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan qiyas. Misalnya definisi yang dikemukakan al-Baqillani yang menjadi pegangan sebagian besar ulama syafi'iyah:

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا مِنْ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ

“Menanggung sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang

⁵² *Ibid.*, h. 117

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Ziyah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid II, h. 478. Hadis diatas hanya ditakhrijkan oleh Ibnu Majah sehingga ia dikategorikan sebagai hadis *gharib*.

sama antara keduanya, baik dari segi hukum atau sifatnya”.⁵⁴

Definisi lain dikemukakan Abu Zahrah:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرِ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ لِلِإِشْتِرَاكِ
بَيْنَهُمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ

“Menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya ada persamaan illat hukum”.⁵⁵

qiyas sebagai sumber hukum, terdapat dua kelompok. Ada yang menerima qiyas sebagai sumber hukum, kelompok lain menolak kias sebagai sumber hukum. Kelompok yang menolak kias adalah para ulama Dhohiriyah dan Syi’ah Imamiyah, dua kelompok yang menolak secara mutlak kias. Ibnu Hazm al-Andalus adalah ulama Dhohiriyah yang termasuk dalam kelompok penolak kias.⁵⁶ Sedangkan jumhur ulama menerima kias sebagai sumber hukum.

Qiyas sebagai sumber hukum didasarkan pada ayat Alquran, antara lain, surat an-Nisa’ (3): 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu,

⁵⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), h. 602

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 183 Berbagai definisi lain tentang kias dapat dilihat pada Amir Syarifuddin, *op.cit.*, h. 144-147

⁵⁶ Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 224

maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Surat al-Nisa’ [3]: 59).

Klausa dalam ayat tersebut di atas yang mengatakan: *فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ* menurut Abu Zahrah tidak mungkin dapat diketahui tanpa mengetahui petunjuk-petunjuk dalil yang ada dalam dua sumber hukum tersebut, Alquran dan sunnah. qiyas merupakan suatu cara untuk mengetahui petunjuk dalam kedua sumber itu dengan menggunakan illat hukum.⁵⁷

Sedangkan kehujjahan kias sebagai sumber hukum dari petunjuk sunnah didasarkan pada hadis Nabi, seperti percakapan Nabi dengan Muaz bin Jabal, saat diutus ke Yaman untuk menjadi penguasa di sana. Nabi bertanya, “Dengan apa engkau menerapkan hukum seandainya kepadamu diajukan sebuah perkara?” Muaz menjawab, “Saya menetapkan hukum berdasarkan Kitab Allah.” Nabi bertanya lagi, “Bila engkau tidak menemukan hukumnya dalam Kitab Allah?” Jawab Muaz, “Dengan Sunnah Rasul.” Nabi bertanya lagi, “Kalau dalam Sunnah juga engkau tidak menemukannya?” Muaz menjawab, “Saya akan menggunakan ra’yu saya”. Nabi bersabda, “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasul Allah dengan apa yang diridhai Rasul Allah”.⁵⁸

Menurut jumhur ulama hadis di atas merupakan dalil yang kuat menyatakan kias sebagai sumber hukum Islam.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.*, h. 221

⁵⁸ Daud Sulaiman bin al-Isy’as al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), jilid III, h. 295

⁵⁹ Tentang dalil-dalil lain dari sunnah dan praktek para sahabat yang mendasari pemikiran para jumhur menjadikan kias sebagai sumber hukum Islam, lihat Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 223-224

BAB III

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN

EKONOMI SYARIAH

A. Pemikiran Ekonomi Syariah

Pemikiran Ekonomi syariah sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi pemikiran intelektual Islam, terutama dalam tradisi para pemikir Islam klasik, masa kejayaan umat Islam. Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi syariah muncul sebagai salah satu tradisi intelektual, walaupun pemikiran tersebut sangat sederhana sesuai dengan konteks zaman dan tantangan kehidupan yang berkembang pada saat itu.

Dibandingkan dengan bidang-bidang lain, pemikiran tentang ekonomi syariah tidak semarak dan simultan dengan pemikiran lainnya, seperti tasawuf, kalam, fikih, tafsir, hadis dan lainnya. Bahkan dibandingkan dengan pemikiran politik Islam, yang boleh dikatakan “baru” dalam tradisi intelektual Islam, pemikiran ekonomi syariah masih berada di bawahnya.

Namun demikian, seperti yang dikemukakan di atas, bukan berarti pemikiran ekonomi syariah tidak dikenal dalam tradisi intelektual para pemikir Islam. Para imam dan filosof Islam mengkaji pemikiran mereka tentang ekonomi syariah dalam berbagai karya tulis, baik yang ditulis secara khusus untuk mengulas ekonomi syariah maupun bagian dari kajiannya dalam bidang ilmu lainnya.

Ahmad Najetullah Siddiqi membagi periode perkembangan pemikiran ekonomi syariah ke dalam tiga periode: Periode Awal, berlangsung pada masa ke-khalifah-an sampai 450 H (1058 M), Periode Kedua (1058-1446 M), dan Periode Ketiga (1446-1931 M).⁶⁰

⁶⁰ Muhammad Najetullah Siddiqi, “History of Islamic Thought”, dalam *Lectures on Islamic Economics*, (Jeddah: IDB-IRTI, 1992), h. 23; lihat pula

Pemikir ekonomi syariah periode awal antara lain: Abu Yusuf (731-798 M). Ia adalah salah seorang pemikir Islam yang membahas persoalan ekonomi dalam pemikiran keislamannya. Subyek utama pemikiran ekonomi Abu Yusuf adalah perpajakan dan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi.⁶¹ Pemikirannya tersebut merupakan rangkaian panjang surat Abu Yusuf kepada penguasa Abbasiyah, Harun al-Rasyid, yang kemudian tulisan itu dikenal dengan *Kitab al-Kharaj*. Buku Abu Yusuf ini telah diringkas dan dianalisis oleh Diya al-Din al-Rayyis dalam bukunya, *al-Kharaj wa al-Nujuzh al-Maliyah fi al-Islam Hatta Muntasafi al-Qarni al-Salis al-Hijri*. Buku yang diterbitkan oleh Fakultas Adab Universitas Kairo itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Kharaj and Financial System in Islam till the Middle of the Third Century after Hijrah*. Selain al-Rayyis, pandangan-pandangan ekonomi di dalam *Kitab al-Kharaj* juga telah dibahas lebih jauh oleh Elias Tuma, Khurshid Ahmad Fariq, Abu al-A'la al-Maududi dan Zia al-Haq.⁶²

Menurut Abu Yusuf salah satu sumber pendapatan negara adalah pajak pertanian.⁶³ Dalam konteks ini, ia lebih cenderung menganjurkan negara mengambil pajak dari hasil pertanian dari para penggarap daripada menarik pajak dari lahan pertanian. Sebab cara seperti itu dalam pandangan ekonomi Abu Yusuf lebih memberikan hasil produksi yang lebih besar dengan memberikan

Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), h. 7-10

⁶¹ Muhammad Najetullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: Lembaga Islam untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat [LIPPM], 1986), h. 159, selanjutnya disebut "Pemikiran"

⁶² Muhammad Najetullah Siddiqi, "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Survei" dalam Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: International Institute Thought (IIIT), 2001), h. 11

⁶³ Al-Qadhi Abu Yusuf Ya'kub bin Ibrahim, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1989), h. 23

fasilitas untuk perluasan penggarapan.⁶⁴ Logikanya, di satu sisi, semakin tinggi tingkat produktifitas masyarakat, semakin besar pendapatan negara dari hasil pertanian. Oleh karena itu, negara harus mendorong dan memberikan fasilitas yang memadai bagi peningkatan produktifitas masyarakat, misalnya memberi keluasan tanah garapan, pembangunan irigasi dan sebagainya. Pada sisi yang lain, dengan penerapan pajak hasil pertanian, para penggarap tidak terbebani oleh pajak apabila hasil pertanian mereka tidak memadai. Hal ini berlawanan ketika diterapkan pajak atas tanah garapan, para penggarap tetap akan membayar pajak, baik masa melimpah atau masa paceklik.

Hal lain yang menjadi tekanan Abu Yusuf dalam pemikiran ekonominya adalah kebijakan pengendalian harga yang harus dilakukan negara. Sebagaimana para pemikir Islam lainnya, menurut Abu Yusuf bahwa masalah kenaikan harga harus dipecahkan dengan menambah suplai makanan dan menghindari pengontrolan terhadap harga. Oleh sebab itu, pembersihan pasar dari praktek penimbunan, monopoli, dan praktek korupsi lainnya harus dihilangkan. Di sinilah letak penting lembaga *Hisbah* (lembaga pengawas), sebagaimana dalam pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah.⁶⁵

Pemikir ekonomi syariah periode kedua antara lain: Ibnu Taimiyah (w. 1328 M). Ia adalah seorang pemikir Islam yang hidup pada masa pemerintahan Dinasti Mamluk (1250-1317). Nama lengkap Ibnu Taimiyah adalah Ahmad bin Abd. Al-Halim bin Abd. Al-Salam bin Taimiyah, lahir di daerah Harran, Syiria; atau tepatnya hari Senin 10 Rabi' al-Awwal 661 H./22 Januari

⁶⁴ *Ibid.* h. 110-115

⁶⁵ Muhammad Najetullah Siddiqi, *loc. cit.* 11; lihat pula, Elias Tuma, "Early Arab Economic Policies" dalam *Islamic Studies*, (Karachi: t.tp, Maret 1965), volume ke-4, h. 14

1263 M.⁶⁶ Pada masa ini terjadi kemunduran politik di dunia Islam. Hal itu sebabkan berbagai gejolak politik akibat perang salib, serangan tentara Mongol, dan disintegrasi politik dalam tubuh umat Islam.

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah dapat ditemukan, terutama dalam dua kitabnya yaitu, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* dan kitabnya, *al-Hisbah fi al-Islam au Wazifah al-Hukumah al-Islamiah*. Kedua kitab tersebut disamping membahas persoalan ekonomi juga membahas persoalan kenegaraan, terutama buku yang pertama. Tampak pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah tidak terlepas dari peran negara sebagai institusi yang mengatur agar pelaksanaan mekanisme ekonomi dapat berjalan secara baik.

Negara menurut Ibnu Taimiyah berhak melakukan intervensi dengan memaksa para pelaku ekonomi yang diketahui melakukan praktek penimbunan barang untuk menjualnya kepada masyarakat dengan harga yang lazim atau harga pasar yang berlaku.⁶⁷ Intervensi negara terhadap praktek penimbunan memang harus dilakukan sebab praktek tersebut dapat menimbulkan ketimpangan pasar, harga-harga barang mengalami kenaikan sehingga menimbulkan ketidakstabilan pasar.

Berkaitan dengan peran negara tersebut dalam pandangan ekonomi Ibnu Taimiyah, diperlukan sebuah lembaga yang berperan dalam mengkondisikan terciptanya hubungan sosial ekonomi di antara manusia sehingga tercipta hubungan yang tertib dan etis. Lembaga tersebut dalam pandangan para pemikir ekonomi syariah, termasuk Ibnu Taimiyah adalah lembaga *Hisbah*. Lembaga tersebut menurut Ibnu Taimiyah tidak hanya berkaitan dengan

⁶⁶ Ibnu Al-Kasir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, (Beirut: Maktabah al-Ma'arif, 1996), volume IV, h. 136

⁶⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, 1969), h. 31, selanjutnya disebut "al-Siyasah"

persoalan ekonomi saja, tapi lembaga itu secara umum merupakan lembaga yang berkaitan erat dengan masalah penegakan amar makruf dan nahi munkar.⁶⁸

Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah juga mencakup ekonomi fiskal⁶⁹, ia menjelaskan sumber-sumber penerimaan dan alokasi pembelanjaan keuangan negara. Menurutnya, sumber-sumber penerimaan negara segala apa yang dapat menghasilkan pendapatan bagi negara. Namun demikian, negara wajib melakukan penyeleksian terhadap sumber-sumber pendapatan itu, mana di antaranya yang merupakan sumber yang halal yang diperkenankan untuk diambil dan mengalokasikannya kepada saluran-saluran yang berhak.⁷⁰ Sumber-sumber penerimaan negara dalam tradisi ekonomi Islam, antara lain: *zakat*, *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, dan *jizyah*.

Sedangkan para pemikir ekonomi syariah periode ketiga, di antaranya: Ahmad bin Abd al-Rahim, dikenal dengan sebutan Shah Wali Allah Dehlawi. Ia adalah salah seorang pemikir termuka Islam di India, lahir pada tanggal 21 September 1703 dan meninggal tanggal 22 Agustus 1762. Shah Wali Allah lahir saat melemahnya kekuasaan Dinasti Barbar Mughal di India. Ia pernah belajar di Hijaz selama 2 tahun pada ulama-ulama terkenal ketika itu, dan pada saat yang bersamaan di Hijaz terjadi gerakan pembaharuan keagamaan yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan tersebut menginspirasi Shah Wali Allah untuk mengadakan pembaharuan di India dalam konteks yang lebih luas meliputi: pendidikan, ekonomi, kemasyarakatan dan

⁶⁸ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah fi al-Islam au Wazifah al-Hukumah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th), h. 6, selanjutnya disebut “al-Hisbah”.

⁶⁹ Fiskal diartikan sebagai bentuk penerimaan dan sumber-sumber pendapatan yang diperlukan suatu negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik oleh pemerintah.

⁷⁰ Ibnu Taimiyah, “al-Siyasah”, *op. cit.*, h. 32

pemerintahan.⁷¹

Pemikiran ekonomi Shah Wali Allah dapat ditemukan dalam berbagai karya-karyanya, seperti, *Hujjah Allah al-Balighah*, *al-Budur al-Bazighah*, *al-Tafhimat al-Ilahiyyah*, dan berbagai surat yang dikirimnya kepada para penguasa, gubernur, dan para sahabatnya, khususnya surat-surat yang berkaitan dengan faktor-faktor ekonomi bagi kemunduran Dinasti Mughal.⁷²

Pemikiran ekonomi Shah Wali Allah yang terkenal yaitu *al-Irtifaqat*, sebuah konsep pengembangan sosial ekonomi yang dilakukan secara evolusioner (bertahap).⁷³ Konsep tersebut berdasarkan analisisnya yang mendalam terhadap fenomena kebangkrutan ekonomi dan politik yang terjadi pada Dinasti Mughal, dan mengajukannya sebagai sebuah solusi bagi perbaikan ekonomi kepada penguasa Mughal.

Menurut Shah Wali Allah bahwa kesejahteraan ekonomi merupakan prasyarat untuk suatu kehidupan yang baik. Tingkat kesejahteraan ekonomi sangat menentukan tingkat kehidupan, seseorang semakin tinggi tingkat kesejahteraan ekonominya akan semakin mudah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.⁷⁴ Namun untuk mencapai kesejahteraan tersebut Shah Wali Allah melarang melakukan praktek perjudian dan riba sebab dua jalan tersebut bertentangan dengan prinsip kerja sama dalam ekonomi.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa konsep *al-Irtifaqat* merupakan sebuah konsep pengembangan sosio ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi manusia. Menurutnya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi itu, ada empat tahapan

⁷¹ Abdul Azim Islahi, "Shah Wali Allah's Concept of al-Irtifaqat (Stages of Socio-Economic Development)", dalam F.R. Faridi (Editor), *Aspects Islamic Economics and Indian Muslims*, (New Delhi: Institute of Objective Studies, 1993), h. 74

⁷² *Ibid.*, h. 75

⁷³ Shah Wali Allah, *al-Budur al-Bazighah*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1997) h. 46

⁷⁴ Muhammad Najetullah Siddiqi, "Pemikiran", *op. cit.*, h. 160

pengembangan sosio ekonomi, yaitu:

Pertama adalah menyangkut pemanfaatan sumber daya alam. Maksudnya, manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia seperti tanah, air dan binatang dalam rangka meningkatkan status ekonomi manusia.

Kedua, manusia mampu mengantisipasi problem yang dihadapinya ketika melaksanakan tahapan pertama. Artinya manusia harus mampu mengembangkan pengetahuan dan etika dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam melaksanakan tahapan ini ada lima keutamaan (hikmah) yang perlu diperhatikan manusia selaku pelaku ekonomi, yaitu: *al-hikmah al-ma'asyiyah*, *al-hikmah al-manziliyah*, *al-hikmah al-iktisabiyah*, *al-hikmah al-ta'amuliyah*, dan *al-hikmah al-ta'awuniyah*.⁷⁵

Ketiga, dalam mengembangkan ekonomi manusia dituntut untuk bisa melakukan kerjasama dengan berbagai kelompok yang berbeda (bersifat nasional) berdasarkan atas azas saling menguntungkan dan kooperatif. Kerjasama tersebut harus menghindari praktek korupsi, penindasan dan penipuan di antara kelompok tersebut. Dalam kaitan dengan menumbuhkan kerjasama tersebut, seharusnya ditunjuk salah seorang pemimpin (*imam*) untuk mengendalikan institusi tersebut.

Keempat, kelompok pelaku ekonomi harus bisa mengadopsi karakteristik ekonomi yang bertaraf internasional sehingga mereka bisa *survive* pada tataran ekonomi global. Dijelaskan akan pentingnya pula mengangkat seorang penanggung jawab (*imam*) yang berkompetensi yang mampu mengakomodir anggota yang bertaraf internasional tersebut untuk menjamin keadilan dan keamanan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi⁷⁶

Pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan terjadi sejak dasawarsa 1970-an. Menurut Dawam Rahardjo, kegairahan itu disebabkan oleh beberapa faktor.

⁷⁵ Shah Wali Allah, *op. cit.*, h. 48-49

⁷⁶ Abdul Azim Islahi, *op. cit.*, h. 77-88

Pertama, timbulnya apa yang dikenal dengan sebagai kekuatan ekonomi *petro dollar* di negara-negara Islam yang memiliki sumber minyak dunia. *Kedua*, timbulnya kesadaran tentang “kebangkitan Islam pada abad ke-14 Hijriyah” yang melanda dunia Islam pada dasawarsa 70-an. Kebangkitan itu diwarnai oleh lahirnya pemikiran-pemikiran modern di berbagai bidang, termasuk ekonomi, terutama yang dilakukan oleh ulama-intelektual, seperti Abu al-A’la al-Maududi, atau Sayyid Qutub.⁷⁷ *Ketiga*, lahirnya generasi baru intelektual Muslim yang mendapat pendidikan modern, baik di Barat maupun di negara-negara Islam sendiri, terutama para sarjana ilmu-ilmu sosial, termasuk ekonomi konvensional.

Mereka berusaha untuk “menyelamatkan” penggunaan dana-dana milik umat Islam yang pada waktu itu disimpan di bank-bank konvensional yang kepemilikan sahamnya banyak didominasi oleh kaum Yahudi. Dengan adanya konsep bank syariah dinilai sebagai daya tarik yang cukup memikat oleh kalangan umat Islam yang ingin mematuhi ketentuan syariah mengenai keharaman bunga yang diinterpretasikan sebagai riba dalam Alquran. Itulah yang menjelaskan mengapa yang mula-mula berkembang adalah teori-teori moneter dan konsep perbankan dalam ekonomi syariah, karena wacana itu berhubungan dengan masalah pengelolaan dana.

Kebangkitan generasi intelektual Islam tidak terlepas dari kebangkitan Dunia Ketiga dalam pembangunan di samping adanya rasa ketertinggalan dari bangsa-bangsa Barat. Kebangkitan itu juga karena adanya dukungan yang kuat dari lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dua lembaga Bretton Wood, Bank Dunia (*The World Bank*) dan Lembaga Moneter Internasional (*International Monetary Fund, IMF*) yang disusul

⁷⁷ Dawam Rahardjo, *Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer*, Makalah, disajikan dalam *Stadium General* Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 10 Maret 2001, h. 1-2

oleh lembaga-lembaga serupa di beberapa kawasan, di antaranya Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*, ADB) dan Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*, IDB).⁷⁸ Sebuah bank yang berdiri atas prakarsa dan di bawah pengawasan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Sejak dekade 1970-an tersebut terlihat bermunculannya institusi-institusi ekonomi syariah, khususnya bank-bank yang beroperasi dengan sistem syariah. Seiring dengan kondisi itu, literatur-literatur tentang ekonomi syariah banyak menghiasi khazanah intelektual Islam, baik ditulis dalam bahasa Arab maupun Bahasa Inggris. Beberapa pemikir ekonomi syariah pasca dekade itu yang sangat populer dan telah banyak melahirkan karya-karya dalam wacana ekonomi syariah, antara lain: M. Umer Chapra⁷⁹, Khurshid Ahmad dan Najjetullah Siddiqi. Karya-karya ekonomi mereka telah membawa pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan ekonomi syariah di dunia Islam, termasuk juga di Indonesia. Karya-karya mereka telah banyak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diulas oleh banyak pemikir dan pemerhati serta para praktisi ekonomi syariah di negeri ini.

M. Umer Chapra telah menulis beberapa karya dalam ekonomi syariah, seperti bukunya, *Towards a Just Money System* (1985), *Islam and the Economic Challenge* (1992), *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability* (1993), dan bukunya yang terbaru dan sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia, *The Future of Economic: An*

⁷⁸ Dawam Rahardjo, "Wacana Ekonomi Islam Kontemporer" dalam M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Diterjemahkan oleh Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), h. vii-viii.

⁷⁹ Ia dilahirkan pada tahun 1933. Meraih gelar MBA (M.Com) pada Universitas Karachi pada tahun 1956 dan meraih gelar Doktor Ekonomi pada University of Minnesota, Minneapolis dengan predikat *cum laude*. Sekarang ia bekerja sebagai *Research Advisor Islamic Research and Training Institute (IRTI)* pada *Islamic Development Bank (IDB)*.

Islamic Perspective. Bukunya *Towards a Just Money System*, sebuah buku yang diterbitkan oleh *The Islamic Foundation*. Buku yang mengulas tentang konsep uang, perbankan dan kebijakan moneter dalam ajaran Islam. Karena bukunya tersebut, ia memperoleh penghargaan dari *Islamic Development Bank* pada tahun 1990 dan pada tahun itu juga mendapat penghargaan dari *International Prize for Economic Studies*.

Buku Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* membahas keterbatasan konsep kapitalisme, kelemahan konsep sosialisme, krisis konsep *welfare economic*, serta inkonsistensi konsep ekonomi pembangunan. Kemudian pada bagian akhir ia menjabarkan secara rinci bagaimana *maqasid al-syari'ah* dapat dicapai dengan strategi yang sistematis. Ia menjelaskan strategi itu melalui perlunya sebuah mekanisme filter dan motivasi yang benar dalam pembangunan ekonomi.

Bukunya *Islam and Economic Development: A Strategy for Development with Justice and Stability*, Chapra melangkah lebih jauh dengan memberikan rincian strategi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang adil dan stabil. Buku ini dipandang sebagai kelanjutan buku sebelumnya, sehingga terkadang ada pembahasan yang sama dengan sebelumnya. Benang merah yang dapat ditarik dari kedua buku itu adalah upaya Chapra menjabarkan konsep *maqasid al-syari'ah*. Ia secara konsisten menyatakan bahwa upaya pembangunan ekonomi dalam bingkai syariah merupakan realisasi *maqasid al-syari'ah* itu sendiri. Ia merujuk pemikiran Imam Al-Ghazali dalam bahasannya tentang konsep *maqasid al-syai'ah*.

B. Perbandingan Ekonomi Islam dan Konvensional

Perbedaan dasar sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional boleh dilihat dari beberapa sudut pandang:

1. Sumber Epistemologi

Sebagai sebuah *addin* yang *syumul*, sumbernya berasaskan kepada sumber yang mutlak yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai suatu agama (*addin*) yang istimewa dibanding dengan agama-agama ciptaan lain. Al-Qur'an dan as-Sunnah ini menyuruh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua aspek kehidupan termasuk soal muamalah. Perkara-perkara asas muamalah dijelaskan di dalam wahyu yang meliputi suruhan dan larangan.

Suruhan seperti makan dan minum menjelaskan tentang tuntutan keperluan asasi manusia. Penjelasan Allah Swt, tentang kejadian-Nya untuk dimanfaatkan oleh manusia (QS. Yasin ayat 34-35, 72-73), (QS. An-Nahl ayat 5-8, 14, 80) menunjukkan bahwa alam ini disediakan begitu untuk dibangunkan oleh manusia sebagai Khalifah Allah (QS. Al-Baqarah ayat 30).

Tujuan yang tidak sama akan melahirkan implikasi yang berbeda karena itu pakar ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan pakar ekonomi konvensional mencoba menyelesaikan segala permasalahan yang timbul tanpa ada pertimbangan mengenai soal ketuhanan dan keakhiratan dan lebih mengutamakan untuk kepentingan dunia saja.⁸⁰

2. Tujuan Kehidupan

Tujuan ekonomi Islam membawa kepada konsep falah (kejayaan) di dunia dan di akhirat, sedangkan sekuler untuk kepuasan di dunia saja. Ekonomi Islam meletakkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dimana segala bahan-bahan yang ada di bumi dan di langit adalah diperuntukkan untuk manusia.

⁸⁰ Mustafa Edwin Nasuiton (ed.), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islami*, h. 8.

Manusia merupakan makhluk sosial (zone politicon) karena itu dalam soal kepemilikan harta terdapat harta milik individual dan juga terdapat harta yang menjadi hak masyarakat umum.⁸¹

3. Konsep Harta sebagai Wasilah

Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan tujuan hidup tetapi sekadar wasilah atau perantara bagi mewujudkan perintah Allah Swt. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah seperti firman Allah Swt. QS. Al-An'aam ayat 162:

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ

“Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti (perkataan itu) dengan Perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka,⁸² Maka Kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka”.

Merealisasikan perintah Allah Swt, yang sebenarnya ini akan membawa kepada ketenangan hidup yang hakiki. Setiap muslim percaya bahwa Allah Swt merupakan pencipta yang mampu memberikan ketenangan hakiki. Maka dari itu harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi adalah sebagai jalan bagi mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke alam akhirat. Ini berbeda dengan konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Ini sudah tentu berlawanan dengan Islam. Untuk merealisasikan tujuan hidup menurut aliran konvensional ini, mereka membentuk sistem-sistem yang mengikuti selera nafsu mereka guna memuaskan kehendak materil

⁸¹ Mustafa Edwin Nasuiton (ed.), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islami*, h. 9.

⁸² Mereka diperintah untuk mengucap: hiththatun (berarti: mohon dilepaskan dari dosa), Namun mereka mengubahnya sambil mencemooh dan mengucap: hinthatun sya'irah (berarti: gandum).

mereka semata. Oleh karena itu sistem ekonomi konvensional mempunyai tujuan keuntungan tanpa memperduli nilai wahyu, maka mereka mengutamakan kepentingan individu yang lemah dan berprinsip siapa takut dialah yang berkuasan (*survival of the fittest*).

Konsep hak milik pribadi dalam Islam bersifat unik, dalam arti bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan dilangit adalah Allah, manusia hanyalah khalifah di muka bumi. Pada umumnya terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi.⁸³



⁸³ Mustafa Edwin Nasuiton (ed.), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islami*, h. 10.



BAB IV

MASALAH RIBA, MAISYIR DAN GHARAR DALAM PRAKTEK KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Kontroversi Bunga Bank

Kontroversi seputar bunga bank tidak terlepas dari wacana keharaman riba, apakah bunga bank itu termasuk dalam kategori riba atau ia bukan menjadi bagian dari riba. Oleh karena itu, agar pembahasan tentang bunga bank mendapat pemahaman yang utuh dan menyeluruh, persoalan riba harus dikemukakan sebab keduanya terkait erat.

1. Riba

a. Definisi dan Macam-macam Riba

Riba berasal dari bahasa Arab, secara bahasa bermakna “*al-ziyadah*” (الرَّيَاذَةُ) yang berarti “tambahan”.⁸⁴ Dalam pengertian kebahasaan riba juga berarti “tumbuh” dan “membesar”.⁸⁵

Para ulama berbeda pendapat dalam definisikan riba. Perbedaan itu disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dan menginterpretasikan nash Alquran dan sunnah Rasul. Al-Jurjani misalnya merumuskan definisi riba sebagai berikut:

⁸⁴ Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat* (Beirut: Maktabah Libnan, 1990), h. 114; Al-Raghib al-Asfahani, *Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, t.th.), h. 187

⁸⁵ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, (Leiden: EJ. Brill, 1996), h.

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ فَضْلُ خَالٍ عَنْ عَوْضٍ شَرْطَ لِأَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ

"Riba secara syar'i adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan, yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang membuat akad atau transaksi".⁸⁶

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Badr al-Din al-Aini:

الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى أَصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ بَيَّاعٍ

Riba secara syar'i adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya aqad atau transaksi jual beli yang riil.⁸⁷

Walaupun ulama berbeda pendapat tentang definisi riba, namun pendapat mereka dapat dilihat bahwa riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu di antara dua pihak yang melakukan hutang-piutang atau tukar menukar barang. Jika dikaitkan dengan hutang-piutang maka makna riba adalah tambahan tanpa imbalan yang disyaratkan oleh pihak yang meminjamkan atau berpiutang kepada pihak peminjam.

Sebagaimana definisi riba, macam-macam riba pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ibnu Rusyd mengatakan bahwa riba terdapat dalam dua perkara, yaitu pada jual beli dan pada jual beli tanggungan, pinjaman atau lainnya. Riba dalam jual beli menurutnya ada dua macam: *nasi'ah* dan *tafadul* sedangkan riba pada jual beli tanggungan juga terbagi dua kategori, salahsatunya adalah riba jahiliyah yang telah disepakati para ulama tentang keharamannya.⁸⁸

⁸⁶ Ali bin Muhammad al-Syarif al-Jurjani, *loc. cit.*

⁸⁷ Badr al-Din Abi Muhammad al-Aini, *Umdah al-Qari: Syarh Sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jilid VI, juz 11 h. 199

⁸⁸ Ibnu Rusyd al-Qurtubiy, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtajid*, (Riyadh: Maktabah Nazar Mustafa, 1995), jilid II, h. 226

Ada juga yang membagi pada riba *fadl*, *yad*, *nasa'* dan *qard*.⁸⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi riba dalam dua macam, riba *khafiy* dan *jaliy*.⁹⁰ Namun demikian, para jumhur ulama fikih membagi riba dalam dua kategori: Riba *nasi'ah* dan riba *fadl*.⁹¹ Pandangan yang sama juga dikemukakan al-Jaziri.⁹² Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaannya sendiri. Sedangkan riba *fadl* adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.

b. Keharaman Riba

Dalam Alquran, istilah riba disebutkan sebanyak tujuh kali. Dari tujuh ayat tersebut, proses keharaman riba, sebagaimana yang terjadi pada *khams*, berlangsung dalam empat tahap.⁹³ Keharaman riba tidak langsung satu kali, tetapi berlangsung secara bertahap, terkait dengan kondisi dan kesiapan masyarakat dalam menerima suatu perintah.

Tahap pertama adalah surat al-Rum (30): 39, ayat yang menerangkan tentang asumsi manusia yang menganggap harta riba akan menambah hartanya, padahal di sisi Allah swt. asumsi itu sebenarnya tidak benar, karena hartanya tidak bertambah karena

⁸⁹ Muhammad al-Syarbani al-Khatib, *Mughni al-Muhtaj*, (*Syarh al-Minhaj*), (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958), jilid II, h. 21

⁹⁰ Syams al-Din Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqq'n 'An Rab al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), jilid II, cet. ke-2, h. 135

⁹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1989), cet. ke-3, jilid IV, h. 671

⁹² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-'Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr Al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1972), jilid II h. 245

⁹³ Ahmad Sukardja, "Riba, Bunga Bank dan Kredit Perumahan" dalam Huzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: LSIK, 1995) Buku III, h.35-36

melakukan riba. Allah swt. berfirman:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S. al-Rum (30): 39)

Ayat Makkiyah ini turun belum secara tegas menyatakan haramnya riba, tapi Allah hanya menyatakan bahwa perbuatan tersebut tidak disukai-Nya.

Tahap kedua, diceritakan bahwa orang-orang Yahudi dilarang melakukan riba, tapi larangan itu dilanggarnya sehingga mereka mendapat murka Allah swt. Hal itu dijelaskan Allah swt dalam surat An-Nisa' (4): 161:

وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Tahap ketiga turun berkaitan dengan pengharaman riba yang berlipat ganda, yaitu pada surat Ali 'Imran (3): 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(Q.S. Ali ‘Imran (3): 130)

Tahap keempat merupakan larangan Allah swt. secara menyeluruh untuk tidak melakukan riba, termasuk sisa-sisa riba yang dipraktekkan pada masa itu. Hal ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (279).

Dalam hal keharaman riba tersebut di atas, ulama berbeda pendapat. Namun secara garis besarnya pandangan mereka terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama menyatakan riba hukumnya haram, baik banyak maupun sedikit kadarnya. Kelompok ini banyak didukung oleh kalangan ulama fikih, termasuk ulama kontemporer seperti Abu al-A’la al-Maududi, Hasan al-Banna dan lainnya. Kelompok kedua hanya mengharamkan hukum riba yang berlipat ganda saja. Termasuk kelompok ini misalnya Muhammad Abduh, Mahmud Syaltut. Di Indonesia ekonom seperti Sjafruddin Prawiranegara dan Muhammad Hatta, juga termasuk orang-orang yang tidak

memasukkan kategori bunga uang sebagai riba.

Kelompok pertama memperkuat argumentasi dengan dalil dalam ayat-ayat Alquran, seperti surat al-Rm (30): 39; Ali ‘Imran (3): 130, al-Baqarah (2): 275, 276, 278 dan 279, juga didukung dengan hadis-hadis Nabi baik untuk menudukun riba *nas³‘ah* maupun *fadl*. Hadis riba *nasi‘ah*, yaitu:

عَنْ جَابِرٍ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ (رواه مسلم)

“Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya, dan yang menyaksikannya”. (HR. Muslim).⁹⁴

Sedangkan keharaman riba *fadl* didasarkan pada hadis riwayat ‘Ubadah bin al-Shamit:

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اِزْدَادَ فَقَدْ أَرَبَى (رواه مسلم)

“Dari Ubadah berkata: saya mendengar Rasulullah saw. melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam, kecuali dengan sama (dalam timbangan/takaran) dan kontan. Barangsiapa melebihkan salah satunya, ia termasuk dalam praktek riba. (HR. Muslim).⁹⁵

Kelompok kedua beralasan bahwa riba yang diharamkan dalam Alquran adalah yang masyhur, riba yang dipraktekkan masyarakat Arab pada masa kenabian yaitu dikenal dengan riba

⁹⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), *Kitab al-Ba’*, jilid I, h. 697

⁹⁵ *Ibid.*, h, 792

jahiliyah. Riba ini adalah *riba nasi'ah*, riba tangguhan yang mengandung unsur *ad'afan muda'afah*, berlipat ganda atau eksploitasi. Menurut Mahmud Syaltut, riba yang dimaksud dalam Alquran dipahami dengan pendekatan *urf* dimana ayat itu turun, maka yang dimaksud adalah riba yang berlipat ganda.⁹⁶

2. Pandangan tentang Bunga Bank

Di Indonesia pandangan tentang bunga bank dapat diklasifikasikan pada tiga pandangan, yaitu:

Pertama, pandangan yang mengatakan bunga bank adalah termasuk dalam kategori riba sehingga hukumnya haram, sedikit atau banyak unsur; *Kedua* pandangan yang mengatakan bahwa bunga bank bukan termasuk dalam kategori riba sehingga ia halal untuk dilakukan; *Ketiga* pandangan yang mengambil jalan tengah pada kedua pandangan di atas, mereka mengkategorikan riba dalam klasifikasi hukum *mutasyabihat*, sesuatu yang samar ketegasan hukumnya. Olehnya itu, mereka berpendapat sebaiknya bunga bank tidak dilakukan.

Salah seorang yang berpendapat bahwa bunga bank itu dibolehkan karena tidak sama dengan riba adalah Syafruddin Prawiranegara⁹⁷. Ia berpendapat bahwa riba atau yang ia sebut dengan *woeker*⁹⁸ berbeda dengan bunga bank. Bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, tidak dipungut secara liar tanpa adanya aturan yang mengatur keberadaannya. Sedangkan riba

⁹⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, (Kairo: Dar al-Qalam, t.th.), h. 353

⁹⁷ Ia adalah mantan Menteri Keuangan pada masa Kabinet Sjahrir III, seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan utama dalam Partai Masyumi, sering disebut sebagai tokoh ekonom yang menganut aliran Neo-Klasik yang mempunyai kemampuan berbahasa Belanda dengan baik. Tidak heran kalau dalam berbagai istilah ekonomi dan pemikirannya yang lain sering menggunakan istilah-istilah dalam Belanda. Lihat, Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 409 dan selanjutnya disebut "Islam Transformasi".

⁹⁸ Istilah dari bahasa Belanda yang berarti bunga yang terlalu tinggi

menurutnya adalah tiap-tiap laba yang abnormal yang diperoleh dalam jual beli bebas, tetapi di mana satu pihak terpaksa menerima kontrak jual beli itu karena kedudukannya lemah.⁹⁹

Bunga bank yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pada prinsip eksploitasi bukan merupakan riba. Menurutnya, baik laba maupun bunga, apakah tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas adalah sah dalam pandangan Allah swt. Sebaliknya laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang tidak jujur, adalah riba. Sebab perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Allah swt., manusia harus berbuat baik dan tidak menipu serta menekan hambanya.¹⁰⁰

Hanya saja ia menegaskan bahwa bunga yang dimaksudkan itu, tingginya dalam batas-batas yang masih normal, yaitu sesuai dengan yang lazim berlaku di pasar bebas, tidak melampaui batas.¹⁰¹ Walaupun Syafruddin sendiri mengakui bahwa tidak mudah mengukur batas yang jelas antara yang wajar dan yang melampaui batas.

Pandangan Syafruddin didasarkan pada asumsinya bahwa sifat keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang maupun barang adalah sama. Ia menolak anggapan sebagian besar pandangan ulama yang menganggap riba adalah setiap tambahan, atau *rente* atau apa pun namanya yang timbul dari pinjaman uang. Sedangkan keuntungan yang timbul dari penjualan barang, betapa pun tingginya, dan meskipun keuntungannya itu diperoleh atas penjualan dengan kredit, dipandang sebagai halal karena dasarnya jual beli.¹⁰²

⁹⁹ Syafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam (Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II)*, (Jakarta: CV Masaagung, 1988), h. 290

¹⁰⁰ *Ibid.*, h. 347

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 332

¹⁰² *Ibid.*, h. 284

Bagi Syafruddin, tidak rasional menamakan keuntungan yang diperoleh dari pemberian kredit berupa uang, riba yang haram, sedangkan keuntungan yang diperoleh dari kredit berupa penjualan barang, di halalkan. Sebab meminjamkan uang atau menjual barang berupa kredit, utang yang diakui oleh debitur dalam kedua hal dinyatakan dengan uang, dan keuntungan yang diakui oleh debitur dalam kedua hal itu juga diterima berupa uang, kalau tidak ada perjanjian lain yang menyimpang.¹⁰³ Jadi, menurutnya kedua-duanya halal, tidak dimasukkan dalam kategori riba, asalkan tidak mengandung unsur eksploitasi.

Pandangan yang serupa dikemukakan Muhammad Hatta, mantan wakil presiden pertama itu dalam bukunya yang berjudul “*Islam dan Rente*” (*Beberapa Pasal Ekonomi: Jalan ke Ekonomi dan Bank*, Balai Pustaka, 1958), dengan jelas membedakan antara riba dan bunga bank yang ia sebut *rente*.

Bagi Hatta, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif.¹⁰⁴ Riba diharamkan karena dalam perbuatan tersebut akan menyebabkan kesengsaraan orang yang sedang mengalami kesulitan sedangkan *rente* sebagai sebuah kegiatan pinjaman yang produktif akan membantu pencapaian ekonomi. Dengan adanya pinjaman produktif itu seseorang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.

Pandangan yang mengatakan halalnya bunga bank juga dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo¹⁰⁵. Pembungaan uang

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ Dawam Rahardjo, “Ensiklopedi Riba”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, (Jakarta: LSAF, 1991), Vol II h. 45. Selanjutnya disebut “Ensiklopedi Riba”. Lihat pula, Dawam Rahardjo, “Transformasi” *op. cit.*, h. 49

¹⁰⁵ Kasman Singodimedjo adalah salah seorang aktivis penting dalam Partai Masyumi dan beberapa kali menjadi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia mendapat gelar Doktor *Honoris Causa* pada fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 1977. Ulasan lengkap tentang riwayat hidupnya;

yang dilakukan secara tidak resmi atau *renteinir* dikategorikan sebagai riba sedangkan pembunga uang yang dilakukan pemerintah melalui lembaga perbankan tidak masuk dalam kategori riba. Dia juga termasuk salah seorang yang menganjurkan diperlukannya lembaga perekonomian Islam dalam masyarakat Islam, seperti *bait al-mal* dan lembaga zakat, di samping perlu ada lembaga wakaf dan wasiat.¹⁰⁶

Lembaga-lembaga tersebut seharusnya dikelola oleh negara agar fungsi sosialnya dapat tercapai secara baik. Sebab lembaga perekonomian Islam, utamanya *bait al-mal* dan lembaga zakat merupakan stabilisator kesosialan atau kemasyarakatan.¹⁰⁷

Sejalan dengan itu pula, A. Hassan, pendiri Persis dan mempunyai pemikiran yang progresif, dalam bukunya *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba* (Percetakan Persatuan, Bangil, 1975) membicarakan persoalan riba yang menjadi kontroversi di kalangan umat Islam. Dalam bukunya, ia membedakan antara riba yang dilarang dengan yang diperbolehkan. Namun dalam aspek riba dan bunga ia tidak membuat perbedaan keduanya.

Menurutnya, bunga dan riba pada hakekatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasi'ah*, dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya yaitu sifat bunganya yang berlipat ganda, tanpa batas. Oleh karena itu, menurut A. Hassan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas hutang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur perlipat ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung

lihat Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman, *Hidup itu Berjuang: Kasman Singodimedjo 75 Tahun*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1982).

¹⁰⁶ Kasman Singodimedjo, *Renungan dari Tahanan*, (Jakarta: Permata, t.th.), h. 170-171

¹⁰⁷ *Ibid.*

unsur eksploitasi atau berlipat ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.

Argumen yang dikemukakan oleh A. Hassan didasarkan pada surat Ali ‘Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat eksploitatif, *ad‘afan muda‘afah*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salahsatu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti tingkat bunga yang terlalu tinggi.¹⁰⁸ Berbeda dengan A. Hassan, Dawam Rahardjo menilai kalau bunga bank itu diartikan sebagai tambahan maka tetap dikategorikan sebagai riba.¹⁰⁹

Pandangan yang mengharamkan bunga bank sebagai perbuatan yang masuk dalam kategori riba dikemukakan oleh A.M. Saefuddin, seorang tokoh yang *concern* terhadap wacana pembentukan dan praktek ekonomi Islam di Indonesia, di samping Karnaen Purwaatmadja, Amin Aziz, Murasa Sarkaniputra dan lainnya. Menurut Saefuddin, pelarangan riba merupakan bagian nilai-nilai instrumental sistem ekonomi Islam, di samping zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial, dan peran negara.¹¹⁰

Bagi A.M. Saefuddin, bunga identik dengan riba, olehnya itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutny:

“Bunga pinjaman uang, modal dan barang dengan segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan

¹⁰⁸ A. Hassan, *Riba: Beberapa Pembahasan Masalah Riba* (Bangil: Percetakan Persatuan, 1975. lihat pula, Dawam Rahardjo, “Ensiklopedi Riba”, *op. cit.*, h. 50

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 51

¹¹⁰ Penjelasan mendetail tentang nilai instrumental, nilai dasar, dan filsafat yang merupakan komponen dari sistem ekonomi Islam dalam pandangan A.M. Saefuddin; lihat A.M Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), h. 53-83

dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba”.¹¹¹

Pandangannya tentang bunga uang, sebagaimana ulama lainnya, didasarkan pada ayat tentang keharaman riba yang ada dalam Alquran seperti surat al-Baqarah (2): 275-280, Ali ‘Imran (3): 130; 30: 39, dan tentu saja diperkuat lagi dengan hadis Nabi. Secara *aqli* menurut A.M. Saefuddin, hakekat pelarangan riba (bunga bank) dalam Islam adalah fenomena penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual-beli yang dibebankan kepada salah satu pihak (debitur) saja sedangkan pada pihak yang lain (kreditur) dijamin keuntungannya. Tampaknya aspek keadilan tidak mendapat perhatian dan pertimbangan dalam transaksi semacam ini.

Pendapat yang sama juga dikemukakan Karnaen Purwaatmadja, seorang yang berjasa terhadap terbentuknya perbankan syariah di Indonesia. Menurutnya, bunga bank adalah haram dan keharamannya dianalogkan dengan keharaman minum minuman keras. Status keharamannya tidak bergantung sedikit atau banyaknya minuman itu, tapi terletak pada zat sendiri, secara *aini* memang hukumnya haram. Lebih jauh ia mengatakan bahwa keharaman bunga bank disamakan dengan riba bukan karena besar atau kecilnya prosentase tingkat bunga, tetapi oleh karena penerapan atau penggunaan sistem prosentase itu sendiri yang mengandung unsur melipat gandakan.¹¹²

Pendapat senada juga dikemukakan Murasa Sarkaniputra, bahwa keharaman bunga uang sudah jelas petunjuknya dalam ajaran agama Islam. Pelarangan bunga bank juga berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh para filosof, seperti Socrates dan

¹¹¹ *Ibid.*, h. 72

¹¹² Karnaen Purwaatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), h. 252

Aristoteles yang menilai bahwa “uang dianggap bagaikan ayam betina yang tidak bertelur”.¹¹³

Dilihat dari aspek ekonomi pun praktek bunga berimplikasi secara negatif kepada perkembangan ekonomi itu sendiri. Dalam praktek bunga ada pihak, kreditur, yang mengambil keuntungan tanpa memikul resiko. Ini berakibat bahwa si peminjam tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dengan tingkat bunga, sehingga menimbulkan krisis.¹¹⁴ Sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan internasional maupun nasional telah menimbulkan ketimpangan ekonomi seperti pembengkakan hutang luar negeri, semakin melebarnya jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin.¹¹⁵ Pengalaman hancurnya perbankan nasional semenjak dilanda krisis memperkuat argumen ini.

Bunga juga tidak membimbing ke arah pembentukan dan penanaman modal, investasi riil, karena bunga dijadikan mata pencaharian tanpa memandang pemberian pinjaman itu digunakan untuk sektor produksi mana. Uang bukan hanya sekedar sebagai alat pembayaran, tapi dijadikan komoditi. Memperkuat argumennya, A.M. Saefuddin meminjam kesimpulan Lord Keynes tentang bunga bank, sebagai berikut:

“Individu-individu itu tidak menyimpan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan, tetapi dengan tujuan untuk membentuk modal, sehingga bertambahlah kegiatan dunia spekulasi dengan tidak mengingat besarnya suku bunga karena keuntungan yang diperoleh lebih besar bila mereka mengeksploitir simpanannya. Suku bunga yang tinggi menyebabkan macetnya pasar atau terhentinya kegiatan industri dan lalu secara negatif mempengaruhi penerimaan yang merupakan sumber produksi”.¹¹⁶

¹¹³ Murasa Sarkaniputra, “Ulama, Uang, dan Utang”, dalam *Harian Umum Pikiran Rakyat*, Kamis-Jum’at 27-28 September 2001.

¹¹⁴ A.M. Saefuddin, *op. cit.*, h. 75

¹¹⁵ Karnaen Purwaatmadja, *op. cit.*, h. 252

¹¹⁶ A.M. Saefuddin, *op. cit.*, h. 76

Pandangan mengenai bunga bank dikemukakan oleh berbagai organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan lainnya. Organisasi-organisasi tersebut memberikan fatwa melalui lembaga-lembaga fatwa yang mempunyai otoritas dalam mengeluarkan fatwa dari masing-masing organisasi.

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjihnya, suatu lembaga yang ada dalam struktur organisasi Muhammadiyah yang menangani aspek hukum Islam dan memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, telah melakukan pengkajian dan memberikan fatwa yang menyangkut ekonomi dan keuangan di luar zakat, meliputi masalah perbankan.

Pada sidang Majelis Tarjih tahun 1968 dan 1972, Muhammadiyah mengeluarkan pendapat organisasi tentang perbankan dan persoalan yang berkaitan dengan bunga bank. Sedangkan yang berkaitan dengan bidang keuangan secara umum dikeluarkan pada tahun 1976, dan koperasi simpan pinjam tahun 1989.¹¹⁷

Muhammadiyah dengan tegas mengharamkan riba dalam praktek perekonomian umat Islam, namun masalah bunga bank dianggapnya sebagai *al-mas'alah al-ijtihadiyyat*, sebab bank merupakan lembaga keuangan yang baru, belum ada pada masa awal Islam.¹¹⁸ Sehingga keterkaitan antara bunga bank dengan riba yang diharamkan menjadi persoalan yang memerlukan ijtihad.

Dalam kaitan itu, Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum bunga bank dari bank-bank milik pemerintah hukumnya *syubhat*. Sedangkan bunga bank dari bank-bank milik swasta diharamkan. Keputusan ini diambil ketika sidang Majelis Tarjih di Sidoarjo tahun 1969, memutuskan sebagai berikut:

¹¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2001), h., 62

¹¹⁸ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), h. 121

1. Riba hukumnya haram dengan nash sharih Alquran dan sunnah.
2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *mutasyabihat*.¹¹⁹

Hukum *mutasyabihat* terhadap bunga bank milik pemerintah menurut pandangan Muhammadiyah didasarkan atas pertimbangan dalam sidang Majelis Tarjih tersebut, sebagai berikut:

Pertama, bahwa riba yang diharamkan dalam ajaran agama Islam adalah sifat pembungaan yang disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan, sedangkan yang berlaku dewasa ini sama sekali tak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang bersangkutan¹²⁰. Dan hal itu hanya mungkin berlaku pada bank milik pemerintah. Pandangan ini sesuai dengan konteks pada saat itu di mana tingkat suku bunga pada bank, khususnya bank pemerintah ditentukan pemerintah melalui undang-undang, nanti setelah lahirnya paket deregulasi 7 Juli 1988, tingkat suku bunga ditentukan oleh bank itu sendiri.

Kedua, bank negara dianggap badan yang mencakup hampir semua kebaikan dalam alam perekonomian modern dan dipandang memiliki norma yang menguntungkan masyarakat di dalam kemakmurannya. Bunga yang dipungut dalam sistem pengkreditannya sangat rendah sehingga sama sekali tak ada pihak yang dikecewakan.¹²¹

¹¹⁹ *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.th), cet ke-3, h. 304-306

¹²⁰ *Ibid.*, h. 305

¹²¹ *Ibid.* h, 306

Perbedaan keputusan hukum bunga bank pemerintah dan swasta tersebut berkaitan dengan misi yang diemban bank pemerintah berbeda dengan bank swasta, disamping tingkat suku bunga bank pemerintah lebih rendah dari bank swasta.

Keputusan Majelis yang berkaitan dengan hukum bunga koperasi simpan-pinjam dibahas pada sidang Majelis Tarjih Muhammadiyah di Malang tahun 1989. Majelis memutuskan bahwa koperasi simpan-pinjam hukumnya mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba. Asalkan tambahan pembayaran tersebut memperhatikan beberapa faktor, di antaranya tidak melampaui laju inflasi.¹²²

Walaupun demikian, sebagaimana pandangan para ulama, dan organisasi lainnya, Muhammadiyah tetap memandang riba jahiliyah sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah saw. sesuatu yang haram, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى (رواه مسلم)

Dari Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, jagung dengan jagung, gandum dengan gandum, korma dengan korma, garam dengan garam itu mesti seimbang dan sepadan, pun jual beli perak dengan perak mesti seimbang, dan barangsiapa yang menambah atau meminta tambah, termasuk riba (H.R. Muslim).¹²³

Menyikapi persoalan perekonomian umat Islam secara umum dan jamaah Nahdatul Ulama (NU) khususnya, tampaknya

¹²² Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 62-63

¹²³ Imam Muslim, *op. cit.*, h. 692

NU mempunyai perhatian di bidang itu, terutama yang berkaitan dengan status hukumnya. Organisasi yang menghimpun dan banyak diminati kaum ulama yang berbasis pesantren ini melalui Lajnah *Bahsul Masa'il* telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan masalah ekonomi tersebut sejak tahun 1927, satu tahun pasca berdirinya organisasi itu.

Dapat dikemukakan, mulai tahun 1927 sampai 1997, NU telah mengeluarkan keputusan masalah gadai, jual beli, dan hukuman untuk pekerja (1927); sewa, jual beli emas, pembelian rumah belum jadi (1930); penjualan dengan dua harga, upah penjualan melalui wakil, penjualan kulit binatang tidak halal dimakan (1932); penyewaan rumah kepada orang Majusi (1933); penyewaan tambak (1934); dana pasar malam untuk anak yatim (1935); larangan peminjaman oleh organisasi (1936); titipan uang di bank (1937); penyewaan pohon karet (1938); uang pasar malam untuk masjid, perseroan, pinjaman dari koperasi, waris untuk anak tertua (1939), menjual padi ditangkainya, perkebunan dengan uang haram, jual kontrak dengan tempo (1940); kas masjid sebagai *bait al-mal* (1954); gadai (1957), peternakan (1960); pertanahan (1961); akad indekost (1962); deposito bank (1971); uang mas, cek, obligasi, saham, surat berharga (1981); cek (1984); koperasi simpan pinjam (1987); menjual dengan berbagai harga, bursa efek, akad program tebu rakyat, dana siswa (1989), bank Islam (1992), akad TRI (1994), jual beli piutang, tanah anggunan, hak cipta (1997).¹²⁴

Keputusan yang berkaitan dengan bunga bank, NU telah beberapa kali melakukan sidang untuk membicarakan persoalan tersebut. Keputusan pertama diambil ketika sidang *bahsul al-masa'il* pada tahun 1927 di Surabaya. Pada sidang tersebut para ulama NU pendapat berkaitan bunga bank. Ada tiga pendapat

¹²⁴ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia: Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), h. 187

yang berkembang di kalangan peserta sidang menyikapi masalah itu, yaitu:

1. Pandangan yang mengatakan haram, sebab termasuk utang yang dipungut manfaatnya (rente)
2. Pandangan yang mengatakan halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad. Pandangan ini didasarkan pada pendapat ahli hukum bahwa adat yang berlaku itu tidak menjadi syarat.
3. Pendapat mengatakan bahwa bunga bank dikategorikan sebagai *syubhat*, sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentang hukum bunga bank.

Dengan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tersebut, akhirnya Lajnah *Bahsul Mass'il* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati adalah pendapat pertama, bunga bank hukumnya haram.¹²⁵ Lajnah tampaknya tidak memberikan keputusan yang tegas tentang keharaman dan kehalalan bunga bank, hanya memberikan semacam alternatif kepada para warga NU bahwa pandangan yang lebih hati-hati adalah haram.

Perbedaan pendapat tentang bunga uang di kalangan ulama NU terlihat sampai sidang Lajnah *Bahsul Masa'il* pada tahun 1982 di Bandar Lampung, sidang yang membahas secara lengkap masalah bunga bank dan perbankan syariah. Beberapa poin penting yang berkaitan dengan bunga bank yang diputuskan, yaitu:

1. *Pertama*, pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
2. *Kedua*, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
3. *Ketiga*, pendapat yang menyatakan hukumnya *syubhat*.

¹²⁵ A. Azis Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Muktamar dan Munas Ulama Nahdatul Ulama*, (Surabaya: Dinamika Press, 1997), h. 21

Walaupun secara umum ada tiga pendapat dari para ulama NU yang menjadi peserta dalam sidang lajnah tersebut tentang hukum bunga bank, namun dari masing-masing tiga kelompok itu, terutama pertama dan kelompok kedua, terjadi pula perbedaan pendapat.

Kelompok pertama dapat diidentifikasi terdapat tiga pendapat:

1. Bunga bank itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram
2. Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, bunga itu dapat dipungut sementara, sebelum beroperasinya sistem perbankan yang islami yang tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya.
3. Bunga itu sama dengan riba, dan tentu hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat.

Sementara itu, pendapat kelompok kedua dapat digolongkan pada beberapa pendapat, yaitu:

1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram. Sedangkan bunga produktif tidak sama dengan riba sehingga hukumnya halal.
2. Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan di bank hukumnya boleh.
4. Bunga bank tidak haram, kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.¹²⁶

Tampaknya sebagaimana yang dialami organisasi keislaman lainnya di Indonesia, para ulama NU berbeda pendapat

¹²⁶ *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konperensi Besar Ulama di Bandar Lampung*, (Jakarta: PBNU, t.t), h. 12-14. Lihat pula, A. Azis Masyhuri, *op. cit.*, h. 368-370, Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, h. 191-192

dalam masalah bunga bank. Perbedaan itu akan dapat dicari titik temunya dengan mendirikan bank syariah yang bebas dari sistem bunga.

Sidang membahas masalah bunga bank juga dilakukan Majelis Ulama Sumatera Utara bersama yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara pada tahun 1985. Sidang tersebut mencoba melakukan pengkajian ilmiah tentang riba dan bunga bank yang menjadi kontroversi dalam masyarakat. Forum sidang menghasilkan beberapa keputusan penting:

1. Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan non bank adalah salah satu sub sistem dari sistem ekonomi dewasa ini yang sulit dapat dihindari.
2. Riba yang sifatnya *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda) adalah hukumnya haram, sesuai dengan nash yang sahih dari Alquran dan sunnah.
3. Bunga bank adalah masalah yang masih berbeda pendapat para ulama; pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba
 - b. Membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba, yang diharamkan oleh syariat Islam
 - c. Bunga bank adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarkannya, maka dibolehkan (karena dianggap darurat).¹²⁷

Hasil pengkajian tersebut tampaknya tidak memberikan kesimpulan atau fatwa menyangkut hukum bunga bank, tapi hanya mengklasifikasi pandangan tentang hukum bunga bank.

¹²⁷ Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara dan Yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara, *Riba dan Bunga Bank*, (Medan: Kesimpulan Muzakarah dan Pengkajian Ilmiah tanggal 2 dan 16 Juni 1985, 1986), h. 7

Kontroversi ini berlanjut sampai tahun 1990 ketika MUI pusat melakukan lokakarya bunga bank dan perbankan yang memutuskan perlu adanya perbankan Islam sebagai solusi atas perbedaan pendapat umat Islam dalam masalah bunga bank. Sebab salahsatu alasan perbedaan pendapat dalam masalah bunga bank karena belum adanya alternatif sistem perbankan selain perbankan dengan sistem bunga yang berlaku di Indonesia. Di satu sisi umat Islam dihadapkan pada ajaran agama yang melarang praktek riba, sedangkan pada sisi lain umat Islam di Indonesia membutuhkan dana dari bank untuk menata kehidupan ekonominya yang notabene beroperasi dengan sistem bunga. Kondisi ini dalam pandangan Zainul Arifin membuat “ulama ‘ragu-ragu’ dalam mengambil keputusan tentang bunga bank sehingga wajar ada ulama mencari legitimasi untuk kepentingan umat”.¹²⁸

Apabila diperhatikan perbedaan pendapat tentang hukum bunga bank seperti yang telah diuraikan di atas, sebenarnya perbedaan tersebut tidak perlu terjadi. Sebab dalam Alquran, Allah swt. telah menggambarkan keharaman riba dan segala bentuk yang terkait dengan riba. Hal tersebut dipahami dari surat al-Baqarah (2): 278-279, yaitu ayat yang terakhir tentang keharaman riba. Jadi larangan itu bersifat menyeluruh yang berkaitan dengan segala aspek yang berkaitan dengan riba, termasuk sisa riba yang telah dilaksanakan.

Dengan demikian, pandangan yang membedakan antara hukum bunga bank dengan *woeker*, kurang tepat. Sebab yang diharamkan oleh Allah swt. dalam Alquran bukan sedikit atau banyaknya riba, tapi hukum dasar dari riba itu sendiri yang diharamkan. Hal yang sama juga terjadi dalam keharaman minum minuman keras. Keharamannya bukan sedikit atau banyaknya kandungan *khmar* dalam minuman keras, tapi keharaman yang terkait dengan zat minuman itu sendiri.

¹²⁸ Wawancara dengan Zainul Arifin tanggal 12 September 2002 di Jakarta.

Baik riba maupun bunga bank mempunyai unsur yang sama, yaitu sama-sama mengandung unsur eksploitatif, *ad'afan muda'afah*. Bunga yang dipraktekkan dalam dunia modern sekarang tetap mengandung unsur eksploitasi. Hal itu dilihat, misalnya kreditur tidak akan menanggung sedikitpun resiko dari kredit yang dikeluarkannya, sementara debitur akan menanggung semuanya dan bahkan kalau tidak dapat membayar bunga saat jatuh tempo akan menambah jumlah utangnya. Sistem bunga juga akan berakibat semakin tingginya biaya produksi, sebab semakin tinggi suku bunga semakin tinggi juga harga yang ditetapkan terhadap suatu barang.¹²⁹

Sementara itu, argumen yang membedakan antara hukum bunga bank pemerintah dan bank swasta dalam konteks undang-undang perbankan yang baru tidak relevan lagi. Sebab bunga bank, baik yang berlaku pada bank pemerintah maupun bank swasta ditentukan oleh bank yang bersangkutan, sesuai dengan mekanisme pasar. Bisa jadi tingkat suku bunga pada bank pemerintah lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga pada bank swasta.

Dengan demikian, kehadiran bank syariah dalam sistem perbankan nasional perlu diwujudkan dalam rangka menghilangkan atau paling tidak meminimalisir perbedaan pendapat di kalangan umat Islam Indonesia. Keberadaan bank syariah, terutama bagi mereka yang menganggap riba sebagai *syubhat* karena belum adanya perbankan syariah dapat diakomodasi. Bank syariah juga mempunyai peran penting bagi pengembangan perekonomian umat Islam di Indonesia.

¹²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 67

BAB V

KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN

A. Konsep Dasar Uang

Uang merupakan alat pembayaran yang dilakukan oleh semua kalangan didunia, tanpa uang kita tidak dapat membeli sesuatu. Sebelum adanya uang, transaksi yang dilakukan adalah barter atau menukar barang sesuai dengan jumlah barang yang dibutuhkan. Uang memang sangat penting dimana pun, sehingga tanpa uang kita tidak dapat melakukan transaksi jual beli, bahkan ada pepatah mengatakan”ada uang ada barang”.

Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses penukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern menurut RG Thomas dalam bukunya *Our Modern Banking*, menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran uang.

Uang dalam produksi, memproduksi dan menjual barang dan jasa sehingga menerima keuntungan dalam bentuk uang pada investasi kapitalnya. Bila keuntungan diperoleh dengan mudah, misal pada masa makmur, jumlah uang yang ditanamkan pada pabrik-pabrik dan peralatan baru meningkat. Investasi ini menguntungkan bagi masyarakat karena adanya aliran barang-barang dan jasa-jasa dipasar yang semakin meningkat. Uang juga penting dalam pertukaran dan konsumsi. Pendapatan konsumen dalam bentuk upah, gaji, dan sewa, memudahkan mereka untuk

memenuhi keinginannya dengan menukarkan uang tersebut dengan barang-barang dan jasa-jasa. Kelancaran daripada sistem pertukaran uang ini meningkatkan standar hidup masyarakat sebagaimana dengan meningkatnya produksi dan selanjutnya dipasarkannya untuk ditukarkan dengan uang. Tidak kalah pentingnya dalam masyarakat, umumnya masyarakat menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa, dimana ini menjamin kesediaan masyarakat dalam menukarkan uangnya dengan barang dan jasa. Sehingga setiap orang puas pada pekerjaannya yang sudah sesuai untuk mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang. Pembagian spesialisasi (tugas) merupakan ciri khas daripada masyarakat modern yang akan meningkatkan produksi, pertukaran dan kesejahteraan masyarakat.

B. Ciri-Ciri dan Jenis Uang

Ciri-ciri dari alat tukar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dapat diterima umum dan nilainya stabil (acceptability)
2. Mudah dibawa dan ditukarkan (portability)
3. Tahan lama awet dan tidak mudah ditiru (durability)
4. Dapat di bagi dalam unit yang lebih kecil (devisibility)
5. Jumlah yang mencukupi untuk transaksi (elasticity of supply)
6. Memiliki nilai yang cenderung stabil (stability of value)
7. Kualitasnya cenderung sama (uniformity)
8. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (scarcity).

Adapun jenis-jenis uang yang biasa digunakan dalam perekonomian dapat dibagi menjadi lima kategori:

1. Berdasarkan bahan (metrial)

Uang logam dan uang kertas , yang dibuat oleh Bank Central. Di Indonesia yang berhak menciptakan uang kartal adalah Bank Indonesia. Uang karta merupakan alat pembayaran yang sah dalam melakukan transaksi ekonomi. Jadi masyarakat wajib menerima pembayaran jika transaksi menggunakan uang kartal.

Sedangkan uang giral atau uang bank merupakan uang yang diciptakan oleh bankbank umum atau bank perdagangan. Yang termasuk dalam uang giral misalnya traveller's check, rekening giro, rekening deposito. Uang giral sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran. Uang giral bukan merupakan alat pembayaran yang sah. Jadi masyarakat dapat menolak jika transaksi dibayar uang giral.

2. Berdasarkan nilainya

- a. Uang bernilai penuh, nilai yang tertera diatas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal sama dengan nilai instrinsik. Jika uang tersebut terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya.
- b. Uang yang terkandung nilai instrinsik sama dengan nilai nominalnya.
- c. Uang yang tidak bernilai penuh (representative full bodied money), uang ini terbuat dari kertas, dengan demikian nilainya sebagai barang tidak ada (nol). Uang jenis ini hanya mewakili dari sejumlah barang/logam dimana nilai logam sebagai barang sama dengan nilainya di AS sebelum ditarik pada tahun 1933.
- d. Token money yang yang tertanda, artinya uang yang nilai instrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya.

3. Berdasarkan lembaga/badan pembuatnya

- a. Uang karta (uang yang dicetak/dibuat dan diedarkan oleh Bank Central).
- b. Uang giral (uang yang dibuat dan diedarkan (diinovasi) oleh bank-bank umum (komersial) dalam bentuk Demand Deposit (Check) untuk memudahkan transaksi. Disebut Demand Deposit artinya saldo rekening koran

yang ada di Bank dan sewaktu-waktu dapat digunakan. Uang giral merupakan uang sah secara ekonomi, namun secara hukum tidak, artinya hanya berlaku pada kalangan tertentu saja sehingga orang yang menolak pembayaran dengan uang giral contohnya cek tidak dapat dituntut. Untuk mengambil uang giral dapat digunakan check dan giro.

4. Berdasarkan kawasan/daerah
 - a. Uang domestik (uang yang berlakunya hanya disuatu negara tertentu, diluar negara tersebut mungkin tidak berlaku).
 - b. Uang international (uang yang berlaku tidak hanya pada suatu negara tetapi mungkin diakui dan berlaku di seluruh dunia).
5. Berdasarkan tingkat likuiditas
 - a. M1 adalah uang kertas dan logam ditambah simpanan dalam bentuk rekening koran (deman deposit).
 - b. M2 adalah M1 + tabungan + deposito berjangka (time deposito) pada bank-bank umum.
 - c. M3 adalah M2 + tabungan _ deposito berjangka pada lembaga-lembaga tabungan nonbank.¹³⁰

C. Konsep Uang Dalam Islam

Dalam sejarah Islam, uang merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia. Perihal dalam al-Qur'an dan Hadis dua logam mulia ini, emas dan perak telah disebutkan baik dalam fungsinya sebagai

¹³⁰ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta: Indeks, 2008), 13-18.

mata uang atau sebagai harta lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya QS at-Taubah ayat 34 disebutkan:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.

Ayat tersebut menjelaskan, orang-orang yang menimbun emas perak, baik dalam bentuk mata uang maupun dalam bentuk kekayaan biasa dan mereka tidak mau mengeluarkan zakatnya akan diancam dengan azab yang pedih. Artinya, secara tidak langsung ayat ini juga menegaskan tentang kewajiban zakat bagi logam mulia secara khusus. Lalu dalam QS. Al-Kahf ayat 19 Allah berfirman:

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ
بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ
أَحَدًا

“ dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun”.

Ayat itu menceritakan kisah tujuh pemuda yang bersembunyi di sebuah gua (Ash-habul Kahf) untuk menghindari penguasa yang zalim. Mereka lalu ditidurkan Allah selama 309 tahun. Ketika mereka terbangun dari tidur panjang itu salah seorang dari mereka diminta oleh yang lain untuk mencari makanan sambil melihat keadaan. Utusan dari para pemuda itu membelanjakan uang peraknya (*wariq*) untuk membeli makanan sesudah mereka tertidur selama 309 tahun. Al-Qur'an menggunakan kata *wariq* yang artinya adalah uang logam dari perak atau dirham.

Selain ayat diatas al-Qur'an juga menceritakan kisah Nabi Yusuf yang dibuang kedalam sumur oleh saudara-saudaranya. Yusuf kecil lalu ditemukan oleh para musafir yang menimba air di sumur tersebut, lalu mereka menjual Yusuf sebagai budak dengan harga yang murah yaitu beberapa *dirham* saja. Dengan jelas ayat ini menggunakan kata-kata *dirham* yang berarti mata uang logam dari perak. Dari cerita yang diungkapkan oleh al-Qur'an ini jelaslah bahwa pengangguran dua logam mulia (bimetalisme)

sebagai mata uang telah dilakukan oleh manusia sejak ribuan tahun sebelum kelahirannya Nabi Muhammad Saw.¹³¹

Selain dirham, masyarakat Arab sebelum Islam juga telah mengenal dinar, mata uang yang terbuat dari emas. Dinar dan dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar jazirah Arab. Para pedagang kalau pulang dari Syam, mereka membawa dinar emas Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa dirham perak Persia (Sassanid). Kadang-kadang mereka juga membawa dirham Himyar dari Yaman. Jadi, pada masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk negeri Hijaz. Mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khalifah Utsmaniyah di Turki pasca-Perang Dunia I.¹³²

Disamping disebutkan dalam al-Qur'an, dinar dan dirham juga disebutkan dalam banyak sekali Hadis Nabi Muhammad Saw. Kadang-kadang Hadis menggunakan kata *wariq* untuk menyebutkan uang logam. Rasulullah Saw bersabda:

“Dinar dengan Dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan Dirham dengan Dirham dan tidak ada kelebihan diantara keduanya (jika dipertukarkan)”.
(HR. Muslim).

Dinar dan Dirham yang digunakan orang Arab waktu itu tidak didasarkan pada nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya. Jadi Dinar dan Dirham ketika itu hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak saja. Boleh jadi teknologi ketika itu belum mampu membuat cetakan standar yang konstan beratnya, sesuai dengan nominalnya. Untuk mengukur beratnya, masyarakat Arab menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu: *auqiyah, nasy, nuwah, mitsqal, daniq,*

¹³¹ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 92.

¹³² Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Makro Islam*.

qirath, dan *habbah*. Mitsqal merupakan berat pokok yang sudah diketahui umum, yaitu setara dengan 22 qirat kurang 1 habbah. Dikalangan mereka, berat 10 Dirham sama dengan 7 mitsqal. Kaum muslimin terus menggunakan Dinar Romawi dan Dirham Persia dalam bentuk cap, dan gambar aslinya semasa Rasulullah Saw. dan pada masa awal ke khalifahan Umar bin Khattab.¹³³

Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 20 Hijriyah, memerintahkan mencetak uang Dirham baru berdasarkan pola Dirham Persia. Berat, gambar, maupun tulisan *Bahlawinya* (huruf Persia) tetap ada, hanya ditambah dengan lafaz yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi, seperti lafaz *Bismillah* dan *Bismillah Rabbi* yang terletak pada tepi lingkaran. Pada saat itu Khalifah Umar memperkerjakan ahli pembukaan dan akuntan orang Persia dalam jumlah besar untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran di Baitul Mal (keuangan negara). Umar pernah berkeinginan mencetak uang dari kulit, namun dibatalkan karena tidak disetujui oleh para sahabat yang lain. Mata uang khalifah Islam yang mempunyai kecurian khusus baru dicetak oleh pemerintah Imam Ali r.a. namun peredarannya sangat terbatas karena keadaan politik saat itu.¹³⁴

Pada zaman Muawiyah, mata uang dicetak dengan gaya Persia dengan mencantumkan gambar dan pedang gubernurnya di Irak. Ziyad juga mengeluarkan Dirham dengan mencantumkan nama khalifah. Cara yang dilakukan Muawiyah dan Ziyad yaitu pencantuman gambar dan nama kepala pemerintah pada mata uang masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk juga di Indonesia. Mata uang yang beredar pada waktu itu berbentuk bulat seperti uang logam sekarang ini. Baru pada zaman Ibnu Zubair dicetak untuk pertama kalinya mata uang dengan bentuk bulat, namun peredarannya terbatas di Hijaz. Sedangkan Mus'ab, gubernur di

¹³³ Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 246.

¹³⁴ Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.

kufah mencetak uang dengan gara Persia dan Romawi. Pada tahun 72-74 Hijriah, Bisr bin Marwan mencetak mata uang yang disebut *Athawiya*. Sampai dengan zaman ini mata uang khalifah beredar bersama dengan Dinar Romawi, Dirham Persia, dan sedikit *Himyarite* Yaman. Barulah pada zaman Abdul Malik (76 H) pemerintah mendirikan tempat percetakan uang di Daar Idjard, Suq ahwaj, Sus, Jay, Manadar, Maysan, Ray, Abarqubadh, dan mata uang khilafah dicetak secara terorganisir dengan kontrol pemerintah.¹³⁵

Pada masa Abdul Malik bin Marwan itu, Dirham dicetak dengan bercorak Islam. Terdapat lafaz-lafaz Islam yang ditulis dengan huruf Arab gaya Kufi pada Dirham tersebut. Ketika itu Dirham Persia tidak digunakan lagi. Dua tahun kemudian (77 H/697 M) Abdul Malik bin Marwan mencetak Dinar khusus yang bercorak Islam setelah meninggalkan pola Dinar Romawi. Gambar-gambar Dinar lama diubah dengan tulisan atau lafaz-lafaz Islam, seperti: *Allahu Ahad*, *Allahu Baqa'*. Sejak itulah orang Islam memiliki Dinar dan Dirham Islam yang secara resmi digunakan sebagai mata uangnya.¹³⁶

Nilai uang ditentukan oleh beratnya. Mata uang Dinar mengandung emas 22 karat, dan terdiri dari pecahan setengah Dinar dan sepertiga Dinar. Pecahan yang lebih kecil didapat dengan memotong uang. Imam Ali r.a misalnya pernah membeli daging dengan memotong 2 karat dari Dinar (HR. Abu Daud). Dirham terdiri atas beberapa pecahan *nash* (20 Dirham), *nawat* (5 Dirham), dan *sha'ira* (1/60 Dirham).¹³⁷

Nilai tukar Dinar-Dirham relatif stabil pada jangka waktu yang panjang dengan kurs Dinar-Dirham 1:10. Pada saat itu perbandingan emas-perak 1:7, sehingga 1 Dinar 20 karat setara

¹³⁵ Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 247.

¹³⁶ Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.

¹³⁷ Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.

dengan 10 Dinar 44 karat. Reformasi moneter pernah dilakukan oleh Abdul Malik yaitu Dirham diubah menjadi 15 karat dan pada saat yang sama Dinar dikurangi berat emasnya dari 4,55 menjadi 4,25 gram. Di zaman Ibnu Fukih (289 H), nilai Dinar menguat menjadi 1:17, namun kemudian stabil pada kurs 1:15. Setelah reformasi moneter Abdul Malik, ukuran-ukuran nilai adalah sebagai berikut: satu Dinar 4, 25 gram, satu Dirham 3,98 gram, satu uqiyyah 40 Dirham, satu mitsqal 22 karat, satu ritl (liter) 12 uqiyyah setara dengan 90 mitsqal, satu qits 8 ritl setara dengan setengah sa', satu qafiz 6 sa' setara seperempat artaba, satu wasq 60 sa' satu jarib 4 qayiz.¹³⁸

Seribu tahun kemudian, kurs 1:15 ini juga berlaku di Amerika di tahun 1792-1834 M. Berbeda dengan langkah yang diambil Abdul Malik dengan reformasi moneternya Amerika tetap mempertahankan kurs ini walaupun di negara-negara Eropa nilai mata uang emas menguat pada kristen kurs 1:15,5 sampai 1:16,6. Walhasil, mata uang emas mengalir keluar dan mata perak mengalir masuk ke Amerika. Kejadian ini yang dikatakan oleh Tohams Gresham (1519-1579 M) sebagai “*bad money drives out good money*” atau kualitas buruk akan menggantikan uang kualitas baik.¹³⁹

Mayoritas sarjana Islam menegaskan bahwa fungsi uang tetap sebagai media pertukaran harus digantikan dengan media lain yang lebih wajar dan adil, terutama emas. Satu keuntungan yang pemerintah dapat yaitu tidak memeriksa semua pengawasan diatas itu sebagaimana kasus uang kertas. Pemerintah tidak lagi perlu mengeluarkan emas lebih banyak dari yang tersedia sebagaimana mata uang kertas, dimana pemerintah dapat mencetak lebih banyak apabila diinginkan. Lagi pula, berapa biaya

¹³⁸ Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 248.

¹³⁹ Lihat Hylmun Izhar, *Uang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002. Dalam Mustafa Edwin Nasutin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, 248.

untuk mencetak uang kertas? Nilai emas hanya akan berubah ketika tambang emas baru ditemukan tapi hal itu juga tidak akan terlalu menjadi perubahan yang besar. Selain dari itu, nilai emas akan lebih cepat stabil setelah beberapa periode.

Keuntungan kedua dari emas adalah tidak akan adanya *riba al-fadhuly* (bunga dengan komoditas ekstra) karena pemerintah tidak dapat lagi mempengaruhi perputaran emas. Bagaimanapun, kesempatan pemanfaatan akan tetap ada karena koin emas mungkin akan diabaikan. Merendahkan koin emas berarti nilai kandungan emas dalam koin itu akan lebih sedikit dari yang tertera pada bagian depan koin tersebut. Bentuk pemanfaatan emas umumnya terjadi dimana saat itu emas masih digunakan. Pangeran atau raja akan mengurangi jumlah (kandungan emas) koin tersebut dan mencurangi rakyatnya. Kemudian dia akan menyimpan sejumlah (kandungan) emas tadi dalam kekayaan kerajaan untuk kepentingan dan kesenangan pribadinya. Maka dari itu, apabila pada bagian depan koin tertera 1.00 ons, pada kenyataannya itu hanya terkandung sekitar 0.8 ons.¹⁴⁰

Permasalahan ini harus diselesaikan sebelum ada yang memutuskan untuk kembali menggunakan dinar emas. Jika tidak, pemanfaatan yang sama seperti dalam kasus uang kertas akan muncul lagi. Dalam situasi seperti itu, semua tujuan dinar atau koin emas dapat dihancurkan. Solusinya, dapat diatasi dengan menugaskan badan audit untuk memeriksa koin mas apakah telah mencantumkan kandungan emas pada koin tersebut atau tidak. Hal ini sama seperti departemen pengawas kualitas (QC) pada suatu perusahaan yang mengecek apakah produknya telah sesuai dengan standar atau tidak.¹⁴¹

¹⁴⁰ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009), h. 128-129.

¹⁴¹ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, h. 129.

Keputusan untuk kembali pada standar emas tidak dapat dilakukan apabila hanya satu Negara yang menggunakannya. Harus diambil dengan langkah pemungutan suara yang bulat oleh umat Muslim diseluruh dunia. Masalah pertama adalah, apakah negara lain akan menggunakannya juga atau tidak. Lagipula, hal ini pasti akan membutuhkan dukungan negara yang turut ikut serta untuk mengenalkan uang emas sebagai mata uang.

Sejauh ini di Indonesia yang memiliki pergerakan menggunakan standart emas dan perak yang menjadi Dinar Dirham sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran, yakni Zaim Saidi. Beliau masih dan terus memperjuangkan Dinar Dirham sebagai alat tukar di Indonesia nantinya.

D. Peran Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Pengalihan Aset (Asset Transfer)

Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk “janji-janji untuk membayar” atau dapat di artikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan asset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu asset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu asset disebut transmutasi kekayaan atau asset transimutation.

2. Likuiditas (Liquidity)

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas dibeli sektor usaha dan rumah tangga terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, yang diterbitkan

bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan.

3. Realokasi Pendapatan (Income Reallocation)

Dalam kenyataannya di masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya; tanah, rumah dan sebagainya. Namun kepemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama.

4. Transaksi (Transaction)

Sekuritas sekunder (tabungan, giro, deposito) yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk yang ditawarkan oleh bank, dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian transaksi barang dan jasa di samping untuk memperbaiki posisi likuiditas bank. Di sini, dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi yaitu memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter yang terjadi.¹⁴²

¹⁴² Iswardo, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1999).



BAB VI

BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Bank secara etimologis berasal dari bahasa Italia, *banco*, yang artinya “kepingan papan tempat buku”, sejenis “meja”.¹⁴³ Kemudian penggunaannya lebih diperluas untuk menunjukkan “meja” atau diartikan dengan “bangku”¹⁴⁴ tempat penukaran uang, yang digunakan oleh para pemberi pinjaman dan para pedagang valuta di Eropa pada abad Pertengahan untuk memamerkan uang mereka.

Dari kata *banco* inilah berkembang terus menjadi istilah bank yang berkembang di era modern sekarang. Istilah ini pun, oleh para ekonom berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. B. N. Ajuha mendefinisikan bank sebagai:

*“Bank provide means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provide which channel to invest without any risk and at a good rate of interest.”*¹⁴⁵

Bank berarti menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakannya secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan

¹⁴³ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), cet. ke-2, h. 1

¹⁴⁴ Malayu S.P. Hasibuan, *Teori dan Praktek Kegiatan Operasional Bank*, (Jakarta: PT. Citra Haji Masagung, 1996), h. 3

¹⁴⁵ *Ibid.*, h. 3

tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.

Tampaknya definisi yang dikemukakan B.N. Ajuha di atas, lebih menekankan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang menyalurkan dana tersebut untuk usaha yang lebih produktif. Di samping menekankan bank sebagai lahan untuk investasi karena jaminan keamanan dan suku bunga yang menarik. Bunga menjadi faktor bagi seseorang untuk menginvestasikan uangnya. Semakin tinggi tingkat suku bunganya semakin menarik masyarakat menginvestasikan uangnya.

Definisi lain dikemukakan oleh Malayu S. P. Hasibuan:

“Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul uang, dan pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilitas moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian”.¹⁴⁶

Tampaknya definisi yang kedua lebih lengkap dibanding definisi yang pertama, sebab bank sebagaimana umumnya adalah sebuah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Di samping melakukan usaha-usaha lain dalam bidang jasa perbankan untuk mendapat *fee* dari nasabahnya, seperti tranfer uang dan lainnya, bank juga dapat berfungsi sebagai stabilisator moneter, terutama bank sentral.

Namun bank dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁴⁷ Jadi, bank tidak hanya berfungsi mengejar keuntungan person atau kelompok, tapi lebih dari itu, bank harus mempunyai komitmen dan usaha pada peningkatan kualitas ekonomi masyarakat umum.

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 2

Pengertian bank syariah dapat dilihat dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.¹⁴⁸

Berangkat dari berbagai definisi di atas, maka bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dan menyalurkan dana, dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan.¹⁴⁹ Bank syariah merupakan unit sistem ekonomi Islam yang beroperasi dengan doktrin dasar larangan terhadap praktek riba.

Dalam konteks perbankan nasional Indonesia, bank Islam diistilahkan dengan Bank Umum¹⁵⁰ atau Bank Perkreditan Rakyat¹⁵¹ yang pembiayaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau

¹⁴⁸ Pasal 1 ayat 7 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁴⁹ Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), h. 4. Selanjutnya disebut "Islam dan Transformasi"

¹⁵⁰ Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang 10 tahun 1998, bank umum dibedakan dua macam, yaitu bank umum konvensional dan umum dengan prinsip syariah.

¹⁵¹ Bank Perkreditan Rakyat juga dibedakan dalam dua jenis, yaitu Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan sistem konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah; antara lain: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*murabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).¹⁵²

B. Tujuan Bank Syariah

Ada beberapa pandangan tentang tujuan bank syariah didirikan. Secara garis besar pandangan itu dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu pandangan yang dikemukakan oleh para teoritis dan praktisi ekonomi syariah.

Menurut para teoritis ekonomi Islam, sebagaimana yang diungkap Sutan Remy Sjahdeini, dikutipnya dari, *Handbook of Islamic Banking*, perbankan syariah adalah perbankan yang menyediakan fasilitas dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Perangkat-perangkat tersebut bertujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan sosio ekonomis bagi orang-orang muslim, bukan semata-mata ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh, sebagaimana yang menjadi tujuan perbankan konvensional.¹⁵³ Komitmen akan pembangunan dan kemajuan bagi masyarakat muslim menjadi tujuan utama keberadaan perbankan syariah. Tidak heran jika *Islamic Development Bank* (IDB) mengkhususkan diri bagi pembangunan negara-negara Islam.

¹⁵² Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 ayat (13)

¹⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Nasional*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 21

Pandangan yang mirip dikemukakan oleh M. Umer Chapra, menurutnya perbankan syariah bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oleh karenanya, perbankan syariah harus sungguh-sungguh dalam menyiapkan berbagai perantarnya yang menekankan bahwa pembiayaan yang disediakannya tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan atau meningkatkan konsumsi.¹⁵⁴ Ia sangat menekankan adanya keseimbangan dan keadilan dalam berbagai pembiayaan yang berlaku dalam perbankan Islam, sehingga kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam dapat dieliminir, kalau tidak dapat dihapuskan.

Sebaliknya para praktisi ekonomi syariah atau bankir syariah menganggap bahwa peranan perbankan syariah semata-mata bertujuan untuk komersial dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial.¹⁵⁵ Ini berarti bahwa para bankir syariah menganggap bahwa perbankan syariah bukan sebagai lembaga sosial semata. Hal ini didasarkan pada pandangan Abdul Halim Ismail, Manager Bank Islam Malaysia Berhad, mengemukakan: “sebagai seorang bisnis muslim patuh, tujuan saya sebagai manager dari bank tersebut (Bank Islam Malaysia Berhad) adalah semata-mata mengupayakan setinggi mungkin keuntungan tanpa menggunakan instrumen keuangan yang berdasarkan bunga”.¹⁵⁶

Namun demikian, menurut penulis, tidak berarti bahwa para bankir syariah menganggap bahwa bank syariah adalah sebuah lembaga yang hanya berorientasi pada profit semata tanpa

¹⁵⁴ M. Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, (London: The Islamic Foundation, 1985), h. 173. Selanjutnya disebut “Toward”

¹⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, h. 22

¹⁵⁶ Keterangan tersebut berdasarkan hasil wawancara oleh Kazarian. Lihat Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation in Egypt*, (Boulder: Westview Press, 1993), h. 55.

memperhatikan aspek kepedulian kepada perkembangan masyarakat Islam. Sebab kalau sebuah perbankan didasarkan pada sistem dan norma-norma Islam maka ia harus tunduk dan patuh kepada semua aturan yang berlaku dalam ajaran Islam. Maka salah satu dari ajaran Islam adalah kepedulian dan adanya komitmen yang kuat untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi.

Terlepas dari pandangan di atas, UU No. 21 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa fungsi bank syariah tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tapi juga dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Fungsi sosial bisa dalam bentuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).¹⁵⁷

C. Bebas Bunga sebagai Prinsip Dasar Bank Syariah

Bank syariah adalah bank¹⁵⁸ yang beroperasi dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dalam sistem operasionalnya. Prinsip ini yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank syariah dengan konvensional. Kelahiran bank syariah sendiri, baik di dunia Islam umumnya atau di Indonesia sendiri tidak terlepas dari pandangan tentang keharaman bunga bank. Bank syariah lahir sebagai solusi terhadap praktek membungakan uang dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Bagi bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik minat para investor menginvestasikan modalnya

¹⁵⁷ Pasal 4 ayat 1, 2, dan 3 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

¹⁵⁸ Penjelasan mendetail tentang keharaman riba dan bunga akan dibahas pada bab berikutnya.

pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur penting dalam sistem perbankan konvensional. Bank syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melakukan transaksi dengan menggunakan sistem, misalnya *profit and loss sharing*, yaitu sistem bagi hasil. Keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak, *mudharib* dan *sahib al-mal*.

Sistem tersebut telah dikenal dan dipraktekkan dalam dunia perdagangan Islam sejak zaman Rasulullah saw. sampai dengan abad ke-19, sebelum dunia Islam berkenalan dan berada dalam kendali penjajahan Barat yang memperkenalkan sistem bunga bank. Namun demikian, tidak berarti bahwa setelah itu sistem bagi hasil dihapus dalam praktek perdagangan umat Islam. Sebab dalam berbagai kasus terutama masyarakat yang mempunyai tradisi keislaman yang kuat, tetap mempertahankan sistem bagi hasil dalam praktek perdagangannya.

Memang dalam sistem bunga bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil. Perbedaan yang pokok adalah sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang oleh agama Islam¹⁵⁹, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.

Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negative spread*,¹⁶⁰ pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan di pihak lain bunga kredit

¹⁵⁹ Di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, apakah bunga termasuk dalam kategori riba atau tidak. Ini lah yang menjadi sumber perbedaan pandangan ulama tentang bunga. Mengenai perbedaan ini akan dijelaskan pada bab berikutnya

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, h. 21

dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

Penentuan bunga dibuat pada waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap akan dilakukan, misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.¹⁶¹ Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.¹⁶² Dengan demikian, fungsi pengawasan dalam sistem perbankan syariah sangat penting.

Oleh karena itu pula, perbankan syariah dirancang untuk terbinanya hubungan kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik modal yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.

D. Sejarah Pendirian Bank Syariah di Indonesia

Ide pendirian Bank syariah di negara-negara Islam tidak terlepas dari kontroversi seputar praktek bunga bank yang dilakukan pada bank-bank konvensional yang beredar di negara-negara Barat sendiri, sebagai awal praktek semacam itu, maupun di negara-negara Islam sendiri. Apakah bunga bank itu masuk

¹⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 61

¹⁶² *Ibid.*

dalam kategori riba atau tidak, telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Namun di sini penulis ingin mengetengahkan bahwa praktek bunga dalam dunia perdagangan dan investasi di negara-negara Islam mulai muncul pada abad ke-19 yang diperkenalkan dan dipraktekkan oleh negara-negara Barat ketika mereka menjajah negara-negara Islam tersebut.¹⁶³ Padahal menurut Siddiqi, sebelum terjadinya imperialisme di negara-negara Islam, masyarakat muslim pada abad ke-13 M yang merupakan *super power* baik dalam bidang militer dan ekonomi pada saat itu, melakukan kegiatan perekonomian mereka dalam skala domestik maupun internasional tidak mengenal adanya bunga (*interest*). Mereka melakukan investasi seperti dalam industri-industri tekstil dan sebagainya menggunakan sistim bagi hasil (*profit sharing*). Praktek ini berlangsung sampai negara-negara Barat memperkenalkan sistim bunga (*interest*).

Pada abad ke 20 timbul kesadaran di kalangan umat Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme Barat, membawa dampak yang cukup luas dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi mereka. Dalam dunia ekonomi mereka ingin melepaskan diri dari konsep ekonomi yang berasal dari negara-negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, antara lain bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya sebuah bank Islam yang bebas dari praktek bunga.

Ide pendirian bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya wacana yang begitu intens tentang pendirian bank-bank syariah di negara-negara Islam yang menurut Dawam Rahardjo mengalami perkembangan yang cukup signifikans pada awal tahun 1970-an. Namun demikian, sebenarnya para ahli banyak yang sepakat, sebagaimana dikutip dari M. Syafi'i Anwar,

¹⁶³ Muhammad Najetullah Siddiqi, "Issues in Islamic Banking: Selected Papers" dalam *Islamic Economic Series-4*, (Nairobi: Islamic Foundation, 1993), h. 9

ide bank syariah merupakan fenomena tahun 1960-an; meskipun pada dasarnya gagasan itu sudah terbaca sejak awal tahun 1940-an. Namun pada dekade ini kondisi tidak memungkinkan untuk merealisasikan pendirian bank-bank syariah.¹⁶⁴

Pada tahun 1963 bank tabungan Myt-Ghamr di Mesir adalah eksperimen pertama dalam merealisasikan ide tentang bank syariah. Sebuah bank yang permodalannya dibantu oleh mendiang Raja Faisal dari Arab Saudi ini, mencoba menggabungkan gagasan bank tabungan Jerman, dengan dasar-dasar perbankan untuk kawasan pedesaan yang tentu saja berlandaskan pada tuntunan syariah. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk menarik minat warga pedesaan yang terkenal dengan sikap religiusnya agar mau menginvestasikan modal mereka, karena pada saat itu pada umumnya masyarakat menganggap bahwa bank adalah riba karena membungakan uang.

Sayang bank ini pada tahun 1967 ditutup karena persoalan politik, padahal mempunyai prospek yang cerah karena memperoleh keuntungan yang cukup tinggi dan telah membuka sembilan kantor cabang dengan nasabah sekitar satu juta orang.

Walaupun bank Myt-Ghamr ditutup tidak menyurutkan minat umat Islam untuk mendirikan bank syariah, bahkan usaha ke arah itu lebih diperluas lagi. Umat Islam membuka bank yang tidak hanya untuk kepentingan penabungan uang saja, tapi juga juga bergerak dalam bidang investasi serta mencakup masyarakat perkotaan, terutama investasi dalam sektor riil. Sektor inilah yang sangat cocok bagi pengembangan perbankan syariah yang tidak mengenal konsep bunga.

Maka pada tahun 1971, di Mesir didirikan bank syariah untuk kawasan perkotaan, Bank Sosial Nasser. Bank yang mulai beroperasi pada tahun 1972 ini lebih diarahkan pada fungsi sosial

¹⁶⁴ M. Syafi'i Anwar, "Alternatif Terhadap Sistem Bunga", dalam *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat [LSAF]), Vol-II No. 9 tahun 1991 M/1411 H, h. 11

selain fungsi ekonominya; seperti memberikan pinjaman keuangan bebas bunga untuk proyek-proyek kecil atas dasar bagi hasil, juga memberikan pinjaman terhadap para mahasiswa yang tidak mampu meneruskan studinya ke perguruan tinggi.¹⁶⁵

Ide pendirian bank syariah semakin mengglobal di dunia Islam ketika pada tahun 1973, Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang bersidang di Karachi, mengeluarkan keputusan bersama di antara negara-negara Islam, bahwa lembaga pendanaan perbankan yang dijalankan dengan sistem syariah itu mempunyai peran yang strategis bagi peningkatan posisi ekonomi masyarakat dan negara-negara Islam.¹⁶⁶ Keputusan itu dilandasi atas pandangan dari para peserta konferensi bahwa bunga bank hukumnya haram.

Komitmen untuk mendirikan bank syariah pada sidang OKI di Karachi tersebut berimplikasi terhadap pendirian bank syariah di Dubai, Qatar, *Dubai Islamic Bank*, pada bulan Maret tahun 1975. Pendirian *Dubai Islamic Bank* semakin memotivasi umat Islam untuk mendirikan lagi bank-bank syariah baik dalam skala internasional maupun nasional. Pada bulan Oktober tahun yang sama, 41 negara Islam sepakat mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) atau bank Pembangunan Islam, berkantor pusat di Jeddah. Bank ini berada di bawah pengawasan organisasi OKI. Pendirian itu juga merupakan realisasi dari keputusan sidang di Karachi tahun 1971 yang merekomendasikan kepada mengurus OKI agar mendirikan bank syariah bagi negara-negara anggota OKI.

Pendirian *Islamic Development Bank* memberi motivasi yang besar kepada negara-negara Islam, terutama negara-negara Arab untuk mendirikan bank syariah di negara mereka. Maka pada tahun 1977, di Mesir didirikan lagi bank Islam, *Faisal Islamic*

¹⁶⁵ *Ibid.*, h. 11

¹⁶⁶ Agus Wahid, "Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat" dalam *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Vol-VI No. 4 tahun 1995, h. 60

Bank of Egypt. Pada tahun yang sama pula di Kuwait didirikan, *Kuwait Finance House*.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam latar belakang pendirian bank syariah di negara-negara Islam adalah hasil kesepahaman para Gubernur Bank Sentral dari 36 negara Islam, termasuk gubernur Bank Indonesia, pada bulan September 1980 di Riyadh, Saudi Arabia. Mereka sangat apresiatif terhadap penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem perbankan dan mendirikan bank syariah di negara-negara mereka:

“The Governors appreciated the desire to apply islamic shari’a in the field of banking and noted with interest the establishment of islamic banks in a number of member states”.¹⁶⁷

Komitmen itu mendapat respons dari berbagai negara Islam, antara lain pada tahun 1981 di negara tetangga kita, Malaysia berdiri sebuah bank syariah yang berskala internasional, *Darul Mal-al-Islam* (DMI). Sebuah bank yang posisinya sejajar dan sekaligus memperkuat IDB. Malaysia kembali tahun 1983 membuka yang bergerak dengan sistem syariah.

Yang menarik adalah profil perkembangan dari bank-bank syariah yang telah berdiri di negara-negara Islam tersebut secara ekonomi dan keuangan dapat digolongkan pada rasio yang sehat dan menghasilkan keuntungan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perkembangan bank syariah juga dapat dilihat dari semakin meluasnya pendirian bank syariah baik di negara-negara Islam sendiri maupun di negara-negara non Islam.

Menurut Ausaf Ahmad dalam *Development and Problems of Islamic Banks* (IRTI-Jeddeh, 1987) pada tahun 1984 saja diperkirakan terdapat sekitar 38 Bank syariah. Jumlah itu belum termasuk lembaga keuangan dan investasi yang menyelenggarakan kegiatannya berdasarkan syariah yang berjumlah 20 lembaga.

Dari 35 Bank syariah tersebut 28 di antaranya berada di kawasan Dunia Islam, 20 bank berada di negara-negara Arab dan 8

¹⁶⁷ Muhammad Najetullah Siddiqi, *op. cit.*, h. 10

bank lainnya berada di Dunia Islam non-Arab. Di Sudan terdapat 5 buah, Mesir, Bahrain dan Jordania masing-masing memiliki 3 buah, sementara di Turki terdapat 2 bank Islam. Adapun negara-negara seperti Bangladesh, Kuwait, Guinea, Mauratinia, Nigeria, Qatar, Senegal, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran dan Saudi Arabia masing-masing memiliki satu bank. Negara-negara non Muslim yang memiliki bank syariah adalah Swiss, Luxemburg, Denmark, Inggris, Afrika Selatan, Bahama, dan Filipina.¹⁶⁸

Kondisi seperti tersebut membuat negara-negara Islam yang belum mewujudkan pendirian bank syariah untuk segera merealisasikannya, tidak terkecuali umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan terbesar di seluruh dunia, sangat berkepentingan untuk mewujudkan bank syariah di negerinya.

Ide pendirian perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari berbagai keputusan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan maupun pandangan dari para intelektual Islam di Indonesia.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang banyak memusatkan perhatian pada kondisi sosial, pendidikan dan ekonomi umat Islam pernah mengeluarkan seruan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Sebagaimana yang dijelaskan pada bahasan sebelumnya, ketika Majelis Tarjih melakukan sidang tentang hukum bunga bank pada tahun 1969 di Sidoarjo, Jawa Timur, salah satu keputusan penting yang berkaitan dengan pendirian bank Islam di Indonesia yaitu para peserta Majelis Tarjih menyarankan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan sesuai dengan kaidah Islam.¹⁶⁹

¹⁶⁸M. Syafi'i Anwar, *op. cit.*, h. 14

¹⁶⁹*Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, op. cit.*, h. 304-

Keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tersebut tidak terlepas dari perbedaan pandangan di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia tentang bunga bank. Ide pendirian bank syariah merupakan suatu solusi bagi penyelesaian perbedaan pandangan atas bunga bank. Sikap yang serupa juga dilakukan NU melalui Lajnah *Bahsul Masa'ihya*. Karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama NU tentang bunga bank maka pendirian bank syariah, atau paling tidak mewujudkan sistem ekonomi yang sesuai dengan syariah menjadi suatu keharusan.

Perbedaan itu pula yang menyebabkan Muhammadiyah memandang bunga bank termasuk dalam persoalan *mutasyabihat*. Maka dengan adanya bank syariah di samping mengakomodasi kepentingan bagi umat Islam yang memandang bunga bank sebagai riba untuk dapat mengembangkan ekonominya melalui perbankan syariah, juga akan menghapus pandangan bagi sebagian umat Islam yang berpendapat bahwa kehalalan hukum bunga bank disebabkan oleh keadaan darurat. Di mana pada saat itu tidak ada lembaga keuangan yang menjalankan sistem operasional dengan prinsip non bunga.

Keputusan sidang Majelis Tarjih tahun 1969 tersebut di atas dipertegas lagi ketika Majelis itu melakukan sidangnya pada tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan. Dalam sidang itu kembali Majelis Tarjih merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memenuhi keputusan Majelis Tarjih di Sidoarjo tentang terwujudnya konsepsi sistem perekonomian syariah, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan syariah Islam.¹⁷⁰ Bahkan para peserta sidang Majelis Tarjih mendesak kepada pimpinan Muhammadiyah agar mengajukan konsepsi tentang perbankan syariah pada Muktamar Muhammadiyah.

Sebagai organisasi yang memiliki basis massa yang umumnya adalah para pedagang dan petani yang berhasil, keputusan Muktamar Muhammadiyah tentang bank syariah akan

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 370

mendapat respon positif dari kalangan umat Islam. Sebagai keputusan tertinggi dalam pengambilan keputusan organisasi Muhammadiyah, tentu akan mempunyai implikasi politik terhadap pemerintah. Paling tidak menjadi pertimbangan bagi setiap keputusan ekonomi pemerintah Indonesia.

Pada sidang Lajnah *Bahsul Masa'il* tahun 1982 di Lampung, organisasi Nahdatul Ulama membuat beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang ekonomi dan pendirian bank syariah. Hal itu dilakukan atas pertimbangan bahwa NU adalah organisasi massa yang cukup besar di Indonesia, di samping Muhammadiyah, yang memiliki potensi sangat besar dalam pembangunan nasional dan kehidupan ekonomi.¹⁷¹ Apalagi warga NU pada umumnya adalah masyarakat pedesaan yang memiliki potensi yang cukup besar yang harus dikembangkan.

Berkaitan dengan ide penerapan sistem syariah dalam bidang ekonomi dan pendirian bank syariah, Lajnah *Bahsul Masa'il* NU memutuskan mengambil untuk langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Pertama, sebelum tercapainya cita-cita pendirian bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank tanpa bunga, hendaknya sistem perbankan yang sedang berjalan sekarang ini segera diperbaiki atau disesuaikan dengan prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kedua, perlu diatur hal-hal yang berkaitan:

1. Penghimpunan dana masyarakat yang menggunakan sistem *al-wadi'ah* dan *al-mudarabah*
2. Penanaman modal dan kegiatan usaha baik bagi pembiayaan proyek, pembiayaan usaha perdagangan, atau pemberian jasa, dilakukan atas dasar usaha patungan atau *profit and loss sharing*
3. Untuk pembiayaan proyek, sistem pembiayaan dapat

¹⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h., 61

menggunakan sistem *mudarah, murabah, ijarah*, dan prinsip lain yang sesuai dengan syariah.

4. Bank dapat membuka L/C dan menerbitkan surat jaminan, dimana pengaplikasiannya menggunakan konsep *musyarakah, mudarah*, dan lainnya.
5. Untuk jasa-jasa perbankan seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli mata uang dilakukan dengan prinsip tanpa bunga.¹⁷²

Hal penting lain yang diputuskan adalah para anggota Munas Lajnah tersebut sepakat mendukung dan menyetujui berdirinya bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga. Oleh sebab itu, dipandang perlu oleh para anggota Munas untuk merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat Nahdatul Ulama (PBNU) agar membentuk suatu tim Pengawas dalam bidang syariah, sehingga dapat menjamin keseluruhan operasional bank NU yang akan berdiri tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah Islam.¹⁷³

Pada seminar mencari solusi tentang kontroversi bunga bank yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang bekerjasama dengan yayasan Baitul Makmur Sumatera Utara pada tahun 1985 muncul ide tentang pendirian bank Islam. Akibat perbedaan pandangan terhadap bunga bank para peserta seminar menghasilkan satu keputusan alternatif dari kontroversi tersebut. Pada sidang itu disepakati bahwa jalan keluar dari permasalahan riba adalah pendirian bank Islam yang beroperasi dengan sistem nonbunga. Persoalan bunga bank merupakan persoalan *khilafiyah*, masing-masing yang berbeda pendapat mendasari pendapatnya dengan berbagai argumennya.

¹⁷² Keputusan Munas Alim Ulama dan Konperensi Besar Ulama di Bandar Lampung, *op. cit.*, 12-14. Lihat pula, A. Azis Masyhuri, *op. cit.*, h. 368-370, Rifyal Ka'bah, *op. cit.*, h. 192-193

¹⁷³ A. Azis Masyhuri, *op. cit.*, h. 370

Hal yang sama juga dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada akhir dasawarsa tahun 1980-an. MUI semakin intensif melakukan membicarakan gagasan pendirian bank Islam di Indonesia, bahkan pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI melaksanakan sebuah Lokakarya Nasional. Lokakarya dengan tema “Bunga Bank dan Perbankan”, adalah sebuah upaya mendorong terbentuknya bank Islam di Indonesia, -Lokakarya yang menjadi cikal bakal lahirnya Bank Muamalat Indonesia-, dengan mengundang berbagai komponen bangsa, termasuk pemerintah dan Bank Indonesia.¹⁷⁴

Para pembicara dalam lokakarya itu adalah para ahli di bidang perbankan dan syariah Islam. Pembicaraanya, antara lain: Achwan (Gubernur Bank Indonesia saat itu) dengan pembahas utama: A.M. Saefuddin dan Murasa Sarkaniputra; Ibrahim Hosen, pembahas utamanya: Alie Yafie dan Ahmad Azhar Basyir; Karnaen A. Perwataatmadja, pembahas utamanya: I Nyoman Moena, Ralie Sieragar, dan Bambang Subianto; dan Dawam Rahardjo dengan pembahas utamanya Sri Edi Swasono dan Ahmad Djimar.¹⁷⁵

Kesimpulan penting yang diambil dari hasil lokakarya itu adalah keinginan umat Islam untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari hasil rumusan tentang sistem perbankan bebas bunga:

1. Dalam rangka memantapkan pengerahan dana pembangunan tersebut perlu digerakkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat termasuk mereka yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan. Untuk pengerahan dana masyarakat yang menganggap bunga bank adalah riba atau meragukan tersebut perlu diusahakan adanya sistem atau prosedur-prosedur

¹⁷⁴ Dawam Rahardjo, “Islam Transformasi”, *op.cit.*, h. 404

¹⁷⁵ Majelis Ulama Indonesia, *Perumusan Lokakarya Bank dan Perbankan*, tidak diterbitkan, h. 2-3

perbankan yang dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga kepada nasabahnya.

2. Sistem atau prosedur-prosedur perbankan tersebut yang dalam operasinya tidak menggunakan bunga dirumuskan demikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perbankan yang berlaku.¹⁷⁶

Intensnya ide pendirian bank syariah di Indonesia saat itu, terutama yang disponsori MUI Pusat, tidak terlepas kondisi sosial politik dan ekonomi yang berkembang pada saat itu. Kedua aspek itu sangat terkait erat adanya gagasan bank Islam, utamanya pertimbangan ekonomi. Kondisi ekonomi yang lesu, akibat adanya resesi ekonomi dunia, membawa dampak kurang baik bagi proses pembangunan bangsa Indonesia. Hal itu disebabkan semakin kurangnya bantuan luar negeri yang menjadi salah satu tumpuan bagi pembangunan Indonesia.

Kondisi ekonomi yang demikian, memaksa pemerintah melakukan berbagai kebijakan ekonomi yang tidak mengandalkan bantuan luar negeri sebagai tumpuan pembangunan. Pemanfaatan potensi dan kemampuan masyarakat Indonesia menjadi alternatif bagi kelangsungan pembangunan.

Pemanfaatan potensi dalam negeri menjadi penopang pembangunan bangsa dapat dilihat pada kebijakan yang memberlakukan pada tanggal 1 Juni 1983. Kebijakan itu pada satu sisi memang sebagai upaya penghimpunan dana masyarakat untuk proses pembangunan bangsa, namun pada sisi yang lain, terutama yang berkaitan dengan gagasan pendirian bank syariah, merupakan “angin segar” bagi terwujudnya bank tersebut.

Paket 1 Juni 1983 tersebut pada prinsipnya mengizinkan bank-bank untuk menentukan sendiri tingkat bunga

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 6

deposito/tabungan dan pinjaman.¹⁷⁷ Sebuah regulasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dalam rangka kemandirian dan efektifitas kerja perbankan nasional. Sebab, sebelum deregulasi itu dikeluarkan perbankan nasional sangat bergantung pada tersedianya kredit likuiditas Bank Indonesia, dan besarnya bunga pinjaman dan kredit ditentukan oleh pemerintah. Namun demikian, sebenarnya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan sudah ada peluang bagi umat Islam, tapi pemerintah belum tegas memberikan otoritas kepada bank-bank nasional untuk menentukan suku bunga pinjaman dan tabungan

Dengan adanya deregulasi 1 Juni 1983 itu, umat Islam dapat saja mendirikan sebuah bank yang dikelola berdasarkan tingkat bunga 0% (tanpa bunga) dan dengan sistem bagi hasil yang berdasarkan atas hukum perjanjian murni antara bank dengan nasabahnya. Namun kesempatan itu tidak dapat digunakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan modal untuk merealisasikan pendirian sebuah bank Islam; sebab pemerintah tidak memberikan kebijakan untuk mendirikan bank-bank baru.¹⁷⁸ Alternatifnya umat Islam mendirikan lembaga keuangan yang berprinsip syariah dalam bentuk koperasi. Maka di Jakarta dikenal ada koperasi Ridho Gusti, Baitul Tamwil Teknosa di Bandung, dan beberapa bentuk yang serupa di berbagai daerah di Indonesia.

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan 27 Oktober 1988, dikenal dengan PAKTO 1988, dan ketentuan lanjutannya pada tanggal 29 Januari 1990. Ketentuan tersebut memberikan peluang mendirikan bank-bank swasta baru, cabang-cabang pembantu bank asing baru, termasuk *joint ventures* bagi perwakilan bank asing yang telah ada dengan bank domestik. Tidak kecuali kebijakan ini lebih memberikan peluang kepada umat Islam untuk mendirikan bank dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

¹⁷⁷ Karnaen A. Perwataatmadja, *op. cit* h. 142

¹⁷⁸ *Ibid*, h. 143

Kebijakan tersebut diambil pemerintah untuk menarik dana masyarakat bagi pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Seiring dengan jatuhnya harga minyak di pasaran Internasional yang menjadi andalan bangsa Indonesia untuk pembangunannya, seperti yang terjadi pada dekade sebelumnya.

Kondisi tersebut pula membangkitkan gairah umat Islam Indonesia untuk merealisasikan rencana tersebut. Usaha ke arah itu misalnya dilihat dari usaha Andi Rally Siregar, seorang pimpinan Bank Susila Bakti untuk membuka *Islamic Window* dari bank yang dipimpinannya. Di samping merintis kerjasama dengan *Islamic Development Bank* (IDB) untuk mendirikan *Joint Venture Bank* (Bank Islam Campuran).¹⁷⁹

Respons yang serupa terjadi pada tingkat Bank Perkreditan Rakyat, tercatat bahwa umat Islam di Lombok, sebagai yang pertama kali mengajukan permohonan untuk mendirikan BPR Islam dengan nama BPR Islam Al-Azhar. Kemudian menyusul BPR Berkah Amal Sejahtera, Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabaniah, ketiganya di Bandung¹⁸⁰, dan terakhir BPR Hareukat yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1991. Semuanya adalah BPR yang lahir sebelum berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

E. Bank Muamalat Indonesia: Momentum Perkembangan Praktek Perbankan Syariah

1. Pendirian Bank Muamalat Indonesia

Sebagaimana yang dijelaskan pada subbab sebelumnya, wacana pendirian bank syariah di Indonesia telah berlangsung lama seiring dengan perkembangan perbankan syariah di dunia Islam. Namun keinginan tersebut belum didukung oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi sehingga realisasi pendirian bank syariah tidak bisa diwujudkan.

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 32

Namun seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan politik maka ide pendirian bank syariah semakin gencar disuarakan pada awal tahun 1990-an. Ide konkrit pendirian bank syariah itu bermula ketika diadakannya lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” pada tanggal 18-20 Agustus 1990 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia.¹⁸¹ Lokakarya itu merupakan satu rangkaian dari berbagai kegiatan untuk mengakhiri, -atau paling tidak mencari titik temu-, perdebatan panjang mengenai halal tidaknya bunga bank, dan hasil dari lokakarya itu mengamanatkan kepada MUI untuk mendirikan bank syariah.¹⁸²

Ide pendirian itu dipertegas lagi dalam Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI ke IV di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Untuk itu, dibentuk sebuah yayasan yakni Yayasan Dana Dakwah Pembangunan yang akan menjadi induk organisasi bagi bank syariah yang akan didirikan tersebut. Yayasan tersebut diketuai oleh Ketua Umum MUI, saat itu, KH. Hasan Basri dan M. Amin Aziz sebagai sekretaris.

Pendirian bank syariah di Indonesia semakin mencapai kenyataan dengan dibentuk *steering committee* yang akan mempersiapkan segala sesuatu dengan ide pendirian bank tersebut. Tim tersebut diketuai oleh M. Amin Aziz, dikenal dengan Tim MUI. Anggotanya antara lain: M. Syahrul Ralie Siregar, A. Malik dan Zainulbahar Noor. Tugas awal tim ini adalah menyiapkan buku panduan bank tanpa bunga sebagai dasar operasional bank syariah yang akan didirikan nantinya.

Untuk membantu kelancaran Tim MUI ini, terutama untuk masalah-masalah hukum, dibentuk Tim Hukum Ikatan Candekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang diketuai Karnaen

¹⁸¹ Bank Muamalat Indonesia, *Laporan Direksi 1992 dalam Rapat Umum Pemegang Saham*, 17 Juni 1993 Puri Indah Hotel Sahid Jaya, h. 19

¹⁸² Wawancara dengan Zainul Arifin tanggal 12 September 2002 di Jakarta

A. Perwataatmadja.¹⁸³ Tim ini mempersiapkan perangkat-perangkat hukum yang berkaitan dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebab sebuah bank pada saat pendirian dan operasionalnya terkait dengan masalah legal formal.

Hal yang paling utama yang dilakukan Tim perbankan MUI disamping melakukan pendekatan-pendekatan dan konsolidasi dengan pihak terkait adalah menyelenggarakan *training* (pelatihan) calon staf Bank Muamalat Indonesia melalui *Management Development Program* (MDP). Kegiatan tersebut diadakan di LPPI pada tanggal 25 Maret 1991 dan buka oleh Menteri Muda Keuangan, Nasruddin Suminatapura.

Usaha lain yang dilakukan Tim Perbankan MUI yaitu melakukan pendekatan dan meyakinkan beberapa pengusaha untuk menjadi pemegang saham dalam bank yang akan didirikan itu. Tercatat beberapa pengusaha besar muslim menjadi pemegang saham dan turut membantu pendanaan bagi pendirian bank syariah pertama itu, antara lain: Probo Sutedjo, Muhammad (Bob) Hasan, Abdul Latie Agus, Sudwikatmono, E. Kowara, Hutomo Mandala Putra, Roby Johan, Abu Rizal Bakrie, dan lainnya.¹⁸⁴

Pendirian bank syariah di Indonesia mendapat respons positif dan dukungan dari sejumlah menteri, tokoh masyarakat, kalangan perbankan, dan tentu saja mendapat sokongan yang kuat dari ICMI. Bahkan Presiden Soeharto sendiri memberi dukungan secara politik dan dana bagi pendirian bank syariah tersebut. Langkah Soeharto itu diawali dengan keikutsertaan beberapa mantan dan pembantunya di Kabinet Pembangunan V, seperti: BJ. Habibie, Arifin M. Siregar, Ginanjar Kartasasmita, Alamsyah Ratu Perwira, Hartarto, Rahmat Saleh, dan Azwar Anas.

Respons positif presiden Soeharto terhadap rencana pendirian bank syariah di Indonesia selain berkaitan dengan politik

¹⁸³ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bamui dan Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 73

¹⁸⁴ Bank Muamalat Indonesia, *op. cit.*, h. 19

akomodasi yang dijalankan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam, juga berkaitan dengan ketertarikan Soeharto terhadap sistem bagi hasil yang akan diterapkan dalam bank Islam yang akan didirikan.

Hal itu terlihat dalam pertemuan antara umat Islam yang dipimpin Ketua Umum MUI, KH. Hasan Basri, dengan presiden Soeharto, pertemuan yang bertujuan untuk menyampaikan rencana umat Islam mendirikan bank syariah. Dalam pertemuan itulah diungkapkan ketertarikan Soeharto terhadap konsep bagi hasil. Menurutny konsep bagi hasil merupakan sistem perbankan yang berakar dari budaya bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembagian hasil pertanian di kalangan masyarakat Indonesia mengenal sistem yang serupa dengan konsep bagi hasil, yaitu *maro* dan *martelu*. Konsep bagi hasil ini dikenal dalam masyarakat Jawa dan Sulawesi Selatan dalam penggarapan sawah pertanian.¹⁸⁵ *Maro* adalah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara penggarap dan pemilik tanah pertanian masing-masing 50% dari hasil bersih. Sedangkan *martelu* ialah sistem bagi hasil dengan pola pembagian antara pemilik dan penggarap masing-masing memperoleh 67% dan 33%.¹⁸⁶ Dalam sistem bagi hasil tersebut baik penggarap maupun pemilik tanah menanggung resiko bersama.

Tanggal 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan Akte Pendirian PT. Bank Muamalat yang dilakukan di Sahid Jaya Hotel dengan Akte dihadapan Notaris, Yudo Paripurno, SH dengan Akte Notaris No. 1. 1 Nov 1991 (Izin Menteri Kehakiman No. C2. 2413. HT. 01. 01. 21 Maret 1992/Berita Negara R.I. tanggal 28 April 1992 No. 34).

¹⁸⁵ Kesimpulan dari hasil wawancara dengan Zainul Arifin tanggal 12 September 2002 di Jakarta

¹⁸⁶ Murasa Sarkaniputra, *Analisis Input-Output Sebagai Kerangka Strategi Pembangunan Pertanian*, Disertasi Doktor dalam Ilmu Ekonomi pada Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, tidak diterbitkan, h. 142

Saat penandatanganan akte itu terkumpul dana sebanyak 84 Miliar. Dan selang 2 hari setelah itu, tepatnya hari Minggu tanggal 3 Maret 1991 Tim Perbankan MUI mengadakan silaturahmi kepada Presiden Soeharto di Istana Bogor. Dalam acara yang bertemakan “Silaturahmi Bapak Soeharto dan masyarakat Jawa Barat dalam rangka penjualan saham pendirian bank syariah”, Presiden memberikan dana awal yang diambil dari dana kas Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP) sebesar Rp. 3 miliar.¹⁸⁷

Maka dengan total komitmen modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,¹⁸⁸ Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Setelah mendapat izin prinsip, surat Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991, tanggal 5 November 1991, diikuti dengan Izin Usaha berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 430/KMK:013/1992 tanggal 24 April 1992. Peresmian operasi tersebut ditandai dengan acara *Soft Opening* yang dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, di kantor Bank Muamalat Indonesia.

Walaupun Bank Muamalat Indonesia sudah beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1992, namun *Grand Opening* bank tersebut baru berlangsung tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahid Jaya. Acara yang dihadiri Wakil Presiden, Soedarmono, yang mewakili presiden menandatangani prasasti yang menandai berdirinya Bank Muamalat Indonesia.

2. Momentum Perkembangan Perbankan Syariah.

Bank Muamalat merupakan bank umum pertama yang melakukan transaksi perbankan dengan menggunakan prinsip syariah. Walaupun sebelumnya telah berdiri lembaga keuangan syariah, baik yang berbentuk *bait al-tamwil* maupun Bank

¹⁸⁷ Prospek, 2 November 1991, h. 73

¹⁸⁸ Padahal modal dasar bagi pendirian bank umum sebesar Rp.500 Miliar.

Perkreditan Rakyat (BPR).

Lembaga keuangan yang berbentuk *bait al-tamwil* bahkan telah dikenal sekitar tahun 1980-an yakni dengan berdirinya Baitul Tamwil Teknosa di Bandung dan Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Namun sayang kedua lembaga ini tidak dapat bertahan lama, sebelum sempat berkembang.

Adapun Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berdiri sebelum Bank Muamalat Indonesia, tercatat seperti: BPR Islam Al-Azhar yang didirikan di Lombok, BPR Berkah Amal Sejahtera, Dana Mardhatillah, dan BPR Amanah Rabaniah, ketiganya di Bandung¹⁸⁹, dan terakhir BPR Hareukat yang didirikan pada tanggal 10 Nopember 1991.

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan Islam tersebut di atas tidak berpengaruh secara signifikan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebab keberadaan lembaga itu masih dalam konteks lokal, seperti BPR Islam al-Azhar yang hanya meliputi pulau Lombok, BPR Mardatillah, Amanah Rabaniyah dan Berkah Amal Sejahtera yang hanya beroperasi di wilayah Bandung. Mereka tidak memiliki jaringan luas yang mencakup kota-kota lain di Indonesia.

Faktor lain, lembaga-lembaga keuangan perbankan syariah tersebut tidak bisa berkembang, setidaknya disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu: *pertama*, tidak profesional dalam manajemen pengelolaan, dan *kedua* sumber daya manusia tentang perbankan syariah yang tidak memadai.¹⁹⁰ Tidak profesional dalam manajemen berkaitan dengan belum ada format baku yang menjadi acuan dalam operasional, semuanya masih bersifat eksperimen. Sementara sumber daya manusia yang memiliki kemampuan perbankan secara profesional dan pemahaman yang baik dalam syariah belum muncul.

¹⁸⁹ Karnaen, *op. cit.*, h. 32

¹⁹⁰ Wawancara dengan Saefuddin A. Rasyid tanggal 19 September 2002 di Jakarta

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia merupakan titik tolak bagi perkembangan perbankan syariah selanjutnya. Walaupun antara Bank Muamalat dan bank-bank syariah yang ada sesudahnya tidak memiliki jaringan manajerial. Namun, kelahiran Bank Muamalat memberikan andil bagi perkembangan perbankan lain. Meskipun argumen tersebut bukan menjadi syarat mutlak bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Paling tidak dengan mengetahui latar belakang kelahiran bank Muamalat Indonesia, akan menyingkap berbagai hal yang berkaitan dengan latar belakang lahirnya undang-undang perbankan yang mengatur sistem perbankan syariah di Indonesia. Sebab salahsatu perundangan-undangan yang berkaitan perbankan syariah di Indonesia, Undang-Undang No.7 Tahun 1992, dalam beberapa hal terkait erat dengan keberadaan Bank Muamalat Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa salahsatu faktor diakomodasinya sistem perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 adalah semakin maraknya wacana perbankan syariah pada awal tahun 1990-an. Bahkan ketika rancangan undang-undang ini dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, realisasi ide pendirian Bank Muamalat Indonesia sedang gencar dilakukan.

Walaupun disadari bahwa Undang-Undang No. 7 tahun 1992 belum memberikan dasar hukum yang kuat bagi operasional perbankan syariah di Indonesia. Namun dengan adanya undang-undang itu memberikan landasan hukum bagi bank syariah. Kelemahan itu berimplikasi terjadinya perkembangan yang kurang menggembirakan bagi perkembangan bank syariah dalam kurun waktu 1992-1998, sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998.

Hal lain yang menyebabkan perkembangan yang kurang menggembirakan bagi bank syariah, yaitu:

1. Rendahnya pengetahuan dan kesalahpahaman masyarakat

mengenai bank syariah.

2. Belum tersedianya ketentuan pelaksana terhadap operasional bank syariah
3. Terbatasnya jaringan kantor perbankan syariah
4. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.¹⁹¹

Terlepas dari perkembangan yang kurang menggembirakan dari perkembangan perbankan syariah dalam kurun waktu 1992-1998, namun dibandingkan dengan bank konvensional, Bank Muamalat Indonesia sebagai satu-satunya bank umum yang beroperasi dengan prinsip syariah membuktikan dirinya mampu bertahan dari krisis keuangan yang menyebabkan bangkrutnya sebagian besar perbankan konvensional di Indonesia.

Kemampuan sistem keuangan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang terjadi pada Bank Muamalat Indonesia turut memberi faktor bagi pemerintah untuk merevisi Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Pemerintah dengan undang-undang baru lebih mengakomodasi sistem perbankan syariah diterapkan dalam sistem perbankan nasional, dengan memberi peluang yang lebih besar bagi pengembangan bank syariah di Indonesia.

F. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syari'ah dan bank konvensional tidak jauh berbeda masalah teknis penerimaan uang, transfer, teknologi komputer yang digunakan, laporan keuangan dan sebagainya. Akan tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Pada aspek akad dan legalistas, dalam bank syari'ah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang

¹⁹¹ Bank Indonesia, *Kajian Awal Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*, tidak diterbitkan, 2001, h. 12

dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki petanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syari'ah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun; penjual, pembeli, barang, harga, akad/ijab-qabul. Dan syaratnya, barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas karena akan berdampak pada transportasi, barang yang ditansaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu barang yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

Lembaga penyelesaian sengketa, dalam lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syari'ah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indoensia.¹⁹²

Secara struktural, bank syari'ah sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antar bank syari'ah dan konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah. Penetapan anggota DPS dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang-Saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syari'ah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syari'ah Nasional. Peran utama DPS adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari selalu dengan ketentuan-ketentuan syari'ah, biasanya tiap tahun, bahwa yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syari'ah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

¹⁹² Bisa lihat buku *Arbitrase di Indonesia* (1994).

Tugas lain, meneliti dan membuat produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

Sejalan dengan berkembangannya lembaga syari'ah di Tanah Air, berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. banyaknya dan berkembangnya DPS perlu di syukuri dan juga diwaspadai. Kewaspadaan itu timbul, berkaitan dengan adanya kemungkinan lahir fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu akan membingungkan ummat dan nasabah. Oleh karena itu MUI sebagai payung lembaga dan organisasi keislaman di Indonesia, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syari'ah. Lembaga ini kemudian dikenal dengan nama Dewan Syari'ah Nasional. DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan Juli tahun yang sama. Fungsi utama DSN mengawasi produ-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'ah Islam. Tidak hanya bank syari'ah tetapi juga lembaga-lembaga lainnya yang masuk kategori non-bank. DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syari'ah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Jika lembaga keuangan syari'ah tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syari'ah.¹⁹³

¹⁹³ Bank Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999).

Perbedaan selanjutnya dalam hal bisnis dan usaha yang dibiayai. Karena itu, bank syari'ah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Dalam lingkungan kerja bank syari'ah sangat berbeda dengan konvensional, seorang karyawan harus tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Demikian juga dalam menghadapi nasabah, akhlaq harus terjaga, seperti kata Nabi Saw; “senyum adalah sedekah”.

Secara garis besar dapat disajikan dalam tabel berikut:

Bank Islam	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal dan haram
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa	Memakai perangkat bunga
3. Profit dan falah oriented	Profit oriented
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-debitor
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa DPS	Tidak terdapat dewan sejenis (DPS)

G. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah bagi bank konvensional, sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, meliputi:
 - a) giro berdasarkan *wadi'ah*;¹⁹⁴

¹⁹⁴ *Wadi'ah* adalah sesuatu titipan dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya, lihat; Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1987), juz III, h. 223. Secara teknik perbankan yang dimaksud dengan giro *wad³'ah* adalah

- b) tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudarabah*¹⁹⁵;
 - c) deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudarabah*; dan bentuk lainnya berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudarabah*.
- 2) Melakukan penyaluran dana, melalui:
- a) transaksi jual beli berdasarkan prinsip: *murabahah*¹⁹⁶; *salam*¹⁹⁷; *istishna*¹⁹⁸; *ijarah iqtina*¹⁹⁹; dan jual beli

simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, atau surat perintah pembayaran lainnya. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada nasabah (pemilik dana) dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank dengan syarat tidak boleh diperjanjikan pada saat akad berlangsung;. Bank Indonesia, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: t.p, 2001), h. 13-14, dan selanjutnya disebut “produk”; Lihat pula Warkun Sumitro, *op. cit.*, h. 83

¹⁹⁵ *Murabahah* dalam literatur fikih, adalah akad antara kedua belah pihak, salah satu pihak (*rahib al-mal*) membayar secara tunai kepada pihak lain (*mudarib*) yang berdagang dengan modal tersebut, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan mereka. Lihat, Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 197; Surahman Hidayat, *al-Ma'arif al-Islamiyyah fi Indonesia wa Siyasatuhu al-Istimariyyah: Muqaranah bi al-Ma'arif al-Islamiyyah fi Misr*, Disertasi Doktor pada Fakultas *Syari'ah* dan *Qann* Universitas al-Azhar, Kairo, tahun 1999, tidak diterbitkan, h. 152. *Mudarabah* dalam sistem perbankan syariah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih, dimana pemilik modal (*sahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudarib*) yaitu bank dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian; lihat, Bank Indonesia, “produk”, *op. cit.*, h. 7

¹⁹⁶ Dalam literatur fikih jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati; Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), juz II, h. 161. *Murabahah* dalam teknik perbankan diartikan sebagai transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jualnya adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan dan kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran yang dicantumkan dalam akad jual beli. Harga yang telah disepakati dicantumkan dalam akad jual beli dan tidak akan mengalami perubahan selama berlakunya akad tersebut, lihat; Bank Indonesia, “produk” *op. cit.*, h. 2

¹⁹⁷ Jual beli salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diserahkan, Muhammad Ibnu

lainnya;

- b) pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: *mudarabah*; *musyarakah*²⁰⁰; dan bagi hasil lainnya;
- c) pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*²⁰¹,

Ahmad Ibnu Muhammad Ibn Rusyd, *op. cit.* juz ke II, h. 155. Secara tehnik perbankan, jual beli salam adalah transaksi di mana barang yang diperjualbelikan belum ada, dan akan diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka bank melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk dan lainnya. Mekanisme seperti ini menghindarkan bank dari penumpukan barang yang dibelinya, dan ini dikenal dengan istilah jual beli “salam paralel”; Bank Indonesia, “Produk” *op. cit.*, h. 3

¹⁹⁸ Jual beli model ini dalam praktek perbankan syariah di Indonesia menyerupai produk jual beli salam, namun dalam *istihna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dengan beberapa kali pembayaran. Lihat, *ibid.*, h. 4

¹⁹⁹ Skim ini dalam literatur fikih adalah suatu ikatan antara kedua belah pihak untuk memiliki atau memperoleh sesuatu yang bermanfaat dalam waktu tertentu berdasarkan persyaratan tertentu pula. Lihat, Zain al-Din bin Abd. Aziz al-Malyabary, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah, 1978), h. 80. *Ijarah iqtina'* dalam praktek perbankan syariah adalah transaksi yang dilandasi adanya perpindahan manfaat, di mana bank menyewakan sesuatu barang kepada nasabahnya dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan, dan nasabah memanfaatkan barang tersebut selama waktu yang disepakati dalam akad. Di akhir masa penyewaan, bank dapat menjual kembali barang yang disewakan itu kepada nasabah atau menariknya kembali. Lihat, *ibid.*, h. 5; Warkum Sumitro, *op. cit.*, h. 82.

²⁰⁰ *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 90; Surahman Hidayat, *op. cit.*, h. 153; Bank Indonesia, “Produk” *op. cit.*, h. 6; Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, *op. cit.* juz ke II, h. 253-257

²⁰¹ *Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam pengertian fikih merupakan pemindahan beban hutang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Lihat, Muhammad Syafi'i Antonio, *op. cit.*, h. 126; al- Sarbini Khatib, *al-Mughni al-Muhtaj: Sarh al-Minhaj*, (Kairo: al-Maktabah al-Babi al-Halabi, t.th), vol ke-II, h. 193. Dalam praktek perbankan syariah, *hiwalah* adalah fasilitas lazimnya untuk membentuk supplier mendapatkan modal tunai agar dapat

*rahn*²⁰², dan *qard*.²⁰³

- 3) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip jual-beli atau hiwalah.
- 4) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang diterbitkan atas dasar prinsip syariah
- 5) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip wakalah²⁰⁴
- 6) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.
- 7) Melakukan kegiatan penitipan, termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah
- 8) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada

melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang; Bank Indonesia, “Produk” *op. cit.*, h. 9-10.

²⁰² *Rahn* dalam literatur fikih adalah menahan sesuatu (milik peminjam) yang dapat dipergunakan manfaatnya (oleh pemberi pinjaman) ; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), juz V, cet. ke-3, h. 180; Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh ‘Al- Mazahib al- ‘Arba’ah*, (Beirut: Dar al-Qalam, t.th), vol ke-II, h. 305. Dalam praktek perbankan syariah, *rahn* (gadai) bertujuan memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan; Bank Indonesia, “Produk” *op. cit.*, h. 10

²⁰³ *Qard* adalah meminjamkan harta kepada orang lain dan peminjam harus mengembalikannya sebesar pinjaman itu setelah ia mampu mengembalikannya. Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 163. *Qard* dalam praktek perbankan syariah biasanya dalam bentuk: pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan pinjaman kepada pengurus bank; lihat, Bank Indonesia, “Produk” *op. cit.*, h. 11

²⁰⁴ *Wakalah* adalah penyerahan kewenangan seseorang atas harta miliknya kepada orang lain sebagai wakil untuk mempergunakan atau menjaganya selama ia masih hidup; Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 72. *Wakalah* dalam praktek perbankan syariah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang; Bank Indonesia, “Produk” *op. cit.*, h. 11. *Wakalah* semacam ini dalam fikih dikenal dengan *wakalah bi ujr*

nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip uj²⁰⁵.

- 9) Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip wakalah, murabahah, mudarabah, musyarakah, dan wadi'ah, serta memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.²⁰⁶
- 10) Melakukan kegiatan usaha kartu debit berdasarkan prinsip uj²⁰⁵.
- 11) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah
- 12) Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sarf²⁰⁷
- 13) Melakukan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah

H. Produk-Produk Bank Syariah

a. Profit –Sharing (bagi hasil)

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad:

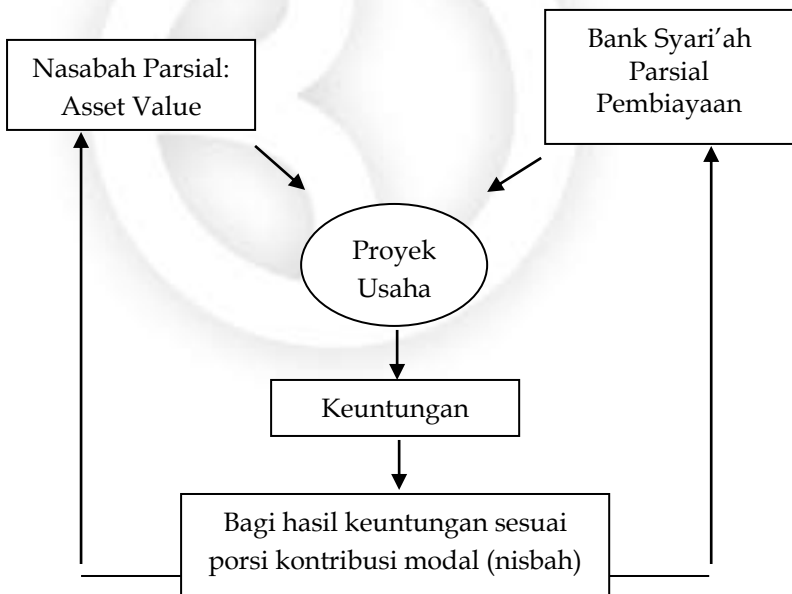
1. *Al-Musyarakah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan

²⁰⁵ *Uj* dapat diartikan sebagai upah. Bank mendapat sejumlah *fee* atas jasa yang diberikan kepada nasabahnya.

²⁰⁶ *Kafalah* adalah mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin; Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 132. Dalam praktek perbankan syariah, *kafalah* atau garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran.

²⁰⁷ Perdagangan valuta asing dianalogikan sebagai perdagangan dengan sistem *sarf*, perdagangan dengan cara pertukaran antara dua jenis yang berbeda, misalnya emas dan perak. Dalam praktek perbankan perdagangan valuta asing dengan sistem *sarf* yaitu jual beli mata uang yang tidak sejenis yang penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank dapat mengambil keuntungan dari penjualan valuta asing. Penjualan ini harus terbebas dari *riba*, *maisir*, dan *garar*. Lihat *ibid.*, h. 19

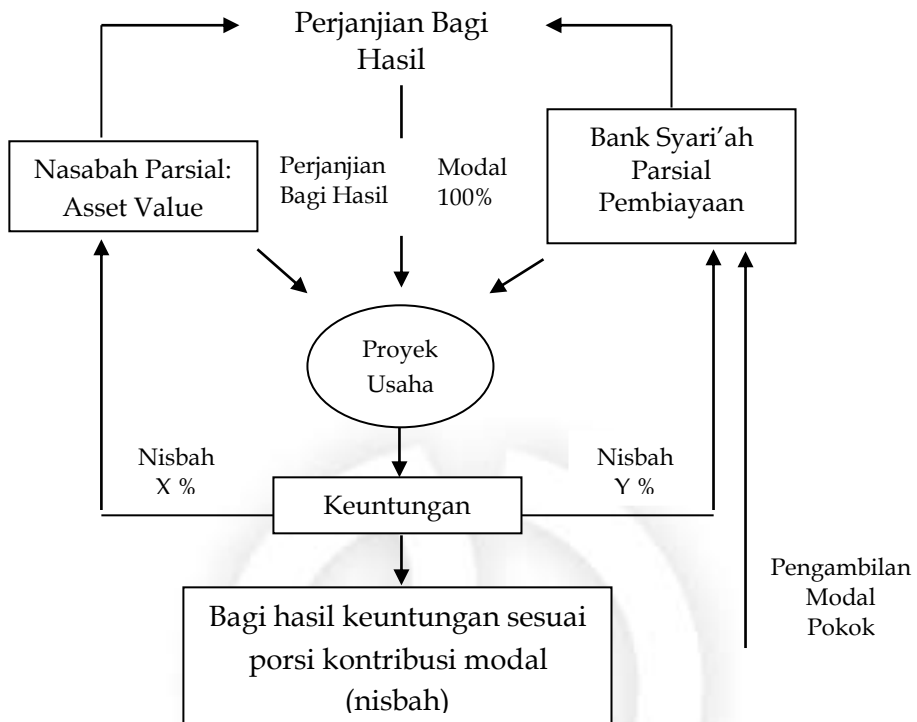
kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan proyek, Al-Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai salah satu proyek. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati. Sementara dalam modal ventura, lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-Musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.



Skema al-Musyarakah²⁰⁸

²⁰⁸ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h. 94.

2. *Al-Mudharabah*, merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Aplikasi dalam perbankan, mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, diterapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang khusus seperti, tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Deposito special dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja. Adapaun pada sisi pembiayaan modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus disebut dengan mudharabah muqayyadah, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.



Skema al-Mudharabah²⁰⁹

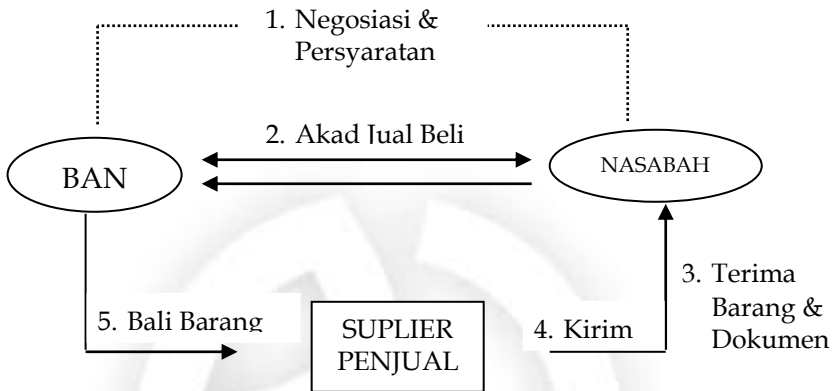
b. Sale and Purchase

1. *Bai' al-Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²¹⁰ Selanjutnya penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi dalam perbankan murabahah KPP (kepada Pemesan Pembelian) umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk

²⁰⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h. 98.

²¹⁰ Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul – Qalam, 1988), vol. II, h. 216.

pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit*. Di Indonesia banyak menggunakan *al-Murabahah* secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya untuk modal jangka pendek dengan sekali akad. *Al-Murabahah* tidak tepat untuk modal kerja.²¹¹

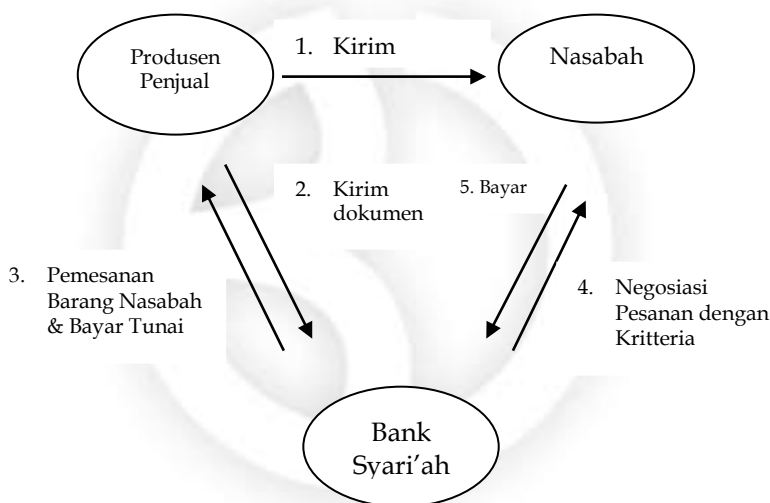


2. *Bai' as-Salam* merupakan akad jual beli yang dimana pembayaran dimuka dan barang di kemudian hari. Aplikasi dalam perbankan biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai. Bank tidak berniat untuk menjadikan barang-barang tersebut sebagai simpanan. Dilakukanlah *bai' as-salam* kepada pembeli kedua, misalnya kepada Bulog, pedagang pasar induk, atau grosir. Inilah yang dalam perbankan Islam dikenal sebagai *salam paralel*. *Bai' as-salam* juga dapat diaplikasikan pembiayaan barang industri, misalnya produk garmen (pakaian jadi) yang ukuran barang tersebut sudah dikenal umum. Caranya, saat nasabah mengajukan pembiayaan untuk pembuatan garmen, bank

²¹¹ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h. 101-107.

merefrensikan penggunaan produk tersebut. Hal itu berarti bahwa bank memesan dari pembuat garmen tersebut dan membayarnya pada waktu pengikat kontrak. Bank kemudian mencari pembeli kedua. Pembeli tersebut bisa saja rekanan yang telah direkomendasikan oleh produsen garmen tersebut. bila garmen itu telah selesai diproduksi, produk tersebut diantarkan kepada rekanan tersebut. rekanan kemudian membayar kepada bank, baik secara mengangsur maupun tunai.²¹²

Produsen ditunjuk oleh Bank



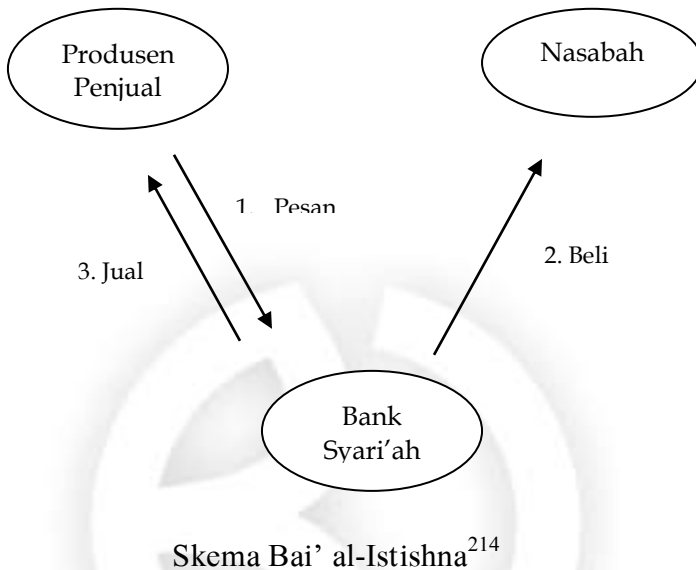
Skema Bai' as-Salam²¹³

3. *Bai' al-Istishna*, dalam kontrak ini, pembuatan barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan

²¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h. 112.

²¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h. 113.

menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.



I. Sistem dan Perhitungan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, musyarakah, mudharabah, muzara'ah dan musaqah. Sesungguhnya demikian, prinsip yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan mudharabah, sedangkan muzara'ah dan musaqah untuk pembiayaan pertanian.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi Lembaga Keuangan Tanpa Bunga atau Bank Islam. Bagi hasil, sering disebut orang sebagai pengganti nama “bunga”. Untuk menjawab perihal ini, marilah kita mencoba menganalisis perhitungan bagi hasil.

²¹⁴ Muhammmad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, h. 115.

Dalam aplikasinya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2. Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan)

Perhitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Metode perhitungan bagi hasil dalam ekonomi syari'ah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²¹⁵

1. Menghitung perhitungan saldo rata-rata harian (*daily average*) sumber dana sesuai klafikasi dana yang dimiliki.

$$DA = \frac{\text{Total Dana}}{\sum n}$$

Dimana:

DA = Saldo rata-rata harian

N = waktu atau hari

2. Menghitung saldo rata-rata tertimbang (*weight average*) sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya.

$$WA = \sum (\text{total dana} \times \text{jumlah hari periode dana})$$

3. Menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu.

²¹⁵ Lihat contoh perhitungan di www.inkopsyahbmt.co.id, diakses tanggal 27 Agustus 2014, pukul 17.04.

$$DP = \frac{WA}{TWA} \times TP$$

Dimana:

WA = saldo rata-rata tertimbang

TWA = total saldo rata-rata tertimbang

TP = total pendapatan periode tertentu

4. Membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang.
6. Memperhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan (akad)
7. Mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbahnya kepada pemilik dana sesuai dengan klasifikasi dana yang ditanamkan.

Contoh:

Pada awal Januari 2014, Pak Nasrullah membuka tabungan atau simpanan *mudharabah* pada lembaga keuangan syari'ah. Data transaksi yang terjadi selama bulan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	i) Keterangan	(i) Jumlah
06 – Jan	Setoran awal	3.000.000
10 – Jan	Setoran	10.000.000
25 – Jan	Penarikan	2.500.000
29 – Jan	penarikan	500.000

Perhitungan saldo rata-rata harian dana Pak Nasrullah selama bulan Januari adalah dengan menghitung saldo rata-rata tertimbang dibagi dengan jumlah hari dalam bulan bersangkutan.

Tabel saldo rata-rata harian:

No	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1	06 Jan – 10 Jan	5	3.000.000	15.000.000
2	11 Jan – 25 Jan	15	13.000.000	195.000.000
3	26 Jan – 29 Jan	4	10.500.000	42.000.000
4	30 Jan – 31 Jan	2	10.000.000	20.000.000
Total				272.000.000

Saldo rata-rata Pak Nasrullah adalah:

Rp. $272.000.000 : 31 = \text{Rp. } 8.774.193,55$

Setelah saldo rata-rata harian dihitung, selanjutnya dihitung jumlah distribusi pendapatannya.

Misalnya, diketahui pendapatan LKS tersebut pada bulan Januari adalah sebesar Rp. 250.000.000. saldo rata-rata harian untuk masing-masing jenis klasifikasi dana yang dikelola oleh lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

- Simpanan mudharabah = 50.000.000 (10%)
 - Investasi mudharabah 1 bln = 125.000.000 (25%)
 - Investasi mudharabah 3 bln = 110.000.000 (22%)
 - Investasi mudharabah 6 bln = 75.000.000 (15%)
 - Investasi mudharabah 12 bln = 140.000.000 (28%)
- 500.000.000

Dengan data-data diatas, maka dapat dihitung distribusi pendapatan sesuai klasifikasi dana yang dikelola, yaitu sebagai berikut:

Simpanan Mudharabah	10%	250.000.000	25.000.000
Investasi mudharabah 1 bln	25%	250.000.000	62.500.000
Investasi mudharabah 3 bln	22%	250.000.000	55.000.000

Investasi mudharabah 6 bln	15%	250.000.000	37.500.000
Investasi mudharabah 12 bln	28%	250.000.000	70.000.000
Total			250.000.000

Nisbah (Rasio Bagi Hasil)

Nisbah adalah merupakan rasio bagi hasil yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak yang melakukan akad kerjasama usaha, yaitu pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib), dimana nisbah ini tertuang di dalam akad yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dengan menggunakan data-data pada contoh diatas, akan diilustrasikan perhitungan nisbah.

Misalkan, diketahui nisbah yang telah disepakati antara Pak Nasrullah dengan pihak LKS sebesar 60:40, maka distribusi pendapatan untuk Pak Nasrullah adalah sebagai berikut:

Nisbah adalah sebagai berikut:

$$25.000.000 \times 60\% = 15.000.000$$

Distribusi pendapatan mudharabah untuk Pak Nasrullah simpanan mudharabahny adalah:

$$\frac{8.774.183,55}{500.000.000} \times 15.000.000 = 263.225.81$$

BAB VII

ASURANSI SYARIAH

A. Definisi Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda *assurantie*. Dan didalam bahasa hukum Belanda kata *verzekering*.²¹⁶ Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *insurance*.²¹⁷ Kata tersebut kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”.²¹⁸ Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassurceerde* bagi tertanggung.²¹⁹ Dalam bahasa Arab asuransi digunakan istilah *at-ta'min*,²²⁰ penanggungnya disebut dengan *mu'ammin*, dan tertanggung disebut dengan *mu'aman lahu* atau sering disebut dengan *musta'min*.²²¹

Paling tidak ada tiga aliran pemikiran tentang asuransi; *pertama* aliran tersebut dengan aliran transfer. Aliran ini memandang asuransi sebagai alat pemindahan risiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung adalah orang atau

²¹⁶ Belanda memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di Indonesia dengan mengundang *bugelijk wetboek* (Kitan Undang-Undang Hukum Perdata), dan *wetboek van koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dengan pengumuman tanggal 30 April 1874, dan termuat dalam staadblad 1847. Mehr dan Cammack, *Dasar-Dasar Asuransi*, Penyadur A. Hasyimi, (Jakarta: Balai Aksara, 1981), h. 9.

²¹⁷ Johs M. Echols dan Hasan Syadiliy, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1990), h. 326.

²¹⁸ Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 63.

²¹⁹ Wirjono Projodikoro, *Hukum Auransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1981), h. 1.

²²⁰ Ahmad Aziz Dahlam dkk, (ed)., *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 138.

²²¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 205.

perusahaan yang menghadapi suatu risiko, dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul risiko. *Kedua*, aliran yang mempelopori Profesor Mehr dan Cammack, yang mengabaikan aspek transfer dan lebih memusatkan perhatiannya pada aspek teknik. Dalam aliran ini asuransi didefinisikan sebagai alat sosial untuk mengurangi risiko dan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap risiko, sehingga kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu. Sebagai aliran *ketiga* yang dimotori oleh profesor Willet mencoba menggabungkan kedua aliran diatas. Dalam aliran ini asuransi didefinisikan sebagai alat sosial untuk menumpulkan dana. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mengatasi kerugian modal yang tidak tentu dilaksanakan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang.²²²

Dari pasal 246 KUH Dagang²²³, melukiskan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu.²²⁴

Pada penjelasan diatas mengenai definisi asuransi , maka paling tidak ada tiga unsur pokok penting berkenaan dengan asuransi, yaitu; *pertama* pihak penjamin, yaitu pihak yang berjanji

²²² Mehr & Cammack, *Manajemen Asuransi*, Pen. A. Hasyimi, (Jakarta; Balai Aksara, 1981), h. 23.

²²³ Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung diri kepada seorang tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Lihat Subekti & Tjitrosudibio, *KUHD dan Peraturan Kepailitan*, cet. 26, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000).

²²⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 22.

akan membayar uang kepada pihak terjamin. Pembayaran tersebut baik dilaksanakan secara sekaligus atau bahkan dengan berangsur-angsur. Pembayaran tersebut dilakukan bila terlaksana unsur ketiga.²²⁵

Kedua, pihak terjamin, yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada pihak penjamin. Sama halnya, dengan pembayaran klaim asuransi dapat dilakukan secara sekaligus maupun bernagsur-angsur. Sedangkan unsur yang *ketiga* adalah suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi, yang disebut dengan risiko.²²⁶

Bentuk badan hukum perasuransian di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No.2 tahun 1992 dalam bab IV pasal 7, yang pada intinya berbunyi:

1. Perusahaan asuransi hanya bisa dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perusahaan perseroan, koperasi, perseroan terbatas, dan usaha bersama (mutual);
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), usaha konsultan aktuaria dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan;
3. Ketentuan tentang usaha perasuransian yang berbentuk usaha bersama (mutual) diatur lebih lanjut dalam undang-undang.²²⁷

B. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Falsafah yang mendasari asuransi syari'ah bahwa umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Agar kehidupan bersama dapat terselenggara, maka sesama umat manusia harus tolong-menolong, saling bertanggung jawab, dan saling menanggung antara yang satu dengan yang lain. *Takaful* yang berarti saling menanggung antar-umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Atas dasar

²²⁵ Mehr & Cammack, *Manajemen Asuransi*, Pen. A. Hasyimi, h. 4.

²²⁶ Wirjono Projodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, h. 4.

²²⁷ Cst. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 443.

pijakan tersebut, diantara peserta bersepakat menanggung bersama diantara mereka atas risiko yang diakibatkan oleh kematian, kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Dengan demikian, sistem asuransi syari'ah harus bersifat universal, berlaku secara umum.

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pedoman umum asuransi syari'ah, asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling tolong-menolong yang dikenal dengan istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuwah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam menghadapi malapetaka.²²⁸

Bab ini akan menguraikan asuransi menurut Islam, pertumbuhan dan perkembangan pada khususnya, prinsip asuransi, perbedaan konvensional dan syari'ah, serta jenis-jenis asuransi. Bab ini juga akan meringkas kendala dalam pengembangan asuransi syari'ah.

C. Pertumbuhan dan Perkembangan

Tidak diterangkan secara jelas kapan praktek asuransi dimulai dalam Islam. Akan tetapi, ini sangat tepat untuk menyimpulkan bahwa transaksi asuransi telah ada sebelum zaman Nabi Muhammad Saw. dan dikembangkan secara berangsur-angsur. Pada awal abad 19, ulama mazhab *Hanafi* Ibn Abidin (1784-1836) menjadi ulama Islam pertama yang datang dengan apa yang sekarang digambarkan sebagai sebuah kontrak asuransi.²²⁹ Sebagai hasilnya, dapat kita lihat saat ini beberapa

²²⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), h. 3-4.

²²⁹ Ernest Klingmuller, *The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries, in Islamic Culture*, Vol. 43, Januari 1969, h. 30.

perusahaan asuransi yang bekerja pada prinsip-prinsip yang bersifat ketuhanan. Pengembangan asuransi Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 6 tahap berikut ini:

1. Praktek dari ajaran al-Aqilah pada masa lampau suku-suku bangsa Arab sebagai kebiasaan adat istiadat. Menurut beberapa ensiklopedia, transaksi asuransi dimulai dari praktek masa Arab kuno. Ini merupakan kebiasaan Arab kuno dimana ketika salah satu anggota sukunya dibunuh oleh seorang anggota dari suku lain, maka keluarga dari pihak pembunuh harus membayar diyat kepada ahli waris pihak korban dengan uang darah sebagai kompensasi. Keluarga dari pihak pelaku ditunjuk sebagai *Aqilah* dalam bahasa Arab,²³⁰ dan harus membayar uang tebusan²³¹ atas nama pihak pembunuh. Menurut Dr. Muhammad Muhsin Khan, kata *Aqila* berarti *Asaba*, yang menandakan famili pihak ayah dari pihak pembunuh.²³² Maka dari itu, pemikiran utama dari ajaran *Aqilah* sebagaimana yang dipraktekkan oleh suku arab kuno menginginkan orang-orang dalam suku tersebut agar dapat membuat kontribusi keuangan atas nama pihak pembunuh untuk mengganti ahli waris pihak korban. Kontribusi moneter diketahui sebagai uang tebusan. Kesiap-siagaan suku Arab kuno pada saat itu untuk membayar kompensasi adalah sejenis perlindungan finansial yang diberikan kepada ahli waris dari korban yang meninggal.

²³⁰ Lihat Aqila dalam Thomas Patric Hughes, *Dictionary of Islam*, (New Delhi, India: Cosmo Publications, 1982).

²³¹ Lihat Ali Ibn Abi Sakar Murghimani, *al-Hedaya* (Trans Eng), Charles Hamilton, iThe Hedaya, *Vol.4, Book 51*, (Lahore, Pakistan: Pemier Book House, 1982), h. 670.

²³² Lihat *Sahih al-Bukhari* (Trans Eng), Muhammad Mushin Khan, *The Translation of The Meanings of Sahih al-Bukhari*, (Lahore, Pakistan: Kazi Publications 1979), h. 34.

2. Kebiasaan Rasulullah Saw. Pengembangan praktek asuransi selama zaman Rasulullah Saw dapat dilihat dalam situasi berikut ini:

a. Penerimaan praktek *Aqilah* Arab kuno. Rasulullah telah menerima konsep *Aqilah* sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh suku arab kuno. Hal ini dapat dibenarkan dari beberapa ketetapan atau *Sunnah*. Rasulullah Saw bersabda:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan pada suatu saat dua wanita dari Huzail bertengkar ketika salah satu dari mereka memukul wanita yang lain dengan batu dan membunuh korban serta bayinya yang ada dalam kandungan. Ahli waris korban memperkarakan kejadian tadi kepada Rasulullah Saw yang memutuskan bahwa kompensasi bagi wanita yang terbunuh adalah uang tebusan (diyat) yang dibayarkan oleh ‘Aqila’ (keluarga dari pihak ayah) pihak yang membunuh.”²³³

b. Perundang-undangan yang relevan dalam Konstitusi Madina Konstitusi pada abad 622 SM. Dr Celal Vanicery menemukan bahwa konstitusi dunia Muslim pertama disiapkan oleh Rasulullah Saw tidak lama sesudah beliau ber-migrasi ke Madinah pada abad 622 SM, yang dimaksudkan untuk semua orang di Madina, seperti Muhajirin, Ansar, Yahudi dan Nasrani. Konstitusi tersebut menyimpulkan dan diperkenalkan semacam jaminan sosial, yang mengandung tiga hal:

1) Melalui praktek *al-Diyah* atau uang tebusan harus dibayar satu sama lain oleh *Aqilah* (keluarga pelaku) kepada ahli waris yang meninggal (korban) untuk menyelamatkan

²³³ Shahih al-Bukhari

pelaku dari beban menurut undang-undang.²³⁴ Rasulullah Saw menerapkan aturan pada pasal 3 dari yang dilakukan konstitusi Madinah sebagai berikut

*“diantara imigran ‘Quraish’ harus bertanggungjawab atas perkataannya dan membayar uang tebusan dalam kerjassam timbal balik....”*²³⁵

- 2) Melalui pembayaran fidya: Rasulullah Saw juga telah mengumumkan ketentuan dalam konstitusi pertama dalam menyelamatkan nyawa seorang tahanan. Ketentuan ini dinyatakan ketika seseorang yang dijadikan tahanan perang oleh pihak musuh, *Aqilah* dari tahanan tersebut harus membayar tebusan kepada pihak musuh, dalam rangka (dengan tujuan) membebaskan tahanan.²³⁶ Bayaran disini dapat dipertimbangkan sebagai bentuk asuransi sosial. Rasulullah Saw bersabda: *“Diantara imigran ‘Quraish’ harus bertanggung jawab atas membebaskan tahanan dengan cara membayar tebusan mereka, sehingga kerjasama timbal balik diantara orang-orang yang beriman tetap berdasarkan prinsip-prinsip kebaikan dan keadilan*
- 3) Dengan cara bentuk lain dari asuransi sosial yang termasuk dalam konstitusi pertama: seperti yang telah disebutkan di awal, masyarakat bertanggung jawab atas ketentuan usaha

²³⁴ Rahim MA, *Islamic Arthmanaitik Nirapatta wa Binma*, (Bangladesh, Dhaka: Islamic Foundation, 1983), h. 106

²³⁵ Pasal-pasal konstitusi dari 3-12 menekankan pembayaran uang tebusan yang bersandarkan pada ajaran *Aqilah*.

²³⁶ N. Hamidullah, *Introduction to Islam*, Sh Muhammad Ashraf, 1983, paragraf 362, h. 146.

patungan dengan pengertian timbal balik kearah pemberian bantuan kepada yang memerlukan, yang sakit dan kaum miskin. Ketiga modal ini adalah unsur-unsur asuransi sosial yang diperkenalkan dan dikerjakan dalam sudut pandang ketentuan yang relevan dari konstitusi Madinah pertama.

- c. Praktek para sahabat. Terdapat pengembangan yang lebih jauh di dalam asuransi berdasarkan transaksi selama periode Khalifah kedua, Sayedina Umar bin Khatab, pada periode ini, pemerintah bahkan menganjurkan rakyatnya untuk menjalankan ajaran *Aqilah*. Sayedina Umar memerintahkan bahwa, seorang Dewan Muhajirin ditetapkan diberbagai daerah dan bagi yang namanya tercatat didewan itu mempunyai hutang satu sama lain sebagai timbal balik. Dengan begitu mereka harus memberikan uang tebusan untuk pembunuhan yang dilakukan seseorang dari sukunya sendiri.²³⁷ Oleh sebab itu, diperkirakan bahwa ajaran *Aqilah* telah dikembangkan lebih jauh selama masa Khalifah Islam kedua. Ini menggambarkan bahwa unsur-unsur jaminan telah dipraktekkan pada masa itu.
- d. Pengembangan antar abad 14-17. Pada masa ini seorang kelompok Sufi Kazeerinya sangat aktif, terutama dipelabuhan kota di Malabar dan China. Kelompok ini melayani semacam perusahaan asuransi perjalanan awak kapal. Mereka berhubungan dengan pusara Abi Ishaq Ibrahim Ibn Shariyahb yang

²³⁷ Mohd Ma'sum Billah, *Pencerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2009), h. 142.

dianggap sebuah perlindungan terhadap bahaya berlayar.²³⁸

- e. Pengembangan di abad 19. Ibnu Abidin (1784-1836), seorang Ulama Mahdzab Hanafi, adalah orang pertama yang membahas pemikiran asuransi dan badan hukumnya. Beliau juga adalah orang pertama yang menemukan asuransi dalam konteks konstitusi yang sah, dan bukan lagi sebagai pelayanan yang berlaku umum. Pendapat Ibnu Abidin tentang asuransi menjadi institusi yang sah, membuat mata umat Muslim terbuka, terutama bagi mereka yang menolak keabsahan praktek asuransi. Hal itu mendorong umat Muslim yang lain untuk menerima pemikiran keterlibatan dalam kontrak asuransi. Klingmuller yang mengklaim bahwa, umat Muslim mulai terlibat aktif dalam asuransi dengan cara membelinya dari perusahaan asing, tetapi juga dengan mendirikan perusahaan asuransi dan menjadi pihak yang mengasuransikan mereka sendiri.²³⁹
- f. Pengembangan di abad 20. Pada abad 20 ahli hukum Islam yang terkenal, adalah Muhammad Abduh mengeluarkan dua fatwa. Fatwa yang pertama menyebutkan bahwa, suatu transaksi asuransi sama halnya seperti teknik finansial *al-Mudharabah*, dan faktwa yang kedua menyatakan bahwa, suatu transaksi yang serupa dengan asuransi jiwa adalah sah.²⁴⁰

²³⁸ Rispler Vardit, *Insurance in the World of Islam, Origins and Current*, (USA: UMI, 1985), h. 29.

²³⁹ Lihat E. Klingmuller, "The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries" in *Islamic Culture*, Vol 43, 1969, h.30.

²⁴⁰ Rispler Vardit, *Insurance in the World of Islam, Origins and Current*, h. 32.

Pertumbuhan terus-menerus dan pengembangan praktek asuransi berdasarkan *syari'ah* pada abad 20, baik itu negara Muslim dan non-Muslim, cukup memuaskan walaupun pada kenyataannya, masih ada beberapa bagian yang tidak atau belum seusia dengan kebutuhan dan keperluan masyarakat saat ini. Sayangnya, banyak dari kalangan sarjana yang menentang praktek asuransi ini, terutama asuransi jiwa, tanpa memberikan alternative yang lain untuk umat Islam. Walaupun terdapat beberapa unsur praktek asuransi konvensional saat ini, yang tidak diketahui oleh *syari'ah*, hal ini tidak berarti bahwa seluruh praktek asuransi tidak sah dan melanggar hukum. Malahan, disini disarankan bahwa, walaupun beberapa aspek dari asuransi konvensional tidak boleh dikerjakan oleh umat Muslim karena mereka memasukkan beberapa unsur yang tidak sah dalam pandangan *syari'ah*, hal ini menjadi tanggung jawab para sarjana Islam untuk lebih inovatif dan keluar dengan alternative jenis asuransi Islam. Jenis alternative ini, menghapus unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam, dikemudian hari akan memastikan bahwa umat Muslim dilindungi dari segala bentuk resiko dan kerugian yang tidak diharapkan.²⁴¹

Berikut ini adalah sebuah contoh perusahaan asuransi Islam yang beroperasi didunia saat ini.²⁴²

Perusahaan Auransi	Negara	Tahun
Perusahaan Asuransi Islam	Saudan	1979
Perusahaan Asuransi Islam-Arab	Saudi Arabia	1979
Perusahaan Asuransi Islam-Arab	UAE	1980

²⁴¹ Mohd Ma'sum Billah, *Pencerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*, h. 143.

²⁴² Ini disarikan dari M. Ataur Rahman, "*Akti Desher Orthomaitik Unnayona Islami Bimer Vornica: Bangladesh Prekkith, Thought on Economics*", Vol. 4, N0.3-4, 1994, h. 91.

Darul – Mal – Islam	Jenewa	1981
Syarikat Takaful al-Islamiyah	Bahrain	1983
Perusahaan Islamic Takaful dan Re-Takaful	Bahama	1983
Islamic Takaful Co	Luxemburg	1983
Al-Bakarah Insurance Co	Sudan	1984
Islamic Insurance and Re-Insurance Co	Bahrain	1985
Syarikat Takaful malaysia Sdn Bhd perusahaan ini mempunyai 118 cabang diseluruh dunia ²⁴³	Malaysia	1992
Syarikat Takaful Brunei Daru-Salam	Brunei	1992
PT. Syarikat Takaful Indonesia ²⁴⁴	Indonesia	1994
Syarikat Takaful Singapore	Singapore	1995
Islamic Insurance Co	Qatar	1995
MNI Takaful Sdn Bhd	Malaysia	1993
ASEAN Takaful Group (ATG)	Malaysia	1996
ASEAN Re-Takaful International (LABUAN) LTD (ARIL)	Malaysia	1997

Selain perusahaan asuransi Islam yang terdaftar diatas, Organisasi Konfrensi Islam (OKI) juga saat ini berinisiatif untuk menetapkan sebuah Badan Hukum (corporation) Re-Insurance

²⁴³ <http://www.takaful-malaysia.com>, diakses tanggal 18 Agustus 2014, pukul 13:36.

²⁴⁴ Profil of Asuransi Takaful Umum Indonesia (An information brouchure, nd) at p 2.

International.²⁴⁵ Pada saat ini pembelajaran dan penelitian dilakukan oleh syari'ah untuk memastikan bahwa teori dan praktek asuransi difahami oleh semua dan umat Muslim saat ini dapat memperoleh keuntungan.

D. Prinsip Asuransi Syari'ah

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa syari'ah sama-sama menerapkan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Prinsip ini merupakan fondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syari'ah, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Maidah ayat 2, az-Zukhruf ayat 32 dan al-Anfaal ayat 72. Selain prinsip *ta'awun* asuransi kerugian juga menerapkan beberapa prinsip berikut:

1. Berserah Diri dan Ikhtiar

Sebagaimana kita ketahui, Allah memiliki menguasai seluruh harta kekayaan. Allah berhak penuh untuk memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Doa yang telah menetapkan seorang hamba menjadi kaya dan Dia pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Baqarah: 255 dan 284, al-Maidah: 120, Thaha: 6. Kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan amanah sebagai khalifah di muka bumi diwajibkan memanfaatkan (dalam harta, dan sebagainya) yang telah dititipkan oleh-Nya untuk kemaslahatan (kemanfaatan) manusia. Untuk itu kita wajib saling menolong dan bekerja sama.²⁴⁶

2. Saling Bertanggung Jawab

Seluruh peserta asuransi berjanji/berakad saling bertanggung jawab. Bagi setiap muslim, rasa tanggung jawab merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab timbul atas dasar sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling

²⁴⁵ KM Murtaza Ali, *Insurance in Islam: Some Aspects of Islamic Insurance*, Islamic Economics Research Bureau, Dhaka, 1991, h. 45.

²⁴⁶ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, h. 83.

membantu dan merasa mementingkan kebersamaan demi mendapatkan kemakmuran bersama untuk mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis. Konsep ini dalam Islam dikenal sebagai *fardhu kifayah*. Beberapa hadist Rasulullah yang dijadikan landasan atas prinsip saling bertanggung jawab:

“Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di bawah tanggungan jawabmu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika ada anggota masyarakat yang tidak mampu membayar iuran *ta’awun* atau *tabarru*, menjadi kewajiban orang kayalah untuk membayarkan iuran mereka, sebagaimana firman Allah di Surah al-Ma’un ayat 1-3, adz-Dzaariyaat ayat 19.²⁴⁷

3. Saling Bekerja Sama dan Saling Membantu

Saling bekerjasama dan bantu-membantu merupakan salah satu keutamaan umat Islam sebagai aplikasi dari sifat takwa kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Surah al-Maidah ayat 2 dan hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

“Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Islam sebagai *adhién jama’i* yang berarti mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan berbagai masalah untuk mencapai keberhasilan. Konsep kerja sama dalam masyarakat merupakan *fardhu kifayah* atau sebagai kewajiban bersama yang harus dilaksanakan. Asuransi merupakan salah satu kegiatan untuk mencapai kemakmuran bersama melalui usaha saling bantu jika salah satu peserta terkena musibah, dengan mengumpulkan sejumlah dana yang berasal dari iuran anggota masyarakat asuransi.²⁴⁸

²⁴⁷ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah*, h. 84.

²⁴⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah*, h. 85.

4. Saling Melindungi dan Berbagi Kesusahan

Peserta asuransi satu sama lain saling melindungi dari kesusahan dan bencana karena keselamatan serta keamanan merupakan pokok bagi semua orang. Allah berfirman dalam Surat Quraisy mengenai pemberian janji keselamatan dari ancaman kelaparan dan bencana. Kelaparan merupakan cerminan kebutuhan jasmani, sedangkan rasa ketakutan cerminan kebutuhan rohani. Prinsip *tadhamun islami* menyatakan bahwa yang kuat menjadi pelindung yang lemah, orang kaya melindungi orang miskin. Pemerintah menjadi pelindung terhadap kesejahteraan dan kemandirian rakyatnya.²⁴⁹

Namun prinsip yang paling utama atau inti merupakan fondasi baik dalam konsep asuransi kerugian maupun asuransi jiwa adalah prinsip “tolong-menolong”.

E. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

Perbedaannya utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep takaful, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'win*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, “*Dan saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan*”.²⁵⁰

Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada takaful, investasi dana didasarkan sistem syari'ah dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba (Advertorial Takaful, Republika, 22 Juli 2002). Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem

²⁴⁹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, h. 86.

²⁵⁰ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, h. 6.

konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan kemanapun. Adapun pada asuransi takaful, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada takaful keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam takaful adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem takaful ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

Dari setiap premi yang dibayarkan, sekitar 5% akan dimasukkan ke dana peserta. Ini sebagai tabungan bila terjadi klaim peserta secara tiba-tiba. Dana yang sebesar 5% itu disebut dana *tabarru'*. Sumbangan (*tabarru'*) sama dengan hibah (pemberian), oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali. Kalau menjadi peristiwa, maka diselesaikan menurut syariat. Sisanya 95% akan segera ditanamkan di sejumlah portofolio investasi yang sesuai dengan syari'ah Islam, yakni saham, reksa dana syari'ah, dana penyertaan langsung dana talangan, deposito, serta hipotek. Setelah dikurangi beban asuransi, surplus kumpulan dana itu akan dibagikan kepada peserta dengan sistem bagi hasil. Nisbahnya berkisar 70% untuk perusahaan asuransi dan 30% untuk peserta. Proporsi ini bisa meningkat menjadi 60:40 bila saja hasil investasi meningkat dengan tajam. Ini berlaku untuk semua produk asuransinya. Inilah yang membedakan dengan produk asuransi konvensional. pada asuransi konvensional keuntungan ini menjadi milik perusahaan asuransi.²⁵¹

Hal menarik lainnya berkaitan dengan perbedaan asuransi syari'ah dengan konvensional adalah soal dana hangus. Pada

²⁵¹ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, h. 11-13.

asuransi konvensional dikenal dana hangus, yakni ketika peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional *nonsaving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau membeli keuntungan perusahaan asuransi. Sedangkan dalam konsep asuransi syari'ah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syari'ah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.²⁵²

Secara birokrasi, asuransi syari'ah berhubungan dengan dua lembaga negara, yaitu Departemen Keuangan dan Departemen Agama. Peran serta Departemen Agama melalui lembaga MUI dalam bentuk pendirian DSN MUI. Tanggung jawabnya secara langsung diwujudkan dengan pembentukan Dewan Syari'ah di setiap perusahaan asuransi syari'ah yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan bisnis secara *syar'i*. Hal ini tidak dikenal pada asuransi konvensional yang hanya cukup berhubungan dengan Departemen Keuangan.²⁵³

²⁵² Mustafa Edwin Nasutuon, ddk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 300.

²⁵³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, h. 14.

F. Jenis-Jenis Asuransi

Pada saat ini telah berkembang berbagai jenis asuransi di masyarakat, dalam manajemen risiko, asuransi memungkinkan berbagai dan menransfer risiko, inilah cara terbaik untuk mengganti kerugian. Kebanyakan orang tidak mengerti perbedaan mendasar pada jenis asuransi, padahal untuk menentukan program asuransi yang paling cocok dengan kebutuhan, kita harus mengenal jenis-jenis asuransi tersebut. Pada bab III pasal 3 UU No.2 tahun 1992 dijelaskan tentang jenis-jenis bidang usaha perasuransian di Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan di antaranya:

a. Asuransi Kerugian (*Ta'min al Adhrrar*)

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.²⁵⁴

b. Asuransi Jiwa (*Ta'min al Askhas*)

Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.

1. Term Assurance (Asuransi Berjangka)

Asuransi ini berbentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Contoh asuransi

²⁵⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, h. 35.

berjangka:

- a) Usia tertanggung 30 tahu
- b) Masa kontrak 1 tahun
- c) Rate prime (misal): 5 permil/tahun dari uang pertanggungan
- d) Uang pertanggungan: Rp. 100 Juta
- e) Premi tahunan yang harus dibayar: $5/1000 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 500.000$
- f) Yang ditunjuk sebagai penerima UP: Istri (50%) dan anak pertama (50%)

2. Whole Life Assurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

Merupakan tipe lain dari asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia kapan pun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada term assurance. Karena klaim pasti akan terjadi maka premium akan lebih mahal dibanding premi term assurance dimana klaim hanya mungkin terjadi. Polis whole life merupakan polis substantif dan sering digunakan sebagai proteksi dalam jaminan.

3. Endowment Assurance (Asuransi Dwiguna)

Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan. Contoh:

- a) Usia tertanggung 30 tahun
- b) Masa kontrak 10 tahun
- c) Rate Premi (misal): 85 permil/tahun dari uang pertanggungan
- d) Uang pertanggungan: Rp. 100 Juta
- e) Premi yang harus dibayar: $85/1000 \times 100.000.000 = \text{Rp. } 8.500.000,-$
- f) Yang ditunjuk sebagai penerima UP: istri (50%) dan anak pertama (50%).
 - 1) Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi sebagai

penanggung akan membayar uang pertanggungan sebesar 100 juta kepada yang ditunjuk

- 2) Bila tertanggung hidup sampai akhir kontrak, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan sebesar 100 juta.

c. Re-Asuransi

Perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.²⁵⁵

G. Kendala Pengembangan Asuransi Syariah

Kendala terbesar yang dihadapi oleh industri asuransi syari'ah bersumber pada dua hal utama yaitu permodalan dan sumber daya manusia. Kendala yang lain seperti masalah, ketidaktahuan masyarakat terhadap produk asuransi syariah, image dan lain sebagainya merupakan akibat dari dua masalah utama tersebut.

1. Minimnya Modal

Beberapa hal yang menjadi penyebab relative rendahnya penetrasi pasar asuransi syari'ah dalam sepuluh tahun terakhir adalah rendahnya dana yang memback up perusahaan asuransi syari'ah, promosi dan edukasi pasar yang relative belum dilakukan secara efektif (terkait dengan lemahnya dana), belum timbulnya industri penunjang asuransi syari'ah seperti broker-broker asuransi syari'ah, agen, adjuster, dan lain sebagainya, produk dan layanan belum diunggulkan diatas produk konvensional, posisi pasar yang masih ragu antara penerapan konsep syari'ah yang menyeluruh dengan kenyataan bisnis dilapangan yang terkadang sangat jauh dari prinsip syari'ah, dukungan kapasitas re-asuransi yang masih

²⁵⁵ Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, h. 35. Lihat juga www.asuransitakaful.net, diakses tanggal 20 Agustus 2014.

terbatas (terkait jua dengan dana) dan belum adanya inovasi produk dan layanan yang benar-benar digali dari konsep dasar syari'ah.

2. Kurang SDM yang Profesional

Terus bertambahnya perusahaan asuransi syari'ah merupakan kabar baik bagi perkembangan industri tersebut. Namun sayangnya hal itu tidak diimbangi dengan ketersediaan SDM asuransi syari'ah yang berkualitas. Seringkali pembukaan cabang atau divisi asuransi syari'ah baru hanya didukung jumlah SDM terbatas. Berdasarkan data Islamic Insurance Society (IIS) per maret lalu, sekita 80% dari seluruh cabang atau divisi asuransi syari'ah belum memiliki ajun ahli syari'ah. IIS mengestimasi asuransi syari'ah Indonesia per Maret lalu memiliki sekitar 200 cabang dan hanya didukung 30 ajun ahli syari'ah. Jumlah yang cukup sedikit bila dibandingkan kondisi SDM di asuransi konvensional, per maret lalu sebagian besar cabang asuransi konvensional telah memiliki sedikitnya seorang ajun asuransi syari'ah. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan departemen keuangan. Padahal, keahlian ajun ahli syari'ah sangat dibutuhkan dalam mendorong perkembangan inovasi produk asuransi syari'ah. Saat ini, sebagian besar cabang atau divisi asuransi syari'ah lebih memilih untuk meniru produk asuransi konvensional lalu dikonversi menjadi syari'ah (mirroring).

3. Ketidaktahuan Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syari'ah

Ketidaktahuan mengenai produk asuransi syari'ah (takaful) dan mekanisme kerja merupakan kendala terbesar pertumbuhan asuransi jiwa ini. Akibatnya, masyarakat tidak tertarik menggunakan asuransi syari'ah dan lebih memilih jasa asuransi konvensional. itulah hasil riset Synovate mengenai alasan memilih asuransi syari'ah. Ketua umum Asuransi Syari'ah di Indonesia Muhammad Shaifie Zein mengatakan, dari hasil survei Synovate

sebagian besar responden tidak tertarik pada asuransi jiwa syari'ah.

4. Dukungan Pemerintah Belum Memadai

Meski sudah menunjukkan eksistensinya, masih banyak kendala yang dihadapi bagi pengembangan ekonomi syari'ah di Indonesia. Soal pemahaman masyarakat hanya salah satunya, kendala lainnya yang cukup berpengaruh adalah dukungan penuh dari para pengambil kebijakan di negeri ini, terutama menteri-menteri dan lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan ekonomi. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada masa kampanye pemilu tahun 2009 menyatakan dukungan ekonomi syari'ah, belum sepenuhnya mewujudkan dukungannya itu dalam bentuk program kerja tim ekonomi kabinetnya.

Kendala lainnya adalah masalah regulasi. Penerapan syari'ah yang semakin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syari'ah sangat mengharapkan regulasi untuk sistem ekonomi syari'ah ini bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Saat ini, peraturan tentang permodalan masih menjadi kendala perbankan syari'ah untuk melakukan penetrasi dan ekspansi pasar.

5. Image

Salah satu kendala terbesar bisnis asuransi syari'ah di Indonesia dan negara lainnya, menurut Zein adalah meyakinkan masyarakat akan keuntungan menggunakan asuransi syari'ah. "Perlu mensosialisasikan asuransi yang berbasis syari'ah, bukan hanya dari sisi agama, tetapi memperlihatkan keuntungan". Kenyataan dilapangan menunjukkan, bahwa para pelaku ekonomi syari'ah masih menghadapi tantangan yang berat untuk

menanankan prinsip syari'ah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islamnya itu sendiri.²⁵⁶



²⁵⁶ Teori kendala asuransi syari'ah tersebut pernah disampaikan pada perkuliahan Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia bu Dr. Rahmani Timorita.

BAB VIII

PEGADAIAN SYARIAH

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*.²⁵⁷ Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁵⁸ sedangkan menurut Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, hingga orang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu.²⁵⁹ Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa barang ternak berada dibawah penguasaan pemberi pinjaman sampai penerima pinjaman melunasi hutangnya.

Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam *Kitab al-Mughni* adalah sesuatu benda dari harganya, apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitab *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadi benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.²⁶⁰ Dari beberapa pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa

²⁵⁷ Chairuman Pasaribu, dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 139.

²⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 159.

²⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Maarif, 1987), h. 139.

²⁶⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 157.

pengertian *rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Pengertian gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif bseperti yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetbook* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).²⁶¹

Selain berbeda dengan KUH Perdata, pengertian gadai menurut syariat Islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan hukum adat yang mana dalam ketentuan hukum adat pengertian gadai yaitu menyerahkan tanah untuk menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.²⁶²

a) Dasar Hukum Gadai

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad.

1. Al-Qur'an

Ayat al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 282 dan 283:

²⁶¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press), h. 89.

²⁶² Chairuman Pasaribu, dkk., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 140.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَانَمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٦٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah²⁶³ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya

²⁶³ Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya

sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁶⁴ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai

²⁶⁴ Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai

sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. As-Sunnah

Aisyah berkata bahwa Rasul bersabda: *“Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan meminjamkan kepadanta baju besi”*. (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari Abu Hurairah r.a. nabi Saw bersabda: *“tidak terlepas kepemilikan barang gadai pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.”* (HR. Asy’Syafii, al Daraquthni dan Ibnu majah).

Nabi bersabda: *“tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat dioperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”*. (HR. Jamaah, kecuali Muslim dan an-Nasai).

Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah Saw bersabda: *“Apabila ada ternak digadaikan, maka punggungnya boleh dinaiki (oleh yang menerima gadai), karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Apabila ternak itu digadaikan, maka air susunya yang deras boleh diminum (oleh orang yang menerima gadai) karena ia telah mengeluarkan biaya (menjaga)nya. Kepada oarg yang naik dan minum, maka ia harus mengeluarkan biaya (perawatan)nya”*. (HP. Jamaah kecuali Muslim dan Nasai-Bukhari).

3. Ijtihad

Berkaitan dnegan pembolehan perjanjian gadai, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih

pendapat mengenai hal ini. Jumbuh ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, berargumentasi kepada perbuatan Rasulullah Saw. terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, karena melihat bepergian.²⁶⁵ Adh-Dhahak dan penganut madzhab az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak diisyaratkan kecuali pada waktu bepergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.²⁶⁶

b) Akad dan Rukun Gadai

Ada tiga akad dalam pegadaian syari'ah sebagai perjanjian saat peminjaman berlangsung:

- a) Akad Rahn. Rahn yang dimaksud dalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaia menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah / Rahin.
- b) Akad Ijarah. Akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik biaya Ijarah atas penyimpanan dan pemeliharaan barang bergerak milik nasabah / Rahin yang telah melakukan akad.
- c) Melalui akad Rahn. Nasabah (rahin) mendapat pembiayaan / pinjaman (qard) pada akad ini nasabah di bebani biaya administrasi untuk menutup cost proses pencairannya. (Fee penaksir barang, pengganti ATK,

²⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 141.

²⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, h. 91.

dll) kemudian sebagai jaminannya, nasabah menyerahkan barang bergerak dan selanjutnya pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya (Ijarah) kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa pegadaian bisa sah, jika memenuhi tiga syarat:

1. Harus berupa barang, karena utang tidak bisa digadaikan.
2. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang, seperti *mushaf*.
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah masa pelunasan utang gadai.

Berdasarkan tiga syarat diatas, maka dapat diambil alternatif dalam mekanisme perjanjian gadai, yaitu menggunakan tiga akad perjanjian:²⁶⁷

1. Akad al-Qardul Hasan, dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya upah atau *fee* kepada pegadaian (*murtahin*) yang telah menjaga atau merawat barang gadai (*marhun*).
2. Akad al-Mudharabah, dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha (pembiayaan investasi dan modal kerja). Dengan demikian, *rahin* akan memberikan bagi hasil (berdasarkan keuntungan)

²⁶⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, h. 161.

kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan, sampai barang yang dipinjam dilunasi.

3. Akad Bai' al-Muqayadah, sementara akad ini dilakukan jika *rahin* yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif, artinya dalam menggadaikan, *rahin* tersebut menginginkan modal kerja, berupa pembelian-pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan atau tidak dapat dimanfaatkan oleh *rahin* atau *murtahin*. Dengan demikian, *murtahin* akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan *rahin* atau *rahin* akan memberikan mark-up kepada *murtahin* sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Lebih jelasnya, akad utama yang diterapkan di pegadaian syari'ah adalah akad rahn (gadai).

c) Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Muhammad Anwar dalam buku Fiqh Islam menyebutkan rukun dan syarat sahnya perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

1. Ijab qabul (sighot)

Hal ini dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

2. Orang yang bertransaksi (aqid)

Syarat-syarat yang harus dioenuhi bagi orang yang bertransaksi gadai yaitu *rahin* (pemberi gadai) dan *murtahin* (penerima gadai) adalah:

- a. Telah dewasa;
 - b. Berakal;
 - c. Atas keinginan sendiri.
3. Adanya barang yang digadaikan (Marhun)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan

digadaikan oleh *rahin* (pemberi gadai) adalah:

- a. Dapat diserahterimakan
- b. Bermanfaat
- c. Milik *rahin* (orang yang menggadaikan)
- d. Jelas
- e. Tidak bersatu dengan harta lain
- f. dikuasai oleh *rahin*
- g. Harta yang tetap atau tidak dapat dipindahkan.

Abu Bakr Jabir al-Jazairi dalam buku Minhajul Muslim menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh digadaikan, kecuali tanaman dan buah-buahan dipohonnya yang belum masak. Karena penjualan tanaman buah-buahan dipohonnya yang belum masak tersebut haram, namun untuk dijadikan barang gadai hal ini diperbolehkan, karena didalamnya tidak memuat unsur *gharar* bagi murthahin. Dinyatakan tidak mengandung unsur *gharar* karena piutang *murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan.²⁶⁸

4. *Marhin bih* (Utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiiyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- a. Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- b. Utang harus lazim pada waktu akad
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*

Jika ada perselisihan mengenai besarnya utang antara *rahin* dan *murtahin*, maka ucapan yang diterima ialah ucapan *rahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *murtahin* bisa mendatangkan barang bukti. Tetapi jika yang diperselisihkan adalah mengenai *marhun*, maka ucapan yang diterima adalah ucapan *murtahin* dengan disuruh bersumpah, kecuali jika *rahin*

²⁶⁸ Abu Bakar Jabi al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2004), h. 532.

bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan dakwaannya, karena Rasulullah Saw bersabda: “*barang bukti dimintakan dari orang yang mengklaim dan sumpah dimintakan dari orang yang tidak mengaku*” (Diriwayatkan al-Baihaqi dengan sanad yang baik).²⁶⁹

Jika murtahin mengklaim telah mengembalikan *rahn* dan *rahin* tidak mengakuinya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan rahin dengan disuruh bersumpah, kecuali jika murtahin bisa mendatangkan barang bukti yang menguatkan klaimnya.²⁷⁰

Madzhab Maliki berpendapat bahwa gadai wajib dengan akad, setelah akad orang menggadaikan dipaksakan untuk menyerahkan borg untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (murtahin).²⁷¹ Sedangkan menurut al-Jazairi marhun boleh dititipkan kepada orang yang bisa dipercaya selain murtahin sebab yang terpenting dari marhun tersebut dapat dijaga dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bisa dipercaya.²⁷²

d) Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

Pegadaian syari'ah memiliki jasa dalam pelayanan terhadap masyarakat:

1. Pemberi pinjaman atas dasar hukum gadai, yaitu mengisyaratkan pemberian atas dasar penyerahan barang bergerak oleh penerima pinjaman.
2. Penaksir nilai barang, barang-barang yang akan ditaksir pada dasarnya meliputi semua barang bergerak yang bisa digadaikan, terutama emas, berlian, dan intan. Atas jasa pegadaian ini perum pegadaian memperoleh penerimaan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

533. ²⁶⁹ Abu Bakar Jabi al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Inhajul Muslim*, h.

533. ²⁷⁰ Abu Bakar Jabi al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Inhajul Muslim*, h.

²⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 141.

532. ²⁷² Abu Bakar Jabi al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Inhajul Muslim*, h.

3. Pegadaian syariah memiliki tempat yang memadai. Masyarakat biasanya menitipkan barang dipegadaian pada dasarnya karena alasan keamanan penyimpanan, terutama bagi masyarakat yang akan meninggalkan rumahnya untuk jangka waktu yang lama. Nasabah dikenakan ongkos penitipan.

Pegadaian syariah terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan tanpa henti mengeluarkan produk-produk yang bisa diakses oleh masyarakat sampai saat ada 4 (empat) produk:²⁷³

1. Rahn, yaitu produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah. Dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan Ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan).
Keunggulan produk rahn
 - a. Layanan Rahn tersedia di outlet Pegadaian Syari'ah di seluruh Indonesia.
 - b. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet pegadaian
 - c. Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
 - d. Pinjaman (marhun bih) mulai dari 50ribu rupiah sampai 200 juga rupiah atau lebih.
 - e. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar Ijaroh saja atau mengasur sebagian uang pinjaman.
 - f. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
 - g. Tanpa perlu buka rekening dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman.

²⁷³ <http://www.pegadaiansyariah.com>, lihat juga www.tvtsyariah.com, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 10.43.

h. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

Persyaratan produk rahn

- a. Fotocopy KTP
 - b. Menyerahkan barang jaminan
 - c. Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK Asli
 - d. Nasabah menandatangani Surat bBukti Rahn (SBR).
2. Arrum (Arrahn Untuk Usaha Mikro), yakni skim pinjaman sistem syari'ah bagi pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran menggunakan jaminan emas atau BPKB kendaraan bermotor.

Keunggulan produk Arrum

- a. Prosedur pengajuan Marhun Bih sangat cepat dan mudah.
- b. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor
- c. Proses Marhun Bih hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair
- d. Ijarah relatif murah dengan angsuran tetap per-bulan
- e. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
- f. Arrum dapat diperoleh di leuruh pegadaian syari'ah di Indonesia

Persyaratan produk Arrum

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun
 - b. Fotocopy KTP dan kartu keluarga
 - c. Menyerahkan dokumen yang sah
 - d. Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian)
3. Mulia atau emas batangan murni 99,99% ada sertifikatnya katanya dan ID numbernya. Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh

kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, liquid dan aman secara riil.

Keunggulan produk Mulia atau emas batangan

- a. Proses mudah dan layanan profesional
- b. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio asset
- c. Sebagai asset sangat liquid untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak
- d. Tersedia pilihan logam mulia dengan berat mulai dari 5 gram sampai 1 kilogram.

Persyaratan produk Mulia atau emas batangan

- a. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli.
 - b. Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan. Membayar uang muka yang besarnya sekitar 20% sampai 45% dari nilai logam mulia yang dibeli dan ditentukan berdasarkan berapa lama jangka waktu angsuran yang diambil.
 - c. Untuk pembelian secara on-line dapat mengunjungi situs www.pegadaian.co.id, nasabah dapat melakukan pendaftaran secara online, memilih logam mulia yang diinginkan, menentukan tempat pengambilan barang dan melakukan pembayaran secara on-line. Pengambilan barang dapat dilakukan di outlet-outlet pegadaian galeri 24 yang dituju.
4. Amanah yakni produk kepemilikan bermotor, yang skimnya sama dengan Arrum. Tapi yang Arrum selain bermotor juga untuk jumlah pembiayaan tertentu, biasanya dengan emas.

Keunggulan produk Amanah

- a. Layanan amanah tersedia di outlet pegadaian syariah di seluruh Indonesia
- b. Prosedur pengajuan cepat dan mudah
- c. Uang muka terjangkau
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap
- e. Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan
- f. Transaksi sesuai prinsip yang adil dan menentramkan.

Persyaratan produk Amanah

- a. Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- b. Melampirkan kelengkapan; fotocopy KTP (Suami/Istri), fotocopy kartu keluarga, fotocopy SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah
- d. Membayar uang muka yang disepakati (minimal 20%)
- e. Menandatangani akad Amanah.²⁷⁴

e) Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Mekanisme operasional gadai syari'ah sangat penting untuk diperhatikan karena jangan sampai operasional gadai tidak efektif dan efisien. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus berlandaskan syari'ah dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, maisir, dan gharar. Mekanisme operasional pegadaian syari'ah merupakan implementasi dari konsep dasar rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syari'ah adalah:

- a. Jenis barang yang di gadaikan

²⁷⁴ Empat produk pegadaian syari'ah, mulai dari keunggulan dan persyaratannya, bersumber dari www.pegadaian.co.id. Diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 11.33.

1. Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan dan sejenisnya.
 2. Keperluan rumah tangga; barang tekstil (pakaian permadani atau kain batik). Barang pecah belah, dengan catatan bahwa semua barang yang dijaminkan harus dalam kondisi baik (masih memiliki nilai jual).
 3. Kendaraan: sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sejenisnya.
- b. Biaya-biaya yang dikenakan dalam pegadaian syari'ah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.
1. Biaya administrasi. Besarnya biaya administrasi murah dan tidak memberatkan. Transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp. 50 untuk setiap kelipatan pinjaman Rp. 5.000, untuk semua golongan pinjaman. Terhadap hasil hitungan biaya administrasi, dilakukan pembulatan ke Rp. 100 terdekat; Rp 1 s/d 50 dianggap sama dengan 0, diatas Rp. 50 s/d Rp. 100 dibulatkan menjadi Rp. 100. Biaya administrasi hanya dikenakan sekali di awal akad. Adapun biaya administrasi tersebut meliputi:
 - a) Biaya riil yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan, dan biaya tenaga kerja.
 - b) Dipungut dimuka saat pinjaman dicairkan.
 2. Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai. Biaya sewa tempaan penyimpanan gadi syari'ah di dasarkan kepada besarnya tarif jasa simpanan, berikut ini adalah contohnya jika berupa:
 - a) Perhiasan. Marhun jenis perhiasan yang ditebus, maka dikenakkan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran marhun emas sebesar Rp. 10 hari masa penyimpanan dihitung sama dengan 10 hari. Terhadap hasil hitungan jasa simpanan ini dilakukan pembulatan Rp. 100 terdekat: 1 s/d Rp 50 dianggap

sama dengan 0, tetapi diatas Rp. 50 s/d Rp 100 dibulatkan ke Rp. 100.

- b) Barang elektronik, alat rumah tangga, dan lainnya dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 95 perhari masa penyimpanan.
- c) Kendaraan bermotor, seperti mobil dan sepeda motor dikenakan tarif jasa simpanan sebesar Rp. 100 per sepuluh hari masa penyimpanan.

Table Tarif Sewa Tempat Simpanan

No.	Jenis Simpanan	Tarif Jasa Simpanan
1	Emas dan Berlian	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 90 x Jangka Waktu / 10 hari
2	Elektronik, mesin jahit, dan peralatan rumah tangga	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 95 x Jangka Waktu / 10 hari
3	Kendaraan bermotor	Taksiran / Rp. 10.000 x Rp. 100 x Jangka Waktu / 10 hari.

c. Cicilan dan perpanjangan

Pada dasarnya, atau orang yang menggadaikan barang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Tetapi nasabah dapat memilih cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara pelunasan sekaligus maupun dengan cara mencicil. Jika dalam masa empat bulan dan nasabah belum melunasi, maka akan mengajukan permohonan serta menyelesaikan biaya, nasabah dapat memperpanjang jangka waktu pinjaman selama kurang lebih 4 bulan. Tetapi jika dalam jangka waktu yang ditetapkan nasabah tidak mengambil marhun, maka pegadaian syari'ah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai (rahn).

d. Prosedur penaksiran gadai

Dalam hal ini, besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut. petugas penaksir sebaiknya orang-orang yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Jasa ditaksir biasanya meliputi semua barang yang bergerak dan tidak bergerak.

Untuk barang bergerak, murtahin (petugas penaksir) melihat harga pasar pusat (HPP) yang telah berlaku. Melihat harga pasar setempat (HPS) dari barang karena harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, murtahin menguji kualitas marhun, dan terakhir murtahin menentukan nilai taksir barang jaminan.

Untuk barang yang tidak bergerak, murtahin bisa meminta informasi ataupun sertifikat tanah / pekarangan kepada rahin untuk mengetahui gambaran umum marhun, murtahin / penaksir dapat melihat langsung atau tidak langsung kondisi marhun ke lapangan, murtahin / petugas penaksir melakukan pengujian kualitas marhun / batang jaminan, maka murtahin / petugas penaksir menentukan nilai taksir.

e. Ketentuan bagi hasil

Pada hakikatnya bagi hasil yang dibagikan dalam akad ini adalah dari keuntungan bersih pihak yang diamati untuk mengelola barang gadaian. Artinya, bahwa keuntungan tersebut dikurangi biaya-biaya pengelolaan, seperti halnya biaya operasional maupun biaya non-operasional.

Sedangkan mengenai ketentuan bagi hasilnya adalah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila marhun dikelola oleh rahin, maka nisbah yang dibagikan mislanya 75% untuk rahin dari 25% untuk murtahin. Hal ini ditempuh karena pihak rahin adalah barang gadaian yang sah. Sedangkan bagi murtahin, jumlah persentasenya dapat digunakan untuk menjaga terjadinya inflasi

atau kerugian lain atas uang yang dipinjamkan.²⁷⁵

c) Fatwa DSN – MUI tentang Pegadaian Syari’ah

Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 28 Maret 2002 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari’ah Nasional tentang *rahm menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan tetap menjadi kewajiban Rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai dengan syari’ah.

²⁷⁵ Subbab ini bersumber langsung atau data dari www.pegadaian.co.id dan www.kompasiana.com, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 18.24.

- c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.
6. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) setelah tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁷⁶

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002, yang ditetapkan tanggal 26 Juni 2002 oleh Ketua dan Sekretaris DSN tentang Rahn Emas, yaitu:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 tentang Rahn).
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang gadai (marhun) ditanggung oleh penggadai (Rahin)
3. Ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang gadai dilakukan akad Ijarah.²⁷⁷

²⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, h. 113. Lihat juga www.mui.or.id/mui/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 18:46.

²⁷⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, h. 115. Lihat juga www.mui.or.id/mui/category/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-dsn-mui, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 18:52.



BAB IX

BAITUL MAL WAT TAMWIL (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Mal wa Tamwil*. Lembaga ini merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu *baitul mal* atau rumah dana serta *baitul tamwil* atau rumah usaha.²⁷⁸

Menurut ensiklopedia hukum Islam, BMT adalah lembaga keuangan negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syari'ah.²⁷⁹ Sementara menurut Harun Nasution, baitul mal biasa diartikan sebagai perbendaharaan (umum atau negara).²⁸⁰ Suhrawardi K. Lubis, menyatakan baitul mal dilihat dari segi istilah fiqh adalah “suatu lembaga atau badan yang bertugas untuk mengurus kekayaan negara terutama keuangan, baik yang berkenaan dengan soal pemasukan dan pengelolaan maupun yang berhubungan dengan masalah pengeluaran dan lain-lain”.²⁸¹

Menurut Arif Budiharjo , Baitul Maal wat Tamwil adalah “kelompok swadaya masyarakat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil-bawah dalam pengentasan kemiskinan”.²⁸²

Pengertian lain dikemukakan oleh Amin Azis bahwa BMT adalah “Balai usaha mandiri terpadu yang dikembangkan dari

²⁷⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 125.

²⁷⁹ Abdul Azis Dahlan (et al), *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cct. Ke I, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 186.

²⁸⁰ Suhrawardi L. Lubis, *Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 114.

²⁸¹ Suhrawardi L. Lubis, *Islam*, h. 114.

²⁸² Arif Budiharjo, MESS Jabar, Pengenalan BMT. Makalah disajikan pada Seminar tentang BMT, Bandung 2003.

*konsep Baitul Maal wal Tamwil. Dari segi baitulmal, BMT menerima titipan basis dari dana zakat, dan sedekah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, fakir, miskin. Pada aspek baitul tamwil-BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota”.*²⁸³

Senada yang dikemukakan Amin Azis, Saifuddin A. Rasyid menjelaskan bahwa BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu baitul tamwil dan baitulmal. Baitul tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil-bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Adapun baitulmal menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.²⁸⁴

Adapun tujuan didirikan BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, diharapkan para peminjam dapat mendirikan ekonomi yang dikelolanya. BMT bersifat usaha bisnis, tumbuh dan berkembang secara swadaya dan dikelola secara profesional. Baitulmaal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana dari zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain secara halal.²⁸⁵

A. Kegiatan dan Permodalan BMT

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu baitul tamwil dan baitulmal. Baitul tamwil mengembangkan usaha-usaha

²⁸³ Amin Azis, *Buku Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: Pinbuk, 2004), h. 12.

²⁸⁴ Republika, 14 Desember 1001.

²⁸⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 354.

produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan meminjam pembiayaan ekonomi. Adapun Baitul Maal menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. BMT diperlukan karena masyarakat membutuhkannya sebab belum ada lembaga perbankan yang mampu berhubungan langsung dengan pengusaha kecil bawah dan kecil.²⁸⁶

Menurut Neni Sri Ismaniyanti, kegiatan yang dikembangkan oleh BMT ada beberapa macam antara lain:

1. Menggalang dan menghimpun dana yang digunakan untuk membiayai usaha-usaha anggotanya. Modal awal BMT diperoleh dari simpanan pokok khusus para pendiri. Selanjutnya, BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Untuk memperbesar modal, BMT bekerja sama dengan berbagai pihak yang mempunyai kegiatan yang sama, seperti BUMN, proyek-proyek pemerintah, LSM, dan organisasi lainnya. Para penyimpan akan memperoleh bagi hasil yang mekanismenya sudah diatur dalam BMT.
2. Memberikan pembiayaan kepada anggota sesuai dengan penilaian kelayakan yang dilakukan oleh pengelola BMT bersama anggota yang bersangkutan. Sebagai imbalan atas jasa ini, BMT akan mendapat bagi hasil sesuai aturan yang ada.
3. Mengelola usaha simpan pinjam itu secara profesional sehingga kegiatan BMT bisa menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mengembangkan usaha-usaha di sektor riil yang bertujuan untuk mencari keuntungan dan menunjang usaha anggota, misalnya distribusi dan pemasaran,

²⁸⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 365.

penyediaan bahan baku, sistem pengelolaan dan lain-lain.²⁸⁷

Agar kegiatan sebagaimana tersebut dapat berjalan lancar, maka BMT dalam melaksanakan operasionalnya memerlukan modal yang dapat dihimpun sebagai berikut:

1. Simpanan Pokok Khusus (SPK), yaitu simpanan yang merupakan modal awal untuk mendirikan BMT. Jumlah tidak terbatas, terserah para penyimpan akan menyimpan beberapa menurut kemampuannya. Jumlah kepemilikan ini tidak mempengaruhi hak suara dalam rapat. SPK ini ditarik dari masyarakat sehubungan dengan adanya pendirian BMT tersebut.
2. Simpanan Pokok (SP), merupakan simpanan yang menjadi buku keanggotaan di BMT, biasanya besarnya sama setiap anggota dan dapat diangsur. Anggota yang telah melunasi SP ini dianggap sebagai anggota penuh dengan segala hak dan kewajibannya. Bagi yang belum lunas, biasanya dicatat sebagai calon anggota.
3. Simpanan Wajib (SW), merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap anggota BMT sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Penetapan periode pembayaran dapat disesuaikan dengan kesanggupan anggota masing-masing.
4. Simpanan Sukarela (SS), merupakan simpanan atau titipan anggota dan calon anggota kepada BMT, bisa dalam bentuk tabungan, deposito, atau bentuk lain yang sah.
5. Jasa, merupakan produk BMT (*sebagai usaha jasa keuangan*). Anggota yang telah memenuhi persyaratan

²⁸⁷ Neni Sri Ismaniyanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT, (Baitulo Maal wat Tamwil)*, Cct. I, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 84.

dapat memperoleh pelayanan jasa keuangan yang ada di BMT dengan memberi *fee* kepada BMT.

6. Wadiah, merupakan titipan umum yang ada di BMT dan umumnya yang disimpan dalam produk ini adalah dana sosial seperti zakat, infaq, dan sebagainya.²⁸⁸

Menurut Muhammad Ridwan, sumber dana BMT berasal dari anggota dan masyarakat calon anggota baik dalam bentuk simpanan, deposito maupun bentuk-bentuk uang yang lain. Sumber dana tersebut digunakan oleh BMT untuk membiayai operasional rutin. Dalam melaksanakan ketentuan ini BMT menggunakan dua prinsip yakni prinsip *Wadi'ah* dan *Mudhabarah*.

1. Prinsip Wadi'ah

Wadi'ah berarti titipan, sedangkan prinsip wadi'ah dalam produk BMT merupakan produk penitipan dari anggota kepada BMT. Pengembangan prinsip wadi'ah menjadi dua bagian yaitu:

- a. *Wadi'ah Amanah*, yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT tidak memiliki kewenangan untuk menfaatkan barang tersebut. Penyimpan menitipkan barangnya semata-mata karena menginginkan keamanan dan kenyamanan, karena jika hanya disimpan di rumah mungkin tidak aman. Atas produk ini, BMT akan menarik biaya penyimpanan, administrasi, serta biaya lainnya yang melekat pada penyimpanan dan pengamanan. Biaya tersebut dapat juga berbentuk biaya sewa tempat penyimpanan. Dalam dunia perbankan produk ini lebih dikenal dengan sebuah *saving deposit box*.
- b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu penitipan barang atau uang, dimana BMT untuk mengelola barang tersebut. atas dasar kewenangan ini BMT akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada penyimpan. Pada umumnya produk ini dimanfaatkan untuk menampung dana-dana sosial BMT dapat

²⁸⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, h. 366.

menerapkan produk ini untuk menampung titipan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya. Produk ini kemungkinan kurang menarik karena jumlah bonus tidak terdapat kepastian, dan ketergantungan pada manajemen BMT.

2. Prinsip Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharab* yang berarti memukul. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangannya untuk mencari karunia Allah Swt. Yang dimaksud mudharabah dalam produk BMT adalah bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib). Mudharabah secara umum dibagi menjadi dua yakni mudharabah mutlaqah dan muqayyadah.

- a. *Mudharabah mutlaqah*, yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT tidak mendapat pembatasan apapun dalam penggunaan dananya. BMT diberikan kebebasan untuk memanfaatkan dana simpanan untuk pengembangan usaha BMT. Atas dasar akad ini, BMT akan berbagi hasil dengan anggota dengan kesepakatan nisbah di awal akad.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yaitu akad penyimpanan dari anggota kepada BMT dengan sistem bagi hasil, dimana BMT dibatasi dalam penggunaan dananya. Sejak awal disepakati, bahwa dana tersebut hanya dapat dialokasikan untuk membiayai proyek tertentu. Atas dasar akad ini, BMT tidak dapat melakukan penyimpanan dalam penggunaannya. Kesepakatan. Besarnya bagi hasil bisa dilakukan dimuka dengan nisbah tertentu. Sebagai contoh produk ini adalah, adanya dana program dari pemerintah untuk membiayai

program khusus, seperti MAP (*modal awal dan padanan*) hanya untuk UKM setara dan lain-lain.²⁸⁹

Dana yang dikumpulkan dai anggota harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggotanya. Pinjaman dana kepada anggota disebut juga pembiayaan, yaitu suatu fasilitas yang diberikan. BMT kepada anggota yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari anggota yang surplus dana.

Menurut Buchari Alma Donni Juni Priansa, terdapat berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, yang semuanya itu mengacu pada dua jenis akad, yakni akad *tijarah* dan *syirkah*. Masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

1. Akad *tijarah* (jual beli), yakni perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota di mana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi danatau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran atau pengembalian dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.
2. Akad *syirkah* (penyertaan dan bagi hasil).
 - a) Musyarakah, penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditangan bersama secara seimbang dengan porsi pernyataan.
 - b) Mudharabah, suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.²⁹⁰

²⁸⁹ Neni Sri Ismaniyanti, *Aspek-Aspek Hukum BMT, (Baitulo Maal wat Tamwil)*, Cet. I, h. 39.

²⁹⁰ Buchari Alma Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Cet.I, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 20.

Permodalan dana BMT disalurkan untuk sektor perdagangan industri rumah tangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, konstruksi, percetakan, dan jasa. Adapun pola angsuran dapat berdasarkan [ada angsuran harian, mingguan dan mingguan, bulanan, serta pada saat jatuh tempo.

B. Kesehatan BMT

Tingkat kesehatan BMT adalah ukuran kinerja dan kualitas BMT dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran, keberhasilan dan keberlangsungan utama BMT, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Sebuah BMT perlu diketahui tingkat kesehatannya karena BMT merupakan sebuah lembaga keuangan pendukung kegiatan ekonomi rakyat. BMT yang sehat akan aman, dipercaya dan bermanfaat. Aspek kesehatan BMT dapat dilihat dari:

1. Aspek *Jasadiyah*; a) Kinerja keuangan, BMT mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran, dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hati, serdik dan benar, sehingga berlangsung kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT dan akan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan; b) Kelembagaan dan manajemen, BMT memiliki kesiapan untuk melakukan operasinya dilihat dari sisi kelengkapan legalitas, aturan-aturan dan mekanisme organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dan pengawasan, SDM, permodalan, sarana dan prasarana kerja.
2. Aspek *ruhiyah* meliputi; a) Visi dan Misi BMT, pengelola, pengurus, pengawas syari'ah dan seluruh anggotanya memiliki kemampuan dalam mengaplikasikan visi dan misi BMT; b). Kepekaan sosial. Pengelola, pengurus, pengawas syari'ah, dan seluruh anggotanya memiliki kepekaan yang tajam dan dalam, responsif,

proaktif, terhadap nasib para anggota dan nasib (kualitas hidup) warga masyarakat disekitar BMT tersebut; c) Rasa memiliki yang kuat. Pengelola, pengurus, pengawas syari'ah, dan seluruh anggotanya serta masyarakat sekitar memiliki kepedualian untuk memelihara keberlangsungan hidup BMT sebagai sarana ibadah; d) Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah. Pengelola, pengurus, pengawas syari'ah dan seluruh memberlakukan aturan dan implementasi operasional BMT sesuai dengan syari'ah.

C. Kendala Pengembangan BMT

Meskipun lahirnya BMT di Indonesia cukup menggembirakan, bukan berarti tidak ada kendala dalam pengembangannya, banyak masalah penting yang perlu segera dicari solusinya terutama terkait dengan implementasi sistem pembukaan syari'ah dalam operasional BMT yang belum maksimal sehingga perlu terus di evaluasi untuk siap diperbaiki sewaktu-waktu, keadaan ini disebabkan karena prinsip-prinsip syari'ah yang menjadi frame of reference dalam operasional BMT belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh sebagian besar pengelola BMT itu sendiri.

Menurut Makhalul Ilmi, keadaan tersebut disebabkan karena;

1. Lahirnya banyak devosi dalam praktik pengelolaan lembaga mikro keuangan syari'ah yang sering mengundang kritik.
2. Sampai sekarang BMT masih kesulitan mencari figur yang tepat untuk menempati posisi DPS, sebab sebagian besar ulama masih bercorak tradisional konservatif, sulit menerima perubahan serta tidak memiliki wawasan yang memadai di bidang perbankan.
3. Masyarakat Indonesia sudah sangat lama mengenal perbankan konvensional yang beroperasi dengan sistem

- bunga, sehingga upaya mengenal perbankan syari'ah membutuhkan waktu yang panjang dan melelahkan.
4. Implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam operasional BMT sampai sekarang masih dihadapkan pada kendala-kendala teknis, persiapan sumber daya insani yang belum maksimal dan dukungan masyarakat Islam sendiri yang masih setengah mati.
 5. Lebih banyak BMT dalam pengelolalaannya masih berorientasi kerjanya lebih diarahkan untuk mendapatkan keuntungan semata (*profit oriented*) dengan mengabaikan misi sosialnya;
 6. Kedudukan BMT ditengah tata hukum perbnkan nasional sangat baik. Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang BI belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan usaha lembaga mikro ekonomi secara perinci.²⁹¹

Selain itu Ahmad Rodoni mengemukakan bahwa terdapat beberapa masalah untuk mengembangkan BMT, antara lain:

1. Belum memadainya SDM yang terdidik dan profesional.
2. Masih banyaknya SDM yang berjiwa entrepreneurship.
3. Modal yang relatif kecil dan terbatas.
4. Tingkat kepercayaan umat Islam yang masih rendah.
5. Belum terungkap platform yang sempurna secara akademik.
6. Perangkat pendukung (*informasi & teknologi*).
7. *Accountability* (gejala sosial dan ekonomi masyarakat).
8. *Limited link*.²⁹²

²⁹¹ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 49-51.

²⁹² Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), h.70.

D. Strategi Pengembangan BMT

Makhalul Ilmi juga menawarkan beberapa strategi pengembangan, bisa ditelaah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang hal-hal yang berhubungan dengan BMT, keuangan syari'ah serta metodologi hukum Islam dan kaidah-kaidah fiqh.
2. Mengembangkan Sekolah Tinggi Agama Islam dengan membuka jurusan-jurusan baru yang spesifik materi yang menyangkut BMT dan perbankan syari'ah.
3. Melaksanakan sosialisasi BMT secara terus-menerus kepada masyarakat terutama daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam.
4. Pengurus BMT perlu mengajak para ulama melakukan kajian ilmiah atau diskusi-diskusi mengenai beberapa persoalan ekonomi (*mudzakaroh iqtishodiyah*) dengan kajian di seputar produk-produk penghimpunan dan penyaluran dan BMT agar mereka mengakui keabsahan tentang tata kerja BMT.
5. Menerbitkan buku-buku panduan yang dapat dijadikan referensi bagi pengelolaan BMT.
6. Pemerintah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus tentang lembaga mikro keuangan syari'ah.²⁹³

Terdapat persoalan tersebut Ahmad Rodini dan Abdul Hamid menjelaskan terdapat beberapa kategori untuk mengatasi problem atau strategi pengembangan BMT antara lain:

1. Mikro struktur, langkah maju untuk meningkatkan kualitas BMT (*profesional, proporsional, amanah & tanggung jawab*).

²⁹³ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, h. 78-80.

2. Makro struktur, upaya membangun jaringan kelembagaan untuk memperkuat posisi BMT (*produk, kualitas & servisi*). BMT harus kerja sama dengan instansi-instansi yang terkait untuk melakukan berbagai terobosan untuk memajukan BMT. BMT bersama pemerintah perlu membuat suatu rancangan program pengembangan wirausaha kepada kelompok-kelompok usaha kecil dan menengah untuk jangka pendek dan jangka panjang agar BMT menjadi soko guru yang mendukung upaya pemerintah dalam rangkai meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan ekonomi, dan mengentaskan kemiskinan.²⁹⁴

²⁹⁴ Ahmad Rodoni & Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, h.

BAB X

PASAR MODAL SYARIAH

Sebagai negara dengan penduduk muslim besar, dengan dukungan yang berkesinambungan dan inisiatif dari pemerintah untuk mengembangkan pasar modal Islam, maka potensi untuk mengembangkan produk-produk Syari'ah sangat besar. Saat ini, berbagai produk pasar modal tersedia bagi umat Islam untuk menanamkan uangnya dan bertransaksi dipasar modal Islam.²⁹⁵

Pasar modal secara umum adalah sutau sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.²⁹⁶ Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Secara ekstrim, pasar modal adalah pasar dimana kita dapat memperoleh kekayaan jangka panjang.²⁹⁷ Menurut Undang-Undang pasar modal (UUPM) Nomor 8 Tahun 1995, "*pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek*". Jadi pasar modal sama halnya dengan pasar tradisional yang ada di dalamnya *supply* dan *demand*, dengan memperdagangkan suatu barang meskipun bukan berbentuk komoditi asli, melainkan surat-surat berharga.

²⁹⁵ Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Pasar Modal Islam*, (Jakarta: UAI, 2010), h. 3.

²⁹⁶ Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KM/90, tentang Peraturann Pasar Modal

²⁹⁷ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2001), h. 233.

Dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. Ditempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*), melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten.²⁹⁸ Sebaliknya ditempat itu pula perusahaan (*entities*) yang membutuhkan dana, menawarkan surat berharga dengan cara *listing* terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten.

Dalam ekonomi Islam, menurut Adiwarmarman Karim, teori pertukaran dalam bisnis transaksi Islam terdiri atas dua pilar, yaitu: *objek pertukaran* dan *waktu pertukaran*.²⁹⁹ Jadi dalam Islam pasar modal merupakan bagian dari objek pertukaran, yaitu berbentuk *dayn* (*financial asset*), di mana pertukaran berupa uang dengan surat berharga, seperti halnya transaksi dalam pasar modal.

Adapun pasar modal syari'ah berdasarkan atas fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penrapan Prinsip Syari'ah di Bidang Pasar Modal adalah sebagai berikut:

- a. Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
- b. Pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syari'ah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah.

Jadi, pasar modal syari'ah adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya

²⁹⁸ Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.

²⁹⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: IIIT, 2003), h. 53.

serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam. Adapun prinsip-prinsip syari'ah pada pasar modal adalah sebagaimana dalam sub-bab berikut ini.

A. Perkembangan Pasar Modal di Indonesia

a. Perkembangan Fatwa DSN MUI

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syari'ah yang mengeluarkan efek-efek syari'ah selain saham-saham dalam *Jakarta Islamic Index* (JII). Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal syari'ah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syari'ah yang patut dicatat hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan enam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan industri pasar modal.

Adapun keenam fatwa yang dimaksud adalah:

1. No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
2. No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syari'ah
3. No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah
4. No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syari'ah Mudharabah
5. No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum
6. No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syari'ah Ijarah

Fatwa-fatwa diatas mengatur prinsip-prinsip syari'ah dibidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syari'ah secara tertulis dari DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat/predikat syari'ah dari DSN-MUI yaitu

bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/investor, struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan dll.³⁰⁰

b. Perkembangan di Lantai Bursa

Perkembangan transaksi saham syari'ah di Bursa Efek Indonesia bisa digambarkan bahwa, berdasarkan lampiran pengumuman BEJ No. Peng-499/BEJDAG/U/12-2004 tanggal 28 Desember 2004, bahwa daftar nama saham tercatat yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) untuk periode 3 Januari 2005 s.d. Juni 2005 adalah sebagai berikut:

1. Astra Agro Lestari
2. Adhi Karya (Persero)
3. Aneka Tambang (Persero)
4. Bakrie & Brothers
5. Barito Pacific Timber
6. Bumi Resources
7. Ciputra Development
8. Energi Mega Persada
9. Gajah Tunggal
10. International Nickel Ind.
11. Indofood Sukses Makmur
12. Indah Kiat Pulp & Paper
13. Indocement Tunggal Prakasa
14. Indosat
15. Kawasan Industri Jababeka
16. Kalbe Farma
17. Limas Stokhomindo
18. London Sumatera
19. Medco Ebergi International

³⁰⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 75.

20. Multipolar
21. Perusahaan Gas Negara (Persero)
22. Tambang Batu Bara Bukit Asam
23. Semen Cibinong
24. Semen Gresik (Persero)
25. Timah
26. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
27. Telekomunikasi Indonesia
28. Tempo Scan Pacific
29. United Tractors
30. Unilever Indonesia³⁰¹

Kinerja saham-saham syari'ah yang terdaftar dalam JII dimaksud juga mengalami perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat dari kenaikan index JII sebesar 37,90% dari 118,952 pada akhir tahun 2003 menjadi 164,029 pada penutupan akhir tahun 2004. Begitu pula nilai kapitalisasi saham-saham syari'ah yang terdaftar dalam JII juga mengikat signifikan sebesar 48,42% yaitu dari Rp. 177,78 Triliun pada akhir Desember 2003 menjadi Rp.263,86 Triliun pada penutupan akhir Desember 2004.³⁰²

Sejak secara resmi Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip dasar modal syari'ah pada tanggal 14 dan 15 maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya dan perkemabangannya, pertumbuhan transaksi efek syari'ah di pasar modal Indonesia terus meningkat. Harus dipahami bahwa ditengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syari'ah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syari'ah di pasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasi

³⁰¹ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 76.

³⁰² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 77.

syari'ah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak pertengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syari'ah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syari'ah di pasar modal Indonesia.

Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, modal yang berbasis syari'ah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan negara Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syari'ah di dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syari'ah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syari'ah kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan. Dibandingkan dengan negara Malaysia, Indonesia terlihat begitu tertinggal jauh dalam mengembangkan kegiatan investasi syari'ah dipasar modal. Malaysia pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syari'ah sejak awal tahun 1990 dan saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai contoh, data menunjukkan hingga akhir tahun 2004 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syari'ah mencapai 7,7% dari total NAB industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru mencapai 0,51% dari total NAB industri reksa dana.³⁰³

Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih belum meratanya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi dipasar modal yang berbasis syari'ah, juga belum ditunjangnya dengan peraturan yang memadai tentang investasi syari'ah dipasar modal Indonesia serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi dipasar modal syari'ah dibutuhkan

³⁰³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 78.

biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya.³⁰⁴

B. Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia

Jenis efek yang umumnya diperdagangkan di pasar modal adalah saham, obligasi dan surat pernyataan utang lainnya seperti *option*, *warrant*, dan *right*. Semua efek yang diperdagangkan berjangka panjang yaitu lebih dari satu tahun. Secara umum instrumen tersebut dapat dibagikan 3 kelompok yaitu:

1. Instrumen utang *debt instrument*, yang termasuk dalam instrument ini adalah obligasi.
2. Instrumen penyertaan *equity instrument*, yang termasuk di dalamnya adalah saham.
3. Instrumen lain *others instrument* seperti options, warrant dan right.³⁰⁵

Dalam tulisan Sofyan Rizal mengenai saham syari'ah, pengertian, peluang, dan hambatannya di Indonesia, menjelaskan bahwa prinsip-prinsip penyertaan modal secara syari'ah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syari'ah maupun non-syari'ah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syari'ah. Dalam hal ini, di Bursa Efek Jakarta terdapat JII yang merupakan 30 saham yang memenuhi ketika syari'ah yang ditetapkan DSN. Indek JII dipersiapkan oleh PT Bursa Efek Jakarta bersama dengan PT Danareksa Investment Management (DIM). JII dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syari'ah. Melalui index ini dihadapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syari'ah.³⁰⁶

³⁰⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 78.

³⁰⁵ Abdul Ghofur & Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), h. 295.

³⁰⁶ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 97.

Saham-saham yang masuk dalam Index Syari'ah adalah emiten yang kegiatan usahanya bertentangan dengan syari'ah seperti:

- a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- b. Usaha lembaga keuangan konvensional termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan atau menyediakan barang-barang ataupun saja yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Selain kriteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk JII Bursa Efek Jakarta melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga mempertimbangkan aspek likuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

- a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).
- b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir.
- d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.³⁰⁷

³⁰⁷ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, h. 98.

Menurut penelitian Departemen keuangan yang bekerja sama dengan Bapepam (2005), ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab lambatnya perkembangan pasar modal syari'ah, diantaranya adalah:

- a. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang pasar modal syari'ah;
- b. Ketersediaan informasi tentang pasar modal syari'ah;
- c. Minat pemodal atas efek syari'ah
- d. Kerangka peraturan tentang penerbitan efek syari'ah;
- e. Pola pengawasan (dari sisi syari'ah) oleh lembaga terkait;
- f. Pra-proses (persiapan) penerbitan Efek syari'ah;
- g. Kelembagaan atau institusi yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal syari'ah di Indonesia.

Saham yang dikategorikan mendekati prinsip syari'ah adalah saham perusahaan yang tidak terkait dengan aktivitas haram seperti riba, gharar, judi, pornografi, memproduksi dan atau memperjualbelikan makanan/minuman keras, rokok dan sebagainya. Di Indonesia, saham-saham yang memenuhi prinsip syari'ah, baik dari segi jenis maupun operasional usahanya tergabung dalam JII dan diperdagangkan di Bursa Efek. Investor yang memiliki kemampuan sendiri berinvestasi langsung ke instrumen saham, dapat memilih saham di dalam daftar JII tersebut.³⁰⁸

C. Risiko Berinvestasi di Pasar Modal

Memprediksi resiko dalam berinvestasi merupakan hal yang cukup kompleks dan yang selalu menjadi pertanyaan bagi investor adalah bagaimana mengukur risiko individu suatu saham dari keseluruhan portofolio Resiko investasi di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya

³⁰⁸ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*.

fluktuasi harga (price volatility). Risiko-risiko yang mungkindapat dihadapi investor tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Risiko Daya Beli (Purshasing Power Risk)

Sifat investor dalam menangani faktor risiko di pasar modal ini terdiri dari dua, yaitu investor yang tidak menyukai risiko (risk averter) dan investor justru menyukai menantang risiko (risk everse). Investor yang pertama akan mencari dan memilih jenis investasi yang akan memberikan keuntungan yang jumlahnya sekurang-kurangnya sama dengan investasi yang dilakukan sebelumnya. Disamping itu, investor mengharapkan memperoleh pendapatan atau capital gain dalam waktu yang tidak lama. Akan tetapi, apabila investasi tersebut memerlukan waktu 10 tahun untuk mencapai 60% keuntungan, sementara tingkat inflasi selama jangka waktu tersebut telah naik melebihi 100%, maka investor jelas akan menerima keuntungan yang daya belinya jauh lebih kecil dibandingkan dengan keuntungan yang dapat diperoleh semula.³⁰⁹ Oleh karena itu resiko daya beli ini berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil.

b. Risiko Bisnis (Business Risk)

Risiko bisnis adalah risiko menurunnya kemampuannya memperoleh laba yang pada gilirannya akan mengurangi pula kemampuan perusahaan (emiten) membayar bunga deviden.

c. Risiko Tingkat Bunga (Interest Risk)

Naiknya tingkat bunga biasanya menekan harga jenis surat-surat berharga yang berpendapatan tetap termasuk harga-harga saham. Biasanya, kenaikan tingkat bunga berjalan tidak searah dengan harga-harga instrumen pasar modal. Dengan naiknya tingkat bunga, jelas akan menurunkan harga-harga dipasar modal.

³⁰⁹ <http://www.livingwell.co.id> halaman Financial Well Being. Diakses tanggal 14 Agustus 2014, pukul 19.24.

d. Risiko Pasar (Market Risk)

Apabila pasar bergairah (bullish) umumnya hampir semua harga saham di Bursa Efek mengalami kenaikan. Sebaliknya apabila pasar lesu, saham-saham akan ikut mengalami penurunan. Perubahan psikologi pasar dapat menyebabkan harga-harga surat berharga anjlok terlepas dari adanya peradaban fundamnetal atas kemampuan perolehan laba perusahaan.

e. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

Risiko ini berkaitan dengan kemampuan suatu surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan dengan tanpa mengalami kerugian berarti

D. Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah

Peluncuran pasar modal syari'ah ini menjadi penting karena banyak ketentuan baru yang akan dikeluarkan Bapepam. Ada lima bab yang akan mengatur perjalanan pasar modal syari'ah, sebagai berikut:

1. Menyangkut kebijakan umum, ketentuan ini akan membahas kedudukan DPS dan Bapepam dalam kaitannya pasar modal syari'ah
2. Proses emisi saham syari'ah, regulasi ini akan menjadi rujukan emiten baru yang berkehendak dicatat dalam daftar saham syari'ah
3. Menyangkut index syari'ah yang akan menjadi pedoman penyusunan emiten-emiten yang layak masuk syari'ah
4. Menyangkut instrument obligasi syari'ah
5. Menyangkut tentang reksadana syari'ah.³¹⁰

³¹⁰ <http://www.bisnisindeks.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2014, pukul 19.50.



BAB XI

LEMBAGA WAKAF

Wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam yang belum diberdayakan secara optimal di Indonesia. Padahal disejumlah negara lain seperti Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi keterpurukan ekonomi seperti yang tengah di alami Indonesia saat ini, alangkah baiknya bila kita mempertimbangkan pengembangan instrumen wakaf.³¹¹

Dalam al-Qur'an memang tidak disebutkan secara tegas tentang wakaf, tetapi ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf. Salah satunya firman Allah berikut, *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (Q.S. al-Imran:92). Begitu pula dalam hadist, Rasulullah bersabda, *“apabila seseorang manusia meninggal, terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari 3 hal yaitu: shadeqah jariyah (sedekah yang pahalanya tetap mengalir), ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan doa anak yang sholeh.”* Beberapa ahli berpendapat, yang termasuk shadeqah jariyah dalam hadits itu, salah satunya, adalah harta yang diwakafkan.

A. Definisi Wakaf

Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (waqafa/yaqifu/waqfan) dan secara istilah syara' definisi wakaf menurut Muhammad Ibd Ismail dalam Sulubus Salam-nya adalah

³¹¹ Masyita dalam Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 214.

menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ain-nya) dan digunakan untuk kebaikan. Jadi benda wakaf bersifat tidak dimiliki secara pribadi atau perorangan (mal mahjur), benda wakaf merupakan milik Allah Swt yang diberikan sebagai milik umum (kepentingan umum) dengan tujuan yang spesifik. Jadi dengan definisi ini kita kenal wakaf yang bersifat terus-menerus atau abadi (perpetual).³¹²

Jumhur ulama termasuk madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk diri sendiri, dan benda yang diwakafkan tetap ada, sedang manfaatnya digunakan untuk kebaikan atau ridha Allah.³¹³ Definisi tersebut melahirkan kesimpulan dikalangan ulama, bahwa harta wakaf harus kekal, sehingga yang boleh diwakafkan hanyalah benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Karena kedua bentuk barang itulah terjaga karakteristik wakaf yang tidak habis pakai. Para ulama sepakat benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas hanya tanah dan bangunan, sepanjang bendanya tidak langsung musnah ketika ambil manfaatnya, barang tersebut dapat diwakafkan. Jadi mayoritas fuqaha sepakat pada wakaf benda yang bersifat kekal (perpetual) atau setidaknya terus ada sepanjang usia harta tersebut, seperti bangunan, kuda, unda, dll. Sedangkan madzhab Maliki membolehkan wakaf yang bersifat temporer.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah milik dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan bergama, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan

³¹² Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 252.

³¹³ Wahbah Zuhailly dalam Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*.

spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.³¹⁴

Secara khusus, wakaf menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bab I pasal 1 ayat (1) adalah “*Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariah*”.

Dalam pasal 5 UU nomor 41/2004 dijelaskan “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensu dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Sedang, pada Pasal 6 UU No. 41/2004 menyebutkan “*Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazir; c. Harta benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. Peruntukkan harta benda wakaf; dan f. Jangka waktu wakaf.*”³¹⁵

Dapat disimpulkan dari peraturan diatas, bahwa benda apa saja sepanjang ia tidak dapat musnah setelah diambil manfaatnya, dapat diwakafkan. Oleh karena itu, uang-pun dapat di wakafkan, yang di istilahkan dengan wakaf tunai. Sepanjang uang tersebut bisa diambil manfaatnya yang sesuai dengan tujuan akan wakaf dan tidak habis atau musnah. Jadi uang bisa saja diwakafkan, sepanjang mekanisme dalam membelanjakan uang tersebut pada benda-benda yang memiliki sifatnya musnah atau habis.

B. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Dalam sejarah pembinaan hukum Islam, amal wakaf telah dikenal semenjak masa Rasul, walaupun pada saat itu belum menggunakan term tersebut. Selanjutnya para ulama berbeda pendapat mengenai siapa orang yang pertama melaksanakan

³¹⁴ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*.

³¹⁵ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*.

praktif wakaf, sebagian mereka mengatakan Rasulullah adalah orang yang pertama melaksanakan praktik wakaf, sedangkan yang lain mengatakan Umar bin Khattab. Perbedaan pendapat ini bersumber dari perbedaan ulama sahabat, seperti dikemukakan oleh al-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Authar³¹⁶ bahwa menurut kaum Ansor orang yang mula-mula melaksanakan praktik wakaf adalah Rasulullah sedangkan menurut kaum Muhajirin Umar bin Khattab.

Perselisihan ini terkait dengan persoalan sejarah wakaf produktif yang dipraktikkan oleh Rasulullah berupa tujuh lokasi perkebunan korma yang sangat terkenal, yaitu al-a'raf, al-shafiyah, al-dalal, al-misyab, barqah, al-husna dan masyrabah ummi Ibrahim dan wakaf yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab di kawasan Khaibar. Wakaf yang dipraktikkan oleh Rasulullah berasal dari Muhairiq, seorang Yahudi yang gugur dalam perang Uhud sementara Wakaf produktif yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah sejumlah kavling yang diperoleh sesudah tentunya sudah jelas, karena perang Uhud terjadi pada tahun ketiga hijriyah sedangkan perang Khaibar terjadi pada tahun ketujuh. Dengan demikian perselisihan mengenai siapakah orang yang pertama melaksanakan praktik wakaf tentu dapat diselesaikan, yaitu Rasulullah, kemudian Umar bin Khattab.

Sebenarnya untuk mengungkap persoalan ini masih ada pertanyaan yang sangat mendasar, yaitu mengapa Muhairiq tidak disebut-sebut sebagai pewakaf pertama, padahal wakaf yang dipraktikkan oleh Rasulullah adalah perkebunan yang berasal dari milik Muhairiq, salah seorang warga Bani Nadhir.³¹⁷ Ibnu Hisyam menjelaskan secara kronologis mengenai terjadinya penyerahan harta milik Muhairiq kepada Rasulullah. Keduanya adalah

³¹⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al Waqf*, (T.Tp, Ma'had al-Dirasat al-Arabiyah al-Aliyah, 1959), h.7.

³¹⁷ Muhammad al-Syarbini al-Khathib, *Bujairami 'ala al-Khathib*, juz III, (T.Tp Dar al-Fikr, 1981), h. 202.

pemimpin ummat yang sudah saling mengenal, Muahiriq seorang ulama Yahudi yang terkenal alim dan kaya, memiliki banyak harta dan kebun korma. Sementara Rasulullah adalah pemimpin yang sudah dikenal kepiawaiannya oleh masyarakat dan Muahiriq sangat menghormatinya. Ketika perang Uhud terjadi, hari itu adalah hari Sabtu, Muhairiq berpesan kepada kaumnya agar mendukung perjuangan Rasulullah. Ketika bergegas hendak berangkat ke Uhud, ia berpesan bahwa apabila nanti ia tidak kembali (gugur), supaya hartanya diserahkan kepada Rasulullah dan terserah digunakan untuk apa yang dipandang baik menurut Allah.³¹⁸

Memang menurut al-Waqidi (w.207 H/822 M) bahwa Muhairiq menyerahkan hartanya sebelum kepergiannya ke Uhud, waktu itu ia belum memeluk Islam.³¹⁹ Dengan demikian Muhairiq tidak disebut-sebut sebagai pewakaf pertama lantaran yang bersangkutan tersangkut persoalan beda agama (orang Yahudi) dan penyerahan hartanya dilakukan sebelum perang Uhud. Tetapi menurut Ibnu Hisyam penyerahan Muhairiq bersifat wasiat, bukan penyerahan bersifat langsung, sehingga Rasulullah posisinya sebagai penerima wasiat yang berwenang menyalurkan harta sesuai dengan wasiatnya. Artinya perpindahan kekuasaan harta dari Muhairiq kepada Rasulullah terjadi setelah peristiwa kematian Muhairiq, yaitu sesudah perang Uhud dan Muhairiq ternyata gugur dalam peperangan tersebut. Dalam Tarikh Ibnu Hasyim disebutkan bahwa Rasulullah sepulangnya dari Uhud membagi-bagikan harta Muhairiq kepada masyarakat, termasuk tujuh bidang perkebunan yang dijadikan amal wakaf diatas.

Dari uraian tersebut terjadi penafsiran yang berbeda sehingga penulis sejarah tidak menyebut-nyebut Muhairiq sebagai

³¹⁸ Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, jilid 6, (Mesir: Musthafah al-Babi al-Habibi, tt), h. 24.

³¹⁹ Ahmad bin Amr bin Muhair al-Syaibani Al-Khashshaf, *Ahkam al-Auqaf*, (Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 6.

pewakaf, mungkin hartanya dianggap sebagai harta tak bertuan³²⁰ sehingga setelah pemiliknya meninggal dunia dikuasai oleh Rasulullah sesuai dengan isi wasiatnya. Tetapi apabila dilihat dari wasiat seutuhnya dapat diketahui bahwa Muhairiq menyerahkan hartanya kepada Rasulullah bukan untuk dimiliki, melainkan untuk kepentingan umum (amal sosial), seperti dikemukakan sendiri oleh Muhairiq: “terserah digunakan untuk apa yang baik menurut pandangan Allah”, maka Muhairiq seharusnya dicatat sebagai orang pertama yang melaksanakan amal wakaf. Karena dalam amal sosial tidak disyaratkan pelakunya beragama Islam, apalagi menurut catatan sejarah bahwa Muhairiq dimakamkan di lingkungan pekuburan kaum muslim yang berarti telah dianggap sebagai warga muslim.

Perselisihan berikutnya terkait dengan sejarah wakaf non produktif, dalam sejarah pembinaan hukum Islam terjadi kesimpangsiuran riwayat mengenai siapakah orang yang membebaskan sebidang tanah kosong dipusat kota Yatsrib (Madinah) yang kemudian digunakan untuk membangun kelompok penyebaran Islam disana (masjid Nabawi). Menurut Husain Haikal, Rasulullah membelinya sendiri dari kedua naka yatim bernama Sahl dan Suhail, keduanya putra Amr yang telah meninggal dunia.³²¹ Sementara Ibnu Hisyam tidak tegas menyebutkan apakah tanah tersebut dibeli oleh Rasulullah, atau oleh salah seorang sahabat, atau bahkan merupakan jariyah (shadaqah) dari keluarga bahwa Mu’adz bin Afra, wali kedua anak yatim tersebut telah mengizinkan Rasulullah untuk membangun sebuah masjid di tempat itu, tanpa memberi penjelasan secara rinci bagaimana proses perizinan terjadi. Ibnu Hisyam hanya menjelaskan bahwa setelah mendapatkan izin dari walinya,

³²⁰ Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Nabawiyah*, (T.T: T.Tt. T), h. 280.

³²¹ Al-Khashshaf, *Ahkam al-Auqaf*, (Baitu: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 7.

Rasulullah langsung menggerakkan masjid secara bergotong royong.³²²

Perselisihan historis mengenai siapa orang yang pertama melakukan praktik wakaf (non produktif) semakin jauh apabila disepakati bahwa tempat peribadatan pertama yang dibangun oleh kaum muslim adalah masjid Quba. Masjid ini letaknya lebih kurang 5 km sebelah Barat Daya kota Madinah, dibangun oleh Rasulullah bersama sahabatnya ketika beliau sedang dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dilihat dari aspek hukumnya, tidak ada perselisihan bahwa pembangunan masjid adalah praktik wakaf yang sah.³²³

Dari uraian diatas, tampak sangat sulit untuk menentukan siapa orang pertama melaksanakan praktik wakaf (non produktif). Berdasarkan riwayat tersebut dapat diduga bahwa orang pertama yang melaksanakan praktik wakaf adalah Kultsum bin Hidm, seorang penduduk Quba masjid. Namun demikian tidaklah mustahil apabila ada sahabat lain yang turut berpartisipasi dalam pembebasan tanah tersebut. Yang sudah pasti adalah dalam pembangunan masjid dapat terwujud dalam waktu yang relatif singkat.

Terlepas dari perselisihan mengenai siapakah orang pertama yang melaksanakan praktik wakaf, kiranya dapat dikemukakan bahwa wakaf non produktif yang pertama dalam Islam adalah wakaf pembangunan masjid Quba, kemudian pembangunan nabawi. Pembangunan kedua masjid tersebut dilaksanakan oleh kaum muslim secara bergotong royong. Sedangkan wakaf produktif pertama dilaksanakan oleh Rasulullah berupa tujuh bidang tanah perkebunan yang berasal dari

³²² Juhaya S. Praja & Muhklisin Muzaric, *Pranata Ekonomi Islam (WAKAF)*, (Yogyakarta: STAIC PRESS, 2009), h. 43.

³²³ Juhaya S. Praja & Muhklisin Muzaric, *Pranata Ekonomi Islam (WAKAF)*, h. 44.

Muhairiq³²⁴ atau Muhairiq sendiri. Kemudian wakaf Umar bin Khattab di kawasan Khaibar yang jumlahnya mencapai 100 kavling. Wakaf Rasulullah berupa tujuh bidang perkebunan atau wakaf Muhairiq terjadi pada tahun ketiga hijriyah, sedangkan wakaf Umar bin Khattab di kawasan Khaibar terjadi pada tahun ketujuh hijriyah.

Selanjutnya amal wakaf dipraktikkan oleh Abu Thalhah, orang kaya di Madinah yang meminta petunjuk kepada Rasul, ia menafkahkan kebun yang menurut pengakuannya merupakan harta yang paling disayanginya yaitu “Bairuha”.³²⁵ Penggunaan harta wakaf yang umumnya berupa lahan pertanian yang subur pada masa awal Islam mampu menunjang kehidupan masyarakat dan mencakup berbagai kebajikan.³²⁶ Periode berikutnya, al-Khashshaf menyebutnya periode tabi’in, atau awal masa Bani Umayyah, pada periode ini wakaf makin berkembang lagi. Beliau menyebutkan nama-nama tabi’in yang menjelaskan praktik wakaf, antara lain Abu Ja’far mewakafkan hartanya untuk mensuplai kebutuhan air masjid, Umar bin Khalid dan al-Zuhri mewakafkan hartanya untuk peningkatan kesejahteraan hamba sahaya, serta Umrah binti Abdurrahman mewakafkan hartanya untuk peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.³²⁷

Pada masa dinasti Umayyah dan Bani Abbasiyyah praktik wakaf lebih luas lagi, kaum muslim berlomba-lomba untuk melaksanakan praktik wakaf. Penggunaannya makin maju, tidak bersifat konsumtif atau sekedar memfasilitasi peningkatan kesejahteraan fakir miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT), tetapi disalurkan melalui modal usaha produktif, peningkatan

³²⁴ Lihat Ibnu al-Humam al-Hanafi, *Syarah Fath al-Qadir*, Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995, jilid 6, h. 190.

³²⁵ Muhammad Ilyas Abdul Ghani, *al-Masajid al-Atsariyah*, (Madinah: al-Rasyidah, 2003), h. 25-27.

³²⁶ Al-Khashshaf, *Ahkam al-Auqaf*, h. 8-15

³²⁷ Imam Muhammad Binti Ismail Al-Shan’ani, *Subul al-Salam*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, Tt), h. 88.

sumber daya manusia melalui pendidikan, perpustakaan, membayar gaji guru, memberi beasiswa, dan sebagainya.³²⁸

Pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah ketika itu yang menjadi hakim di Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramy, ia sangat perhatian terhadap wakaf sehingga terbentuk suatu lembaga yang mengurus perwakafan. Lembaga ini pertama kali melakukan pengadministrasi wakaf di Mesir, bahkan di seluruh negara Islam sehingga wakaf mendapat kepastian hukum. Sejak saat itulah lembaga wakaf dibawah pengawasan Departemen Kehakiman. Pada masa Dinasti Abbasiyah, perhatian wakaf lebih intensif lagi, pada masa itu terdapat sebuah lembaga yang disebut *Sadr al-Wuquf*, lembaga ini bertugas untuk mengurus administrasi, memilih dan mengangkat staf pengelola perwakafan.³²⁹ Pada masa Dinasti Ayubiyah, wakaf di Mesir berkembang pesat, tanah-tanah pertanian yang subur hampir seluruhnya tanah wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi sumber keuangan publik (Baitul Mal). Perkembangan wakaf pada masa Dinasti Mamluk, sangat pesat, benda wakaf pada masa itu beraneka ragam, sehingga apapun yang sekiranya dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Namun demikian harta wakaf yang paling banyak pada masa itu adalah tanah pertanian yang subur dan bangunan, seperti bangunan perkantoran, penginapan dan gedung sahaya (budak) yang digunakan untuk memelihara masjid dan madrasah. Hal ini dilakukan pertama kalinya penguasa Dinasti Usmaniyah ketika menaklukkan Mesir, Sulaiman Basya mewakafkan budaknya untuk merawat masjid.³³⁰

Penggunaan aset wakaf pada masa Dinasti Mamluk meliputi wakaf keluarga (wakaf ahli) yang ditujukan untuk jaminan keluarga, wakaf umum (wakaf khairi) untuk kepentingan

³²⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhjiddin Mas Rida, (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 19.

³²⁹ Al-Khashshaf, *Ahkam al-Auqaf*, h. 17.

³³⁰ Administrator Badan Wakaf, [http: bw-indonesia-Net](http://bw-indonesia-Net).

sosial seperti tempat memandikan mayat dan wakaf khusus untuk memelihara Haramain, Makkah dan Madinah.

Selanjutnya semenjak memasuki abad-15 kerajaan Turki Usmani dapat memperluas wilayah kekuasaannya hingga menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Adapun perluasan tanah wakaf yang berhasil ditingkatkan pada masa kekuasaan Turki Usmani, sebagaimana dilaporkan oleh MA. Manan, pada tahun 1926 tanah-tanah pertanian yang subur di wilayah Turki $\frac{3}{4}$ -nya abad ke-19 sekitar $\frac{1}{2}$ dari tanah pertanian yang ada di negeri itu adalah wakaf, di Tunisia pada tahun 1883 jumlah wakaf mencapai $\frac{1}{3}$ -nya, di Mesir 1935 seluas mencapai $\frac{1}{7}$ -nya dan Iran mencapai 15%-nya.³³¹ Dengan demikian potensi wakaf terlihat begitu besar sehingga dapat memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik khusus keagamaan maupun ekonomi, politik, sosial, budaya dan pendidikan.

C. Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dan Perkembangannya di Indonesia

Substansi wakaf tunai sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fiqh klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fiqh mu'amalah dalam perspektif *maqhasid as-shari'ah* yang dalam pandangan Umar Capra bermuara pada *al-mashlahah al-mursalah* termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik, dan sindrom *capital flight*. Ia sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah

³³¹ Administrator Badan Wakaf, <http://bw-indonesia-Net>.

disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis untuk kesejahteraan sosial. Ia sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang sangat selektif sesuai kaidah Syariah dan kemashlahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian. Ia sekaligus mengubah tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi sehingga yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaum kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin), sebagaimana tulisan Capra dalam berbagai karangannya.

Oleh karena itu sangat tepat bila penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan produktif ke sector riil dimobilisir yang salah satunya adalah dengan memberikan kredit mikro melalui mekanisme kontrak investasi kolektif (KIK) semacam reksadana syariah yang dhimpun Sertifikat Wakaf Tunai (SWT) kepada masyarakat menengah dan kecil agar memiliki peluang usaha dan sedikit demi sedikit bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan akibat krisis berkepanjangan. Pemberian skim kredit mikro ini cukup mendidik ibarat membeli kail bukan hanya ikan kepada rakyat dan diharapkan dapat menciptakan kemandirian. Operasional dapat disalurkan untuk kebutuhan konsumtif dalam menunjang kesejahteraan kaum fuqara (miskin) melalui wasiat wakif (pemegang SWT) ataupun tanpa wasiatnya. Dalam perkembangannya kekinian di Indonesia wacana wakaf tunai telah menjelma nyata dalam implementasi produk-produk *funding* lembaga keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Amil Zakat seperti Wakaf Tunai Dompot Dhuafa Republika dan *Waqtum* (Wakaf Tunai Muamalat) yang diluncurkan baitul Mal Muamalat-BMI.

Dalam rangka mobilisasi dana masyarakat dan optimalisasi potensi financial umat untuk kemashlahatan perekonomian, gagasan

wakaf tunai akan dapat melengkapi UU no. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, dimana zakat dimasukkan sebagai faktor pengurang pajak. Disamping itu juga dapat mendukung lembaga-lembaga pengelola zakat dengan diberlakukannya UU pengelolaan zakat no. 38 tahun 1999. Departemen agama sebagai pemegang otoritas keagamaan dan saat ini juga otoritas administrasi wakaf secara produktif memintakan fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status hukum wakaf tunai guna penyempurnaan PP No. 28 tahun 1977 agar lebih akomodatif dan ekstensif, dan kelak akan menjadi UU Wakaf.

Dalam konteks ini, Indonesia saatnya belajar dari negara Bangladesh, tempat kelahiran Instrument eksperimental melalui Sosial Investment Bank Limited (SILB) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial melalui mekanisme produk *funding* baru berupa sertifikat wakaf tunai yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam instrument keuangan baru ini Sertifikat Wakaf Tunai merupakan alternative pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga Negara yang kaya untuk berbagi kebahagiaan dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Dengan tidak terlalu menggantungkan diri dengan anggaran pemerintah dan pinjaman asing, maka diharapkan dengan penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini mampu menjadi salah satu alternative sumber pendanaan sosial. Efek kemashlahatan dari Sertifikat Wakaf Tunai tersebut yang sudah mulai terasa di Bangladesh adalah meskipun Negara pendidikan dan kesehatan jauh lebih baik dari Indonesia.³³²

³³² Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaa Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 145.

Penyaluran wakaf ini sudah berlangsung sangat lama di Indonesia. Wakaf menurut PP No. 28 Tahun 1977 dan RUU Wakaf yang sekarang sedang disiapkan untuk diajukan sebagai Undang-Undang adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya untuk selamanya demi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pemberian bantuan wakaf yang disebut wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan sebagian hartanya. Selama ini wakaf yang ada dalam masyarakat kita adalah berupa tanah dan bangunan seperti masjid, mushollah, sekolah, panti asuhan, dan lain-lain. Sementara kebutuhan masyarakat saat ini sangat besar sehingga mereka membutuhkan tanah tunai untuk meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wakaf tersebut dibuatlah inovasi produk wakaf berupa Wakaf Tunai, yaitu wakaf yang tidak hanya berupa property, tapi wakaf dengan dana (uang) tunai.

Persoalan sekarang bagaimana model dan mekanisme penerapan Sertifikat Wakaf Tunai ini dapat *applicabledan visible* diterapkan di Indonesia dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikannya dengan struktur masyarakat dan kebudayaan Indonesia itu sendiri. Dengan menimbang dan mengakomodir keberatan sebagian golongan terhadap status hukum wakaf tunai, seperti kalangan Syafi'iyah yang mengkhawatirkan habisnya pokok wakaf, maka sangat mendesak untuk dirumuskan dan diformulasikan model dan mekanismenya semacam *early warning sistem* untuk menghindari resiko pengurangan model wakaf dalam konteks *risk management* meskipun dananya diputarkan dalam investasi sector riil.³³³

³³³ Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*, h. 146.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz. 2003. *Ushul Fiqh, Membangun Paradigma Berfikir Tasyr*. Bogor: Al Azhar Press, 2003.
- Ahmad, Khursid. "Islamic Finance and Banking: The Challenge of the 21st Century", dalam Imtiyazuddin Ahmad (ed.), *Islamic and Finance The Cincept, The Practice and The Challenge* (Plainfield: The Islamic Society of North America, 1999).
- al-Hanafi, Ibnu al-Humam. 1995. *Syarah Fath al-Qadir*, Beirut, dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, KM Murtaza. 1991. *Insurance in Islam: Some Aspects of Islamic Insurance*, Islamic Economics Research Bureau, Dhaka.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2004. *Ensiklopedia Muslim Inhajul Muslim*. Jakarta: Darul Falah.
- al-Khathib, Muhammad al-Syarbini. 1981. *Bujairami 'ala al-Khathib*, juz III. T.Tp Dar al-Fikr.
- Al-Khashshaf, Ahmad bin Amr bin Muhair al-Syaibani. 1999. *Ahkam al-Auqaf*. Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Khashshaf. 1999. *Ahkam al-Auqaf*. Baitu: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Nawawi. T.th. *alMajmu*, Jilid 5, Idharah al-Tibaah al-Munirah.
- Al-Shan'ani, Imam Muhammad Binti Ismail. T.t. *Subul al-Salam*, Jilid 3. BeirutL Dar al-Fikr.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung: Marja.
- Al-Syaukani. Tt. *Nail al-Authar*, jilid 6. Mesir: Musthafah al-Babi al-Habibi.

- al-Thayyar, Abdullah bin Muhammad bin Ahmad. *al-Zakah wa Tathbigatuha al Muashirah Dar al-Wathan*, Cet.II. Riyad: 1414 H.
- Alma, Buchari. 2001. *Pengantar Bisnis*. Bandung: Alfabet.
- al-Wasit, Al-Mujam, Juz 1; Turki, Istambul, t.th.
- al-Zuhaili, Wahbah. T.th. *al-Fiqh al-Islamiyah Addilatuh*. Jilid III, t.th.
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Anshori, Abddul Ghofur & Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Total media.
- _____. 2006. *Gadai Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Antonio, Muhammmad Syafi'i. 2010. *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- ash-Shiddieqy, Hasbi. 1963. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 2009. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.
- Azis, Amin. 2004. *Buku Pedoman Pendirian BMT*. Jakarta: Pinbuk.
- Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf jakarta, 2002. *Pedoman Zakat 9 Seri*. Jakarta: t.p.
- Bank Indonesia. 1999. *Petunjuk Pelaksana Pembukaan Kantor Bank Syari'ah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Islam Malaysia Berhad. 1994. *Islamic Bank Practice from the Practitioners*. Kuala Lumpur.
- Bank Muamalat, *Annual Report*, (Jakarta, 1999).

- Billah, Mohd Ma'sum. 2010. *Penerapan Pasar Modal Islam*. Malaysia: Sweet & Mazwell.
- _____. 2009. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*. Malaysia: Sweet & Mazwell.
- _____. 2010. *Kontekstual Takaful Dalam Aasuransi Modern*. Malaysia: Sweet & Mazwell.
- Chapra, Umer. 1999. *Islam dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*. Surabaya: Risalah Gusti.
- CII (Council of Islamic Ideology). 1983. *Consolidated Recommendations on The Islamic Economic System*. (Islambad: Council of Islamic Ideology).
- Cst. Kansil. 1996. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, cet I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Ahmad Aziz dkk, (ed). 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Departemen Agama. 2004. *Perkembangan Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pemberdayaa Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Echols, Johs M. dan Hasan Syadiliy. 1990. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- el-Najjar, Ahmad. 1972. *Bank Bila Fawaid ka Istiratijiyah lil Tanmiyah al-Iqtishadiyyah*. Jeddah: Kig Abdul Aziz University Press.
- Fardl, Miftah & Agus Syihabuddin. 1987. *al-Quran Sumber Hukum Islam yang Pertama*. Bandung: Pustaka.
- Fatah, Arif Abdul. 1996. *Ruh al-Din al-Islami, Dar al-Ilmy al-Malayii*. Cet VII, Beirut.
- Ghani, Muhammad Ilyas Abdul. 2003. *al-Masajid al-Atsariyah*. Madinah: al-Rasyidah.

- Ghofur, Abdul & Yulkarnain Harahab. 2008. *Hukum Islam: Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hasa, Ali. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah, Kaya Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haq, Hamka. 2009. *Islam Rahmah Untuk Bangsa*. Jakarta: RMBOOKS.
- Hisyam, Ibnu. T.t. *al-Sirah al-Nabawiyah*. T.T: T.Tt.
- Huda, Nurul dkk. 2009. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hughes, Thomas Patric. 1982. *Dictionary of Islam*. New Delhi, India: Cosmo Publications.
- Ilmi, Makhalul. 2002. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ismanto, Kuat. 2009. *Asuransi Syari'ah; Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Ismaniyanti, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT, (Baitulo Maal wat Tamwil)*, Cet. I. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Iswardo. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan*. JakartaL: PT. Raja Grafindo Persada.
- Juhaya & Mukhlisin Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam, WAKAF*. Yogyakarta: STAIC PRESS.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1996. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kazarian, Elias G. 1993. *Islamic Versus Traditional Banking*. Boulder: Westview: Press.
- Karim, Adiwarman. 2003. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: IIIT.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang.

- Khan, Muhammad Mushin. 1979. *The Translation of The Meanings of Sahih al-Bukhari*. Lahore, Pakistan: Kazi Publications.
- Lubis, Suhrawardi L. 2000. *Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahmassani, Sobhi. 1977. *Filsafat Hukum dalam Islam*. Bandung: PT. Al-Ma'rif.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Mehr dan Cammack, 1981. *Dasar-Dasar Asuransi*, Penyadur A. Hasyimi. Jakarta: Balai Aksara.
- _____. 1981. *Manajemen Asuransi*, Pen. A. Hasyimi. Jakarta; Balai Aksara.
- Mufraini, Arief. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: EKONISIA.
- _____. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muin, Rahmawati. 2011. *Manajemen Zakat*. Samata-Gowa: Alauddin University Press.
- Mustafa Edwin Nasution (ed.), 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islami*. Jakarta: Kencana.
- N. Hamidullah. 1983. *Introduction to Islam*, Sh Muhammad Ashraf, paragraf 362
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nopirin. 2007. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Pasaribu, Chairuman dkk. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Perwataatmadja, Karnaen A dan Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

- PKES. 2007. *Buku Saku Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PKES Publishing.
- Projodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Auransi di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa.
- Priansa, Buchari Alma Donni Juni. 2009. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Cet.I. Bandung: Alfabeta.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhjiddin Mas Rida. Jakarta: Khalifa.
- Qardhawi, Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Qutub, Muh. 1962. *Qabasatun Minar Rasuli*, Cet.II. Mesir: Maktabah Wahbah.
- Rahardjo, Dawam. 1988. *The Question of Islamic Banking in Indonesia* dalam Momamed Arif (ed.), *Islamic Banking in South East Asia*. Singapura: ISEAS.
- Rahim MA. 1983. *Islamic Arthmanaitik Nirapatta wa Binma*. Bangladesh, Dhaka: Islamic Foundation.
- Rais, M. Amin. 1992. *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bankit.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. 2008. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. Bandung: al-Maarif.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill.
- Saidi, Zaim. 2011. *Euforia Emas*. Depok: Pustaka Adina.
- Scharf, Trute Wohler. 1983. *Arab and Islamic Banks: New Business Partners for Developing Countries*. Paris: Development Center of the Organization for Economic Cooperation and Development.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syari'ah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: KENCANA.
- S. Praja, Juhaya & Muhklisin Muzarie. 2009. *Pranata Ekonomi Islam (WAKAF)*. Yogyakarta: STAIC PRESS.
- Subekti & Tjitrosudibio. 2000. *KUHD dan Peraturan Kepailitan*, cet. 26. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Suyitno (dkk). 2005. *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syafe'i, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taimiyah, Syekh al-Islam Ibnu. 1983. *Majmu al-fatawa*. Jilid 5, Dar Al-Fikr.
- Ubaid, Abu Abdirrahman Ali Khumais. T.T. *Hidup Bahagia Tanpa Riba*. Jakarta: Ishlahul Ummah.
- Vardit, Rispler. 1985. *Insurance in the World of Islam, Origins and Current*. USA: UMI, 1985.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. 2010. *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi Pada Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Wirdyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Presnada Media.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Yuliadi, Imamudin. 2008. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Indeks, 2008.
- Zahrah, Abu. *Ushul Fiqh*. 1994. Jakarta: Pustaka Firdaus.

JURNAL

- Ali Ibn Abi Sakar Murghimani, *al-Hedaya* (Trans Eng), Charles Hamilton, iThe Hedaya, *Vol.4, Book 51*, (Lahore, Pakistan: Pemier Book House, 1982).
- E. Klingmuller, “The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries” in *Islamic Culture*, Vol 43, 1969
- Ernest Klingmuller, *The Concept and Development of Insurance in Islamic Countries, in Islamic Culture*, Vol. 43, Januari 1969.
- Hylmun Izhar. *Uang Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Syariah Forum Studi Islam SM-FEUI, Nomor 2, 2002.
- M. Aatur Rahman, “*Akti Desher Orthomaitik Unnayona Islami Bimer Vornica:Bangladesh Prekkith, Thought on Economics*”, Vol. 4, N0.3-4, 1994.
- Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd, (Beirut: Bidayatul Mujtihad wa Nihayatul Muqtashid Darul – Qalam, 1988), vol. II.
- Ummul Qari (Constantinople: Mathba’a al_Amira. 1310 H), vol V, h. 436.
- Ziauddin Ahman, “The Present State of Islamic Finance Movement”, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Autum 1985.

ARTIKEL & MAKALAH

- Arif Budiharjo, MESS Jabar, Pengenalan BMT. Makalah disajikan pada Seminar tentang BMT, Bandung 2003.
- Artikel Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1548/KM/90, tentang Peraturatn Pasar Modal.

WEB

www.pesantrenvirtual.com, diakses tanggal 15 Agustus 2014, pukul 09.38.

www.agustiantocentre.com, diakses tanggal 15 Agustus 2014, pukul 09.50.

www.inkopsyahbmt.co.id, diakses tanggal 27 Agustus 2014, pukul 17.04.

www.irti.org, diakses tanggal 25 Agustus 2014, pukul 19:37.

www.asuransitakaful.net, diakses tanggal 20 Agustus 2014.

www.takaful-malaysia.com, diakses tanggal 18 Agustus 2014, pukul 13:36.

www.pegadaiansyariah.com

www.tvtsyariah.com, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 10.43.

www.pegadaian.co.id, Diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 11.33.

www.kompasiana.com, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 18.24.

www.mui.or.id, diakses tanggal 23 Agustus 2014, pukul 18:46.

www.bisnisindeks.com, diakses tanggal 14 Agustus 2014, pukul 19.50.

www.livingwell.co.id, halaman Financial Well Being. Diakses tanggal 14 Agustus 2014, pukul 19.24.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Prof. DR.H. Muslimin, M.Ag. lahir di Kabupaten Bima tepatnya di Dusun Karumbu pada tanggal 2 April 1971. Jenjang sarjana ia tempuh di Insitut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 1996 di bidang studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Kemudian ia melanjutkan program Magister di Program Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 1999 dengan jurusan Syari'ah/Hukum Islam. Jenjang Doktoral ia tempuh juga di Program Pascasarjana Insitut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah pada tahun 2003 di jurusan Syari'ah/Ekonomi Islam. Sekarang, beliau merupakan Guru Besar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.



Dr. Rahmawati Muin, M.Ag. lahir di Ujung Pandang pada tanggal 1 Juli 1976. Jenjang sarjana ia selesaikan pada tahun 1996 di bidang Akhwal Al Syakhshiyah fakultas Syari'ah Universitas Muslim Indonesia. Program Magister ia selesaikan pada tahun 2001 di jurusan Pengkajian Islam konsentrasi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Jenjang Doktoral di selesaikan di program Dirasah Islamiyah kosentrasi Ekonomi Syariah UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016. Tahun 2008 - 2013 menjabat sebagai Sekertaris, 2014 – 2019 menjabat sebagi Ketua Jurusan Ekonomi Islam. Sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.